

**KEMENANGAN CHEN SHUI-BIAN  
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI TAIWAN  
TAHUN 2000**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ASNARUL PURNA WIRAGA**

**NIM. 960910101108**

Pembimbing :

**Drs. Umaldi Radi, MA**

**Drs. Achmad Habibullah, MSi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2001**

S  
324  
WIR  
k

### PENGESAHAN

DITERIMA OLEH TIM PENGUJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA STRATA SATU  
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

DIPERTAHANKAN DI MUKA TIM PENGUJI

HARI : Senin  
TANGGAL : 26  
BULAN : Februari  
TAHUN : 2001  
JAM : 08.00 WIB

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

#### TIM PENGUJI

KETUA

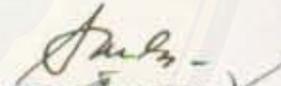
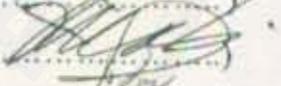
(Drs. Sjoekron Sjah, SU)

SEKRETARIS

(Drs. Umaldi Radi, MA)

#### ANGGOTA TIM PENGUJI

- 1. Drs. Sjoekron Sjah, SU
- 2. Drs. Umaldi Radi, MA
- 3. Drs. Asrial aziz
- 4. Drs. Achmad Habibullah, MSi

- 1. (... )
- 2. (... )
- 3. (... )
- 4. (... )

MENGETAHUI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEKAN

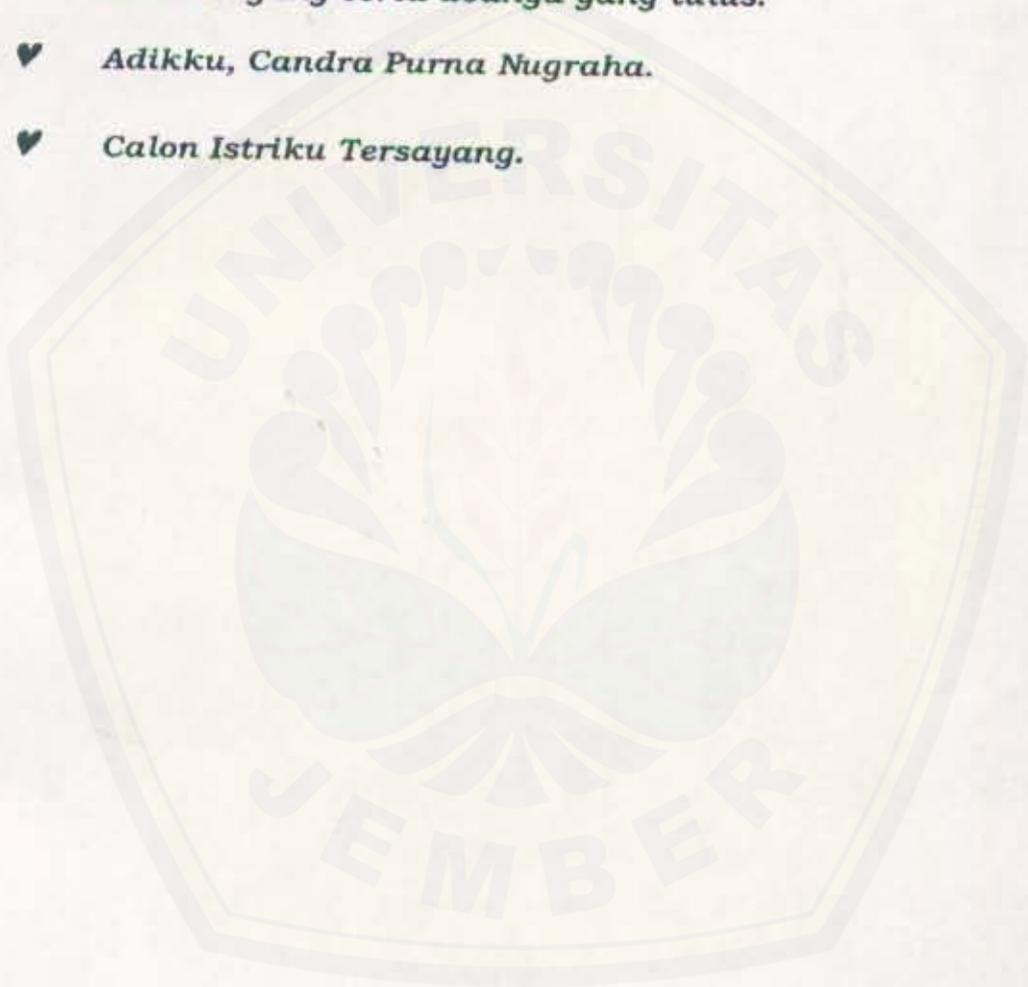
Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

**PERSEMBAHAN**

*Karya tulis ini kupersembahkan kepada:*

- ♥ *Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Shidik Poerwanto dan Siti Nurul Djuwariah yang memberikan bimbingan, kasih sayang serta doanya yang tulus.*
- ♥ *Adikku, Candra Purna Nugraha.*
- ♥ *Calon Istriku Tersayang.*



**Motto**

***Heb God Liep Boven Alles en Uw Naastenn Qelijk U Zelf.  
(Cintailah Tuhan di atas segala hal dan cintailah sesamamu  
seperti engkau mencintai dirimu sendiri).<sup>1</sup>***



***Dzikir adalah kekuatan, kulit, dan sayap roh. Jika tujuanmu  
telah tercapai, itulah cahaya di atas cahaya. (Qs. 24:35) <sup>2</sup>***



<sup>1</sup> Bambang Nursena, *Religi dan Religiusitas Bungkarso: Keberagaman Mengokohkan Keindonesiaan*, Bali Jagadhita, Bali, 2000, hal. 69.

<sup>2</sup> William C. Chittick, *Jalan Cinta Sang Sufi: Ajaran-ajaran Spiritual Jalaluddin Rumi*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2000, hal. 193.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*Kemenangan Chen Shui-bian Dalam Pemilihan Presiden Di Taiwan Tahun 2000*". Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat ilmu pengetahuan yang penulis miliki masih terlalu dangkal dan terbatas. Untuk ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Umaid Radi, MA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat berharga bagi penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Achmad Habibullah, MSi, sebagai asisten pembimbing yang dengan sabar dan tekun memberi petunjuk, bimbingan dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU, sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sumartono, Ibu Sri Yuniati, Dita dan Alfin, terima kasih semuanya.
7. *Virsa, you are my angel and thank's a lot for backing me.*

8. Rekan-rekan HI'96, Feny sayang, Novi, Candra, Nunung, Ely, Agus, Hexa, Luluk, Sigit, Aris, Alip, Sauqi, Izul, Lukman, Joko, Huda, Marwan, Ali dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Jangan lupa dengan 'Tim' kita yang sudah kita prakarsai bersama.
9. Teman-teman KKN Kel. 82 Ds. Tisnogambar Kec. Bangsalsari Jember, atas kenangan di desa semoga menjadi memori dan kisah klasik untuk masa depan.
10. Atlit-atlit UKM Bulutangkis UNEJ dan warga IMASEMUT, *keep on muter-muter, guys!*
11. Sahabat-sahabati seperjuangan di *Halmahera twenty one*, yang merupakan tempat refleksi dan berkiprah demi menegakkan kebenaran. Sahabat tua, Mas Alek, Mas Antok, Mas Fathur. Juga sahabat/i sekandung, Kholik, Budi, Farug, Ratna, Elis, Laili serta sahabat/i junior, Tablek, Umam, Irfan, Dian, Zika, Eliya.
12. Bolo-bolo di Perum. Mastrip Menteng Indah Permai Jember, Nyoto, Otong, Goedoel, Ogah, Antok, Poel-poel, Tamin, Oblo dan Monots *thank's for your "machine"*. Teruslah berjuang demi 'sephia' kalian semuanya, tapi jangan lupa berjuang demi 'Simon'. *Thank's a lot men....!*
13. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik mereka dan akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 14 Februari 2001

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
1.3 Permasalahan.....	7
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	8
1.5 Hipotesis.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.2 Teknik Analisa Data.....	15
1.7 Pendekatan.....	16
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TAIWAN</b>	
2.1 Sejarah Singkat Taiwan.....	18
2.2 Kondisi Geografis, Sosial dan Ekonomi.....	21
2.3 Sistem Politik dan Pemerintahan Taiwan.....	24
2.4 Politik Luar Negeri Taiwan.....	36
<b>BAB III: SISTEM PEMILU DAN SISTEM KEPARTAIAN TAIWAN</b>	
3.1 Sistem Pemilu dan Organisasi Pemilu Taiwan.....	43
3.1.1 Sistem Pemilihan.....	43
3.1.2 Recalls dan Referendums.....	46

3.2 Sistem Kepartaian Taiwan .....	47
3.2.1 Kuomintang Party (KMT).....	48
3.2.2 Democratic Progressive Party (DPP).....	51
3.2.3 New Party (NP).....	54
3.2.4 Nation Building Party (NBP).....	54

**BAB IV: KEMENANGAN CHEN SHUI-BIAN DALAM PEMILIHAN  
PRESIDEN DI TAIWAN**

4.1 Situasi Menjelang Pemilu.....	56
4.1.1 Situasi Politik dan Ekonomi .....	56
4.1.2 Isu-isu Yang Menonjol .....	63
4.1.3 Kampanye Pemilu.....	65
4.2 Pelaksanaan Pemilu dan Penghitungan Suara.....	66
4.3 Faktor-faktor Penentu Kemenangan Chen Shui-bian.....	68
4.3.1 Sosok Pribadi Chen Shui-bian.....	70
4.3.2 Kemampuan Chen Shui-bian Dalam Meyakinkan Opini Publik.....	73
4.3.3 Mobilisasi Chen Shui-bian Atas Dukungan Rakyat dan Program Politik DPP.....	76
4.3.4 Kelemahan Partai Kuomintang.....	81

<b>BAB V: KESIMPULAN .....</b>	<b>83</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------

**Lampiran**

I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan produk kultur yang berasal dan tumbuh dari konteks sosial dan budaya Barat serta merupakan hasil perkembangan sejarah dalam waktu yang lama dan bertahap yang berfungsi antara lain untuk memberikan legitimasi atas kekuasaan yang ada. Bagi suatu regim baru, suasana pemikiran yang bersifat mendukung merupakan input vital bagi bekerjanya dan terpeliharannya suatu sistem politik.

Pemilu di Taiwan dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Pemilu disini sebagai salah satu bentuk partisipasi politik, rakyat Taiwan diberi kebebasan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu kali ini mempunyai arti tersendiri bagi rakyat Taiwan karena merupakan pemilu yang kedua kalinya setelah pemilu pertama tahun 1996 serta merupakan pemilu yang dianggap lebih demokratis dan legitimate daripada pemilu sebelumnya. Pernyataan diatas terbukti pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya jauh lebih besar dibandingkan pada pemilihan Presiden empat tahun yang lalu. Tahun ini, tercatat sebanyak 82,69 persen dari 15.426.625 orang yang menggunakan hak pilihnya. Tahun 1996, ketika Presiden LeeTeng-hui dari Kuomintang memenangkan pemilu yang menggunakan hak pilihnya hanya tercatat 76 persen.<sup>1</sup>

Rakyat Taiwan yang berjumlah 23 juta jiwa tampak antusias sekali memberikan suara di tempat- tempat pemungutan suara. Pemilihan Presiden kali ini berlangsung dalam situasi yang memanas akibat ancaman China terhadap Taiwan, jika rakyat Taiwan tetap memilih Presiden yang pro kemerdekaan yakni Chen Shui-bian. Ancaman Cina yang disampaikan oleh PM. Zhu Rongji setelah Sidang ketiga di Kongres Rakyat Nasional kesembilan,

---

<sup>1</sup> Kompas, 19 Maret 2000

tanggal 15 Maret 2000, yaitu uji coba rudal atau ancaman kemungkinan pecahnya konflik militer di Selat Taiwan. Sebab, menurut PM. Zhu Rongji, siapapun yang mendorong untuk kemerdekaan Taiwan tidak akan berakhir dengan baik.<sup>2</sup> Pernyataan Zhu Rongji ini, secara tidak langsung ditujukan kepada calon presiden yang pro-kemerdekaan, yakni Chen Shui-bian. Sebab, dari kelima calon presiden, hanya Chen Shui-bian dari DPP yang menempatkan kemerdekaan Taiwan sebagai agenda utama di bidang politik. Akan tetapi, ancaman Cina tersebut tidak menyurutkan semangat untuk tetap menghendaki adanya perubahan kondisi politik di dalam negerinya.

Kemenangan Chen Shui-bian dari Partai Progresif Demokrat (DPP) dalam pemilu di Taiwan, telah menghasilkan sejarah baru. Partai Nasionalis Cina (KMT) yang berkuasa selama 89 tahun (38 tahun di daratan Cina, dan 51 tahun di Pulau Taiwan), akhirnya tumbang dalam pemilu yang berlangsung di Taiwan pada hari Sabtu 18 Maret 2000. Sebaliknya Partai Progresif Demokrat (DPP) yang selama ini menjadi oposisi mampu meraih kemenangan mutlak.

Kemenangan Chen Shui-bian ini telah mengukir sejarah baru pada awal abad ke-21. Kemenangan ini merupakan yang pertama kalinya bagi DPP dan mengakhiri era kejayaan Kuomintang (KMT) yang berpengalaman dalam politik Cina dan Taiwan. Kemenangan ini tidak diduga sebelumnya karena satu minggu menjelang pemungutan suara tidak diperbolehkan untuk mengadakan jajak pendapat, akan tetapi hasilnya tetap merupakan suatu kejutan.

Dalam sejarah pemilu Taiwan, Partai Progresif Demokrat (DPP) tidak pernah memenangkan pemilu. Melalui frekuensi kemenangan jabatan Kuomintang di parlemen dapat diketahui bahwa Kuomintanglah yang sering memenangkan pemilu. Kejayaan Kuomintang itu mulai tampak tahun 1949, ketika Republik Cina (nama resmi Taiwan) didirikan oleh Sun Yat-sen dan dipertahankan oleh Chiang Kai-shek sampai tahun 2000. Selama 51 tahun terakhir, KMT mampu membangun identitas politik dan ekonomi yang mengesankan bagi Taiwan. Tentu saja prestasi dan jasa KMT tetap dikenang,

---

<sup>2</sup> Beijing Review, No. 13, 27 Maret 2000

karena memprakarsai proses demokrasi sejak 13 tahun yang lalu. Pada sisi yang lain, selama Kuomintang berkuasa dalam permainan politik dipemerintahan, Kuomintang dikenal penuh dengan kecurangan. Kuomintang cenderung mempertahankan *status quo* dan menikmati keamanan. Perilaku Kuomintang kurang sensitif terhadap aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan transparansi. Kemampuan KMT mengoreksi diripun pun terus berkurang. KMT, Misalnya tidak pernah secara terbuka membicarakan tentang pentingnya pembentukan pemerintahan bersih dan baik (*good government*).

Pengurus dan pemerintahan Kuomintang saling berebut pengaruh di partai dan mengabaikan praktik korupsi dan kolusi yang cukup merisaukan rakyat Taiwan. Contoh kasat mata dari fenomena ini adalah tampilnya kandidat presiden dari kubu independen James Soong. Dia adalah mantan Sekjend Kuomintang, tapi membelot karena tidak cocok dengan mekanisme ortodoks pada praktik politik di tubuh partai yang berkuasa itu dalam pencalonan presiden. James Soong meminta dilakukan pemilihan awal di internal partai, tapi ditolak atas restu Presiden Lee Teng-hui. Sebab, Lee Teng-hui lebih cocok dengan Lien Chan, yang juga kandidat presiden dari Kuomintang dan ikut mencalonkan diri. Kaum intelektual yang menolak *status quo* menilai bahwa James Soong adalah sosok yang reformis yang layak didukung, meski akhirnya kalah.

Chen Shui-bian alias Ah-bian mulai menggebrak pentas politik pada tahun 1994. Tepatnya, saat ia memenangkan pemilihan kursi wali kota Taipei dan itu merupakan posisi tertinggi yang berhasil dicapai dalam sejarah kiprah politik DPP di Taiwan. Chen Shui-bian adalah wali kota pertama yang terpilih secara demokratis dalam tatanan baru sistem politik Taiwan. Selama empat tahun menjadi wali kota (1994-1998), Chen Shui-bian menunjukkan prestasi yang gemilang. *Rating* Chen Shui-bian selalu ada diatas 70 persen, kebijakan dan praktik pemerintahannya dikenal efektif dan efisien. Di bawah kepemimpinan Chen Shui-bian, tingkat kejahatan di Taiwan menurun drastis, kemacetan lalu lintas yang sudah sekian lama menjengkelkan rakyat bisa direduksi sampai

ambang yang paling minim, sehingga tidak mengherankan bila dia banyak didukung oleh kalangan kelas menengah perkotaan.

Salanjutnya saingan yang akan membayangi Chen Shui-bian ada empat calon Presiden Taiwan. *Partama*, Lien Chan dari partai Kuomintang (KMT), Lien Chan mempunyai karir politik yang gemilang. Lien Chan adalah mantan Wakil Presiden (1996-2000) dan dijagokan oleh Presiden Lee Teng-hui, pernah menjabat sebagai wakil ketua KMT (1993-2000), PM. Taiwan (1993-1997), Gubernur Taiwan (1990-1993), Menteri Luar Negeri (1988-1990), Wakil PM. Taiwan (1987-1988), dan Menteri Transportasi dan Komunikasi (1981-1987). Dalam kampanye pemilihan presiden, Lien Chan mempunyai agenda utama yaitu membentuk *clean government*, dan menginginkan hubungan yang lebih akrab dengan Cina atas dasar posisi masing-masing.

*Kedua*, Lee Ao dari Partai Baru (NP) yang merupakan seorang sejarawan, pemandu TV talk show, dan bekas tapol. Meskipun Lee Ao tidak pernah menduduki jabatan politik resmi, akan tetapi Lee Ao mempunyai agenda utama bila terpilih Presiden Taiwan yaitu dalam reunifikasi dengan Cina, formula yang ditawarkan "*satu negara, dua sistem*".

*Ketiga*, James Soong yang berasal dari partai independen. Dia adalah mantan Sekjend KMT dan juga tangan kanan Presiden Lee Tang-hui, namun membelot karena tidak cocok dengan mekanisme ortodoks pada praktik politik dalam pencalonan presiden. Dia juga mantan Gubernur Provinsi Taiwan (1994-1998), pernah menjabat sebagai Sekjend KMT (1989-1996), anggota sentral komite KMT (1988-1999), dan Wakil Sekjend (1987-1989). James Soong dalam kampanye politiknya mempunyai agenda utama yaitu ingin membentuk pemerintahan yang bersih. Sedang dalam hubungannya dengan Cina, James Soong menerapkannya di dalam perjanjian internasional.

*Keempat*, adalah Hsu Sin-Liang, meskipun pernah menjadi pelarian politik di AS selama 10 tahun, Hsu Sin-liang adalah mantan ketua DPP (1996-1998). Agenda utamanya adalah menginginkan reformasi di pemerintahan setelah terpilih nanti. Hal yang menarik pada Hsu Sin-liang adalah ia mendukung

kebijakan "*satu-Cina*". Dari banyaknya kandidat Presiden Taiwan itu, menggambarkan bahwa pemilu kali ini merupakan pemilu yang demokratis dan legitimate.

Chen Shui-bian dalam kampanyenya mengajukan program bidang politik sebagai prioritas utama. Chen Shui-bian disamping menginginkan *Clean Government* di Taiwan, juga menajjikan kepada rakyat Taiwan suatu konsep tentang hubungannya dengan Cina. Bahwa hubungan Cina dengan Taiwan harus didasarkan asas kesamaan status sebagai negara. Dalam konteks reunifikasi, Chen Shui-bian mengatakan bahwa dirinya masih tetap menolak reunifikasi dengan Cina bila formula yang ditawarkan adalah satu negara dua sistem. Chen Shui-bian menjanjikan untuk berjuang keras demi kedaulatan Taiwan yang independen. Hal ini sebenarnya tidak jauh beda dengan sikap Kuomintang, tetapi Kuomintang dinilai kurang tegas. Justru, ditangan Chen Shui-bian ada harapan untuk merdeka. Dia mempunyai konsep yang jelas tentang reunifikasi. Selain *inlander*, dia tidak ingin setiap kali perundingan reunifikasi selalu dibawah tekanan Cina. Ah-bian juga tidak ingin mengacaukan keamanan Taiwan hanya dengan keinginan referendum untuk lepas dari Cina.

Dintara kelima kandidat Presiden Taiwan itu, hanya Chen Shui-bian lah yang menggagas kemerdekaan Taiwan dari Cina, sebagai agenda utama kebijakanya bila terpilih. Menurut Chen Shui-bian, hubungan Cina dan Taiwan harus didasarkan asas kesamaan status sebagai negara yang berdaulat. Karena itu tidaklah mengeherankan, di saat pemilu yang dibayang-bayangi intimidasi militer Cina ini, Chen Shui-bian adalah pilihan yang tepat.

Kemenangan Chen Shui-bian dari Partai Progresif Demokrat (DPP) atas Lien Chan, James Soong, Hsu Hsin-liang, dan Lee Ao pada pemilu Taiwan kali ini menarik untuk disimak. Mengingat kemengan Chen Shui-bian dari DPP ini telah mengalahkan Kuomintang, yang memegang tumpuk pemerintahan selama 91 tahun, kinerjanya dapat dikatakan baik, meskipun ada segi buruknya dari Kuomintang. Memang, disatu sisi rakyat tidak dapat mengabaikan arti penting kemajuan ekonomi Taiwan yang sudah diukir Kuomintang. Dari Rp. 100 ribu

pada tahun 1950-an, pendapatan perkapita 23 juta rakyat Taiwan meningkat menjadi Rp. 96 juta pada tahun lalu.<sup>3</sup>

Berangkat dari fenomena-fenomena diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul: **“KEMENANGAN CHEN SHUI-BIAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI TAIWAN TAHUN. 2000 .**

## 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan adanya ruang lingkup pembahasan, agar pembahasan masalah berkembang ke arah yang tepat. Sedangkan tujuan diadakannya pembatasan masalah dengan menentukan ruang lingkupnya adalah untuk membatasi permasalahan, agar dalam pembahasan nanti tidak keluar dari jalur dan kerangka masalah yang ditentukan..

Menurut Joseph Frankel: “Pada suatu titik tertentu, kejadian historis adalah unik, karena itu semakin luas ruang lingkup studi kita, maka akan semakin sukar untuk membuat pernyataan.”<sup>4</sup> Pembahasan masalah juga berkaitan dengan keterbatasan biaya, waktu, tenaga dan kemampuan intelektual guna menyelidiki semua interelasi persoalannya.<sup>5</sup>

Lebih lanjut Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa semua peristiwa berkaitan dengan rangkaian hukum kausalitas, tapi tidak semua sebab menimbulkan akibat, karena sebab riil masih harus dibatasi oleh ruang dan waktu.

Ruang lingkup pembahasan ini meliputi batasan waktu dan batasan materi, yang dapat disebutkan sebagai berikut:

### a. Batasan Materi

Dalam penulisan ini akan dibatasi pada hal yang berhubungan sistem politik di Taiwan dan dinamika politik yang terjadi dalam kehidupan politik Taiwan, kehidupan kepartaian, dan pemilu itu sendiri.

<sup>3</sup> Jawa Pos, 19 Maret 2000

<sup>4</sup> Joseph Frankel, *Hubungan Internasional*, Aris Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1980, hal. 20

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 55-56

Materi yang hendak penulis uraikan seputar pada proses pemilihan Presiden Taiwan tahun 2000, isu-isu yang menonjol, sikap dan pandangan rakyat dalam pemilihan Presiden Chen Shui-bian dan opini publik yang terbentuk serta pengaruhnya terhadap kemenangan Presiden Chen Shui-bian.

#### **b. Batasan waktu**

Batasan waktu, penulis memberikan batasan antara kurun waktu mulai tahun 1996-2000, yaitu tahun 1996 dari terpilihnya Lee Teng-hui sebagai Presiden Taiwan sampai tahun 2000, saat Chen Shui-bian terpilih sebagai Presiden Taiwan periode 2000-2004.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bila penulis akan memasukkan hal-hal diluar garis pembatasan yang telah ditentukan sepanjang masih ada relevansinya dengan pokok bahasan yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai data pendukung.

### **1.3 Permasalahan**

Selama manusia hidup, selama itu pula tidak ada masalah yang tuntas. Pada hakekatnya masalah adalah jiwa penelitian. Setiap penelitian atau analisis suatu peristiwa, pada titik tertentu akan terbentur pada permasalahan yang menuntut jawaban. Masalah akan mendorong untuk berpikir dan melakukan penyelidikan untuk berpikir dan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan pemecahannya. Sebelum penulis merumuskan permasalahan dalam tulisan ini, berikut pendapat dari Winarno Surakhmat yang memberikan permasalahan sebagai berikut:

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai satu rintangan yang harus dilalui (dengan jalan mengatasinya) apabila kita akan berjalan terus.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 34

Berdasarkan pendahuluan diatas maka penulis mengemukakan permasalahan sehubungan dengan judul yang ditetapkan, yang terangkum dalam pertanyaan sebagai berikut: *Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemenangan Chen Shui-bian dalam pemilihan presiden Taiwan tanggal 18 Maret 2000 ?*

#### 1.4 Kerangka Dasar Teori

Landasan teori yang digunakan untuk menjembatani antara problematika dan hipotesis yang penulis ajukan, serta analisa-analisa yang disusun dalam suatu kerangka yang teratur, seperti yang dikatakan Mochtar Mas' oed:

“Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan ‘mengapa’; artinya, berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi.”<sup>7</sup>

Sementara itu Charles A. Mc Clelland mendefinisikan teori sebagai berikut:

“Teori merupakan kerangka dasar untuk mengatur fakta-fakta; Teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan; Teori merupakan seperangkat pernyataan mengenai kenyataan yang diharapkan; Teori merupakan pikiran spekulatif, bebas dari ikatan dari dunia nyata; Teori merupakan abstraksi.”<sup>8</sup>

Jadi jelas bahwa dasar pandangan teori ini memegang peranan penting dalam setiap penulisan ilmiah, karena teori merupakan suatu konsep yang dapat menjelaskan suatu fenomena yang akan kita amati. Disamping itu teori berfungsi untuk membimbing jalannya penelitian yang penulis lakukan.

Sebagaimana hal tersebut diatas maka dalam mengorganisasikan dan menangkap fakta-fakta serta melakukan pembahasan terhadap permasalahan, sebagai pisau analisis penulis menggunakan teori “partisipasi politik.” Partisipasi politik secara umum adalah ingatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

<sup>7</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hal. 219

<sup>8</sup> Mc. Clelland, Charles A, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*, Terjemahan Mien Jobhaar & Ishak Zahir, CV. Rajawali, Jakarta, 1981

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Kemudian menurut Herbert McClosky dalam *Internatioanal Encyclopedia of the Social Sciences*: "Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum."<sup>9</sup>

Partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dalam sistem politik otoriter maupun demokratik serta dalam hampir semua kebudayaan politik terdiri dari bermacam-macam bentuk partisipasi politik. Kegiatan politik "konvensional" adalah bentuk partisipasi politik yang "normal" dalam demokrasi modern. Bentuk "non-konvensional" termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Tabel dibawah ini merupakan gambaran ringkas bentuk-bentuk partisipasi politik.<sup>10</sup>

KONVENSIONAL	NON-KONVENSIONAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian suara (voting)</li> <li>• Diskusi politik</li> <li>• Kegiatan kampanye</li> <li>• Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan</li> <li>• Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan petisi</li> <li>• Berdemonstrasi</li> <li>• Konfrontasi</li> <li>• Mogok</li> <li>• Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran)</li> <li>• Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)</li> <li>• Penang gerilya dan revolusi</li> </ul>

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 1.

<sup>10</sup> Mohtar Mas'ood & Colin MacAndrews, *Pernbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, 1997, Yogyakarta, hal.47.

Pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik yang aktif yang paling luas tersebar. Dewasa ini pemberian suara terdapat di hampir semua sistem politik, baik yang demokratis maupun otoriter. Kegiatan pemberian suara, dalam pemilihan presiden di Taiwan tahun 2000 merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Sementara itu untuk menjelaskan perilaku politik Chen Shui-bian sebagai presiden terpilih dalam pemilihan presiden tahun 2000, penulis menjelaskan konsep tentang kepribadian atau *personality*. Para teoritis kepribadian menjelaskan secara umum bahwa kepribadian (*personality*) adalah sifat-sifat manusia yang sangat dasar. Istilah kepribadian dalam bahasa metodologi disebut "*construct*", karena arti yang diberikan pada istilah kepribadian itu dibangun dari penafsiran kita tentang manifestasinya dalam bentuk perilaku.

Lebih jauh lagi Barber mendefinisikan "karakter" atau kepribadian sebagai orientasi seseorang terhadap kehidupan. Ia mencoba menjelaskan konsep *personality* dengan kepribadian para presiden yang menjelaskan perilaku politik mereka. Barber membangun suatu tipologi kepribadian para presiden berdasarkan dua dimensi. Dimensi *pertama*, yaitu "aktif-pasif", yang mengukur seberapa besar energi yang dicurahkan oleh presiden untuk menjelaskan peranannya. Apakah dalam menjalankan pekerjaannya presiden itu menerapkan pendekatan aktif atau pasif? Apakah ia suka mengambil inisiatif, melibatkan diri dalam masalah dan menciptakan isu-isu yang perlu ditangani atau apakah ia memandang jabatan kepresidenan hanya untuk menangani masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan di tempat lain? Dimensi *kedua* menggambarkan respon presiden secara afektif terhadap peranannya. Dimensi "positif-negatif" ini merupakan indikasi tentang tingkat kepuasannya terhadap apa yang telah dikerjakannya. Apakah presiden itu dengan penuh percaya diri menikmati kehidupan politik atau ia lebih merasa dibebani oleh tanggung jawab berat? <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989, hal. 15-16.

Untuk memahami model kausal itu kita perlu membahas tipologi Barber itu satu per satu. Dibawah ini kita akan membahas tipologi itu dengan memperhatikan ciri pokok, perkembangan dan pola perilaku yang terdiri dari empat tipe.<sup>12</sup> *Pertama* adalah tipe “aktif-positif” yang tertarik pada kekuasaan politik, karena kegiatan itu memberi mereka kesempatan untuk berprestasi dan untuk mencapai tujuan. Penalaahannya secara tuntas atas bahan-bahan biografik meyakinkannya bahwa presiden yang aktif-positif dulu ketika masih masa kanak-kanak memperoleh kasih sayang dan dorongan, karena mereka tumbuh sebagai anak yang puas terhadap dirinya sendiri. Sementara pada waktu yang sama memperoleh pelajaran bahwa mengejar prestasi adalah sesuatu yang memuaskan.

*Kedua* adalah mereka yang “aktif-negatif” merasa bahwa politik dan kekuasaan berjalan seiring. Dan walaupun tidak disadari, kesempatan untuk mengendalikan orang lain itulah yang dikejar. Mereka memiliki kebanggaan dan harga diri yang rendah sebab ketika kecil tidak menikmati kasih sayang dan perhatian seperti itu. Ini berakibat bahwa mereka merasa mempunyai kebutuhan besar untuk mencari cara bagaimana meningkatkan kebanggaan diri itu pada permukaan, kedua ini tampaknya sama dalam hal tingkat aktifitas, namun dibawah permukaan keduanya sangat bertentangan.

Katagori *ketiga*, yaitu tipe kepribadian “pasif-positif”, ditandai oleh adanya, kebutuhan akan kehormatan, bukan karena kesengsaraan dimasa kanak-kanak tetapi justru karena terlalu banyaknya kasih sayang yang diterima. Pribadi seperti ini, bahwa apa yang lebih memuaskan dari pada pernghormatan yang diberikan oleh sejuta rakyatnya? Namun, karena sebagai kanak-kanak tidak didorong dengan untuk berusaha berprestasi, mereka tidak menangani pekerjaan kepresidenan itu dengan mentalitas yang aktif dan berusaha mengejar tujuan, seperti halnya pribadi aktif positif.

Tipe *keempat* adalah “pasif-negatif”. Presiden seperti ini tidak menikmati jabatan kepresidenan dan karenanya tidak aktif. Mereka ini lebih didorong oleh motif menjalankan tugas kemasyarakatan. Ia adalah orang yang menjadi presiden

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

karena merasa itu adalah tugas dan karena kesetiaan, bukan karena ingin dihormati orang banyak. Ia cenderung tidak luwes, memandang rendah kehidupan politik dan tidak suka konflik dan ketidakpastian. Karena itu sedikit sekali keinginannya untuk aktif dan berpengaruh kuat.

Dari penjelasan tipologi kepribadian yang dijelaskan oleh Barber, sosok kepribadian Chen Shui-bian termasuk dalam kategori aktif positif dan pasif negatif. Kepribadian Chen Shui-bian dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi Taiwan merupakan dorongan pribadinya untuk berprestasi dan memenuhi keinginan masyarakat Taiwan yang ingin terlepas dari konsep *One-China*. Disamping itu merupakan tugas kemasyarakatan yang harus dilaksanakan dan bukan karena dorongan untuk memperoleh kekuasaan, bukan karena ingin berprestasi besar, juga bukan karena ingin dihormati orang banyak.

Selanjutnya untuk dapat menjelaskan tingkah laku para pemilih dalam pemilihan Presiden langsung di Taiwan, penulis mengemukakan konsep tentang tingkah laku para pemilih yaitu "*voting behaviour*." Para ahli ilmu politik menyatakan bahwa batasan konsep *voting behaviour* adalah tingkah laku dalam pemungutan suara pada pemilu. Harold F. Gaswell berpendapat:

"Voting Behaviour adalah proses dimana seorang anggota masyarakat di suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan dengan demikian ikut serta dalam menentukan konsensus diantara anggota-anggota kelompok itu dalam pemilihan seorang pejabat maupun keputusan yang diusulkan."<sup>13</sup>

Pada pemilihan Presiden di Taiwan tingkah laku pemilih dalam menjatuhkan pilihannya sangat dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap situasi politik yang sedang berkembang. Para pemilih mendapat intimidasi dari Cina jika rakyat Taiwan tetap memilih calon presiden yang pro-kemerdekaan yakni Chen Shui-bian. Ancaman intimidasi itu disampaikan oleh PM. Zhu Rongji di Beijing setelah Sidang Kongres Rakyat Nasional. Dalam ancaman itu, PM. Zhu Rongji mengingatkan rakyat Taiwan yang kini dipersimpangan, agar tidak

<sup>13</sup> Harold F Gaswell, Voting Edwin R. Saligman & Alfin Johnson (ed), *Encyclopedia of The Social Science*, 1934.

memilih calon Presiden yang salah. Sebab, siapapun yang terpilih, bila tidak serius reunifikasi, apalagi mengikrarkan kemerdekaan, pasti Beijing akan menyerang. Karena mempertahankan keutuhan Cina merupakan kewajiban dan demi kehormatan yang siap dipertaruhkan dengan darah dan korban nyawa.

Menanggapi intimidasi Cina, rakyat Taiwan secara umum tidak menunjukkan perubahan. Para pemilih seolah-olah tidak terpengaruh oleh isu acaman militer Cina dan menghendaki perubahan baru dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

### 1.5 Hipotesis

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan, diperlukan adanya suatu hipotesa. Sebagaimana dikemukakan oleh Winarno Surakhmat sebagai berikut:

"Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap sesuatu soal, yang dimaksudkan sebagai suatu tuntunan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Hipotesa-hipotesa ini dijabarkan atau ditarik postulat-postulat dan hipotesa tersebut tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau yang harus dapat dibenarkan oleh penyelidik, walaupun selalu dapat diharapkan terjadi demikian."<sup>14</sup>

Selanjutnya hipotesa adalah dugaan tentang hubungan diantara konsep-konsep, sesudah diuji dengan bukti-bukti yang ada berdasar asas-asas metode saintifik, sehingga generalisasi itu dapat ditolak atau diterima.<sup>15</sup>

Dengan melihat permasalahan yang telah penulis kemukakan di awal dan fakta-fakta yang berhubungan dengan Taiwan, penulis memberikan hipotesa bahwa kemenangan Chen Shui-bian dalam pemilihan presiden di Taiwan dipengaruhi oleh:

<sup>14</sup> Winarno Surakhmat, *Op.cit.*, hal. 39.

<sup>15</sup> Mohtar Mas'ood, *Op.cit.*, hal. 208.

*"Kelebihan Chen Shui-bian yang tidak dimiliki oleh kandidat lain yaitu sosok pribadi Chen Shui-bian, kemampuannya meyakinkan opini publik, mobilisasi atas dukungan rakyat dan program politik DPP serta kelemahan partai Kuomintang, yang berpengaruh besar terhadap keberhasilannya menduduki kursi presiden."*

## 1.6 Metode Penelitian

Sudah menjadi syarat dalam penulisan ilmiah untuk mengadakan penelitian, yang sebelumnya harus disertai pula dasar-dasar pemikiran terhadap objek yang diteliti. Metode tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik penulisan. Metode akan bermanfaat untuk mendapatkan kerangka berpikir dan data yang dibutuhkan agar karya tulis menjadi ilmiah, sistematis, dan kronologis. Menurut The Liang Gie, metode adalah:

*"Cara atau langkah yang berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sehingga pada ujung akhirnya merupakan cara atau langkah untuk memeriksa kebenaran dari pada pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut."<sup>16</sup>*

Dari pengertian tersebut, maka metode merupakan jembatan atau penghubung yang mempermudah dalam mencari kesimpulan yang benar dan akurat dalam suatu penelitian ilmiah. Maka dari itu diperlukan tahap-tahap sebagai langkah nyata yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisis data.

### 1.6.1 Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan tahap sebenarnya dari suatu pembuatan tulisan ilmiah. Dalam tahap ini digunakan metode-metode tertentu agar sesuai dengan tujuan penulisan dari masalah yang hendak diteliti. Dalam hal ini penelitiannya berbentuk observasi tidak langsung yang menghasilkan data yang bersifat

<sup>16</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik: Studi Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan dan Metodologi*, cetakan ketiga, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1974, hal. 97.

sekunder artinya data hasil dari pengamatan terhadap objek yang dikumpulkan melalui lembaga tertentu yang kompeten.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku referensi, data dokumentasi, hasil-hasil studi terdahulu, jurnal terbitan baik dalam negeri maupun luar negeri, serta media massa. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian pada:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
2. Perpustakaan pusat Universitas Jember.
3. Perpustakaan Center For Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.
4. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta.
5. Perpustakaan LITBANG Departemen Luar Negeri di Jakarta.
6. Kedutaan Besar RRC di Jakarta.

#### 1.6.2 Tahap Analisis Data

Mengingat data yang berkumpul tidak dapat diukur secara langsung, maka tahap analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Untuk mencapai data yang diinginkan dengan baik maka penulis menggunakan metode deduktif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Sutrisno Hadi, MA tentang cara berpikir deduktif adalah sebagai berikut:

“Berpikir deduktif adalah apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis itu, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa termasuk dalam kelas atau jenis itu.”<sup>17</sup>

Keberhasilan Chen Shui-bian menduduki Presiden tentunya berkat kelebihan-kelebihan yang dimilikinya yang tidak dimiliki oleh calon lainnya. Berangkat dari data-data yang bersifat umum tersebut akan dapat digali data-data lainnya yang bersifat khusus guna kesempurnaan tulisan ilmiah ini. Dengan menggunakan metode analisis data secara deduktif ini, maka akan dapat dijelaskan data-data yang bersifat khusus tersebut.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, Jilid 1, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hal. 49.

### 1.7 Pendekatan

Suatu penulisan ilmiah tidak terlepas dari masalah pendekatan. Penulis dalam usaha mempertajam analisa, memerlukan suatu pendekatan (*approch*) yang dapat membuat penelitian akan semakin jelas dan lebih spesifik. Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah:

“keseluruhan rangkaian sikap penyelidikan, sudut pandangan, ukuran, pangkal duga dan kerangka dasar pemikiran dari pada suatu ilmu. Jadi pendekatan merupakan keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran, memasuki suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat mengenai sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.”<sup>18</sup>

Dalam membahas persoalan-persoalan seperti yang dipaparkan diatas, maka digunakan pendekatan sejarah politik (*political history approach*) dengan maksud untuk menggambarkan bagaimana pembentukan opini publik yang berpengaruh besar terhadap kemenangan Presiden Taiwan sebelumnya, sehingga Chen Shui-bian pun harus memperhitungkan opini publik yang ada. Menurut The Liang Gie, sejarah politik adalah:

“Hampiran sejarah dan mempergunakan pengetahuan tentang masa yang lampau apabila menafsirkan pertumbuhan gejala-gejala politik pada waktu ini maupun pada masa depan yang mungkin terjadi.”

Sedangkan pendekatan sejarah politik menurut Charles Einsman adalah:

“political history is, in the last resort, the chronological description of the political facts of every kind, whether institutional or non- institutional, in the life of state (or political society) considered separately (internal policy), or in the relations between several States (or societies) (foreign policy and international policy)”<sup>19</sup>

Terjemahannya adalah:

“Pada peristiwa- peristiwa yang lalu, dalam gambaran secara kronologis tentang berbagai jenis fatwa politik baik institusional maupun non institusional, dalam kehidupan bernegara, (atau masyarakat politik), atau dalam hubungan

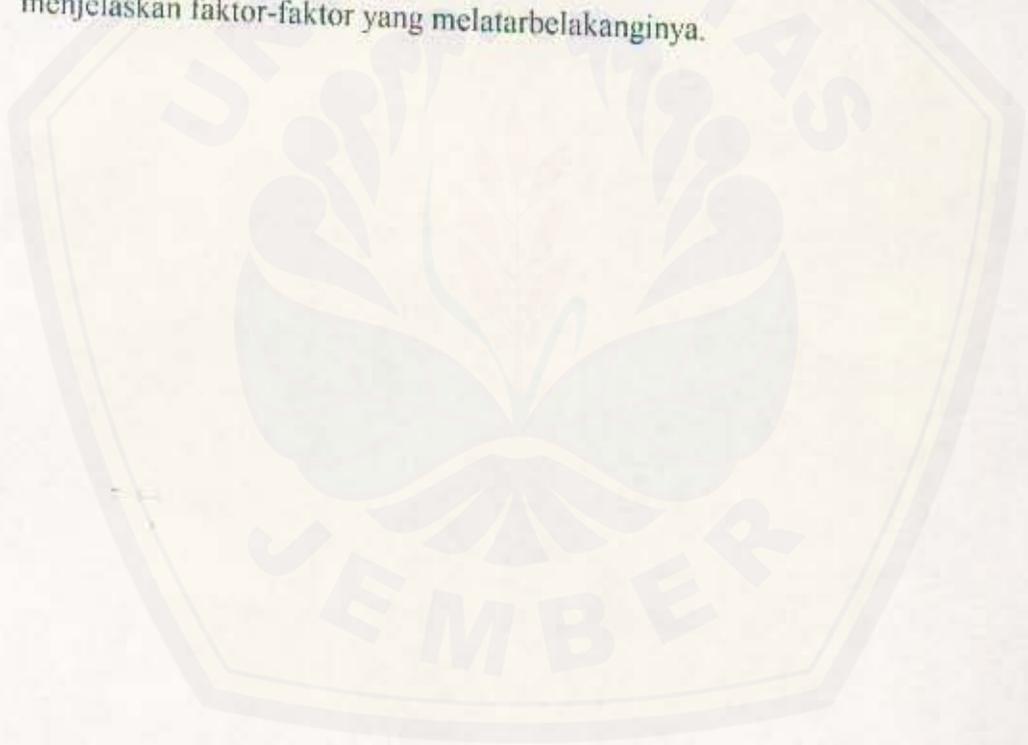
<sup>18</sup> The Liang Gie, *Op.cit.*, hal. 75-76.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 82.

antara beberapa negara (masyarakat) pPolitik luar negeri dan kebijakan interasional).”

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa proses sejarah merupakan keadaan yang selalu berubah dan merupakan proyeksi sendiri menuju masa depan. Penelitian dengan menggunakan metode ini, merupakan penyelidikan yang kritis mengenai keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman di masa lampau dan menimbang dengan cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut.

Melalui pendekatan ini penulis mencoba untuk menganalisa latarbelakang skemenangan Chen Shui-bian dalam pemilu dengan berpijak pada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya secara kronologis, dengan harapan dapat menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.



## II

### GAMBARAN UMUM TAIWAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Taiwan

Negara Taiwan didirikan pada tanggal 1 Januari 1912, sesudah revolusi yang berhasil dipimpin oleh Sun Yat-sen yang kemudian dinobatkan sebagai pendiri terhormat republik tersebut. Sebelumnya selama beribu-ribu tahun Taiwan merupakan bagian terpencil di Kekaisaran Cina yang terpotong oleh letak geografis dari pusat pemerintahan, sehingga menjadi tempat pengungsian para pemberontak dan para pemukim yang ulet di berbagai bagian Asia.

Awal mulanya Taiwan mulai menunjukkan hal yang sangat berarti dalam sejarah Cina dikala sejumlah besar pemukim Cina (dari propinsi Fujian) berdatangan pada abad ke-17 dan 18. Penakluk asal Belanda muncul dipermukaan bumi pulau Taiwan tahun 1624, disusul oleh Spanyol tahun 1626 yang akhirnya dikuasai kembali oleh Belanda tahun 1641. Selanjutnya berangsur-angsur pulau itu menjadi pusat jalur perjalanan antara Hindia-Belanda dan Jepang. Sementara Belanda, Spanyol dan Inggris mulai mengembangkan hubungan dagang dengan Timur Jauh. Penyelenggara Belanda membesarkan hati Cina di Taiwan untuk bergerak di bidang produksi gula dan Belanda menggantikan agama penduduk asli menjadi Kristen, namun penanaman budaya atas Taiwan tidak begitu banyak yang ditinggalkan.

Sesudah Dinasti Ming ditumbangkan oleh Manchus di tahun 1644, seorang Jenderal Ming, Cheng Ch'eng Kung (biasa dikenal dengan Koxinga di Barat) yang merupakan koloni besar Cina pertama mendirikan tempat berpijak di Taiwan (1661). Ceng Ch'eng Kung (*Koxinga*) mengharapkan bahwa Taiwan dapat dipakai sebagai basis untuk menyehatkan Daratan Cina. Tentaranya, yang sebagian besar terdiri dari atas orang Fujian ini, bertahan selama dua dekade sebelum tentara Manchus menguasai kembali Pulau Taiwan tahun 1683, dan akhirnya menegaskan pemerintahan Manchus berlaku atas Taiwan hingga tahun 1693.

Taiwan diterima sebagai status Propinsi tahun 1886. Namun sepuluh tahun kemudian pulau itu menjadi korban perang antara Jepang dan Cina (Tiongkok) yang pertama kali pada tahun 1894-1895. Perang ini berakhir setelah penandatanganan Perjanjian Shimonoseki (*Yamaguchi Prefecture*) tahun 1895. Perjanjian Shimonoseki menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan Cina untuk kemerdekaan Korea.
2. Penyerahan Semenanjung Liaodong, Formosa (Taiwan) terhadap Jepang.
3. Pembayaran ganti rugi 200 juta oleh Cina terhadap Jepang.
4. Pembukaan empat pelabuhan: Shashi, Chongqing, Suzhou, dan Hangzhou.<sup>1</sup>

Walaupun Perjanjian Shimonoseki menyerahkan Taiwan ke tangan Jepang sebagai akibat kekalahan Cina di dalam perang Jepang dan Cina (Tiongkok) tersebut, rakyat Taiwan pantang menyerah kepada penguasa Kolonial Jepang. Selama sepuluh tahun berikutnya, pemerintah Jepang bekerja untuk memperbaiki ekonomi dan membangun pulau itu sebagai pos terdepan yang strategis bagi Jepang. Upaya demikian mencakupi pengorganisasian kembali sistem jembatan, membangun industri gula ekspor dan membangun berbagai jalan dan jaringan kereta api. Namun akhirnya Jepang dihadapkan pada masalah pemberontakan lebih dari seratus kali dalam lima tahun berkuasa atas Taiwan. Karena Jepang telah menggunakan kekuatan militer guna membatalkan suatu upaya pembentukan Republik yang merdeka di Pulau Taiwan. Selanjutnya pada tahun 1931 dimulai lagi perang antara Jepang dan Cina yang kedua, perlawanan kaum Nasionalis Cina menjadi bertambah panas.

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II mengakibatkan kembalinya Taiwan ke Cina pada tahun 1945, dan seketika itu pula pemerintahan Republik Cina pindah ke Taiwan untuk melanjutkan perlawanan terhadap komunis Cina yang merampas kekuasaan di Daratan Cina. Sejak itu, baik kaum Nasionalis maupun kaum komunis, yang masing-masing menganggap bahwa dirinya merupakan pemerintah Cina yang syah, menyatakan Taiwan sebagai sebuah Propinsi Cina.

---

<sup>1</sup> *Japan in Modern History, Vol 1*, Shobundo Company Ltd, Jepang, 1995, hal.267

Di tahun-tahun berikutnya perkembangan cepat ekonomi, sosial, politik, kemakmuran dan kekuatan perdagangan Taiwan telah mengantarkan kepada kepentingan makin besar seluruh Cina dalam pengalaman Cina. Komunikasi yang terjalin antara kedua belah pihak pada Selat Taiwan bertambah maju dengan hubungan pos telekomunikasi perdagangan tidak langsung dan kontak antar rakyat yang tumbuh pesat dalam waktu beberapa tahun terakhir.

Diakuinya Republik Rakyat Cina di Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1971, mengakhiri status resmi pemerintah Nasionalis sebagai wakil Cina di organisasi dunia tersebut. Selanjutnya pada tahun 1978 Presiden Jimmy Carter tanpa peringatan mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taipei yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 1979. Jimmy Carter juga menyatakan bahwa disana hanya ada satu Cina yaitu Republik Rakyat Cina. Pengumuman ini merupakan perubahan yang mendasar dalam kebijakan Amerika Serikat di Cina.<sup>2</sup> Meskipun pengakuan diplomatik telah berganti, namun hubungan Amerika dan Taiwan masih terus diikat dengan *Taiwan Relation Act (ART)*. TRA tersebut disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada bulan April 1979, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara dua negara untuk mencapai tingkat yang resmi. TRA memberikan kewajiban kepada Amerika Serikat untuk melindungi Taiwan jika proses reunifikasi berlangsung dengan jalan kekerasan.<sup>3</sup>

Pada tahun 1980, pemerintah Taiwan menolak tawaran Beijing untuk berunding mengenai tawaran penyatuan kembali dengan Cina, dengan cara mempercepat demokratisasi di Taiwan. Dalam berbagai peristiwa, hal ini mencerminkan bahwa Taiwan sedang berencana untuk terhindar dari sistem otoritarian dan menuju ke persaingan demokrasi yang berlangsung cepat.

Sementara itu, Presiden Chiang Ching-kuo juga terlibat langsung dalam proses modernisasi politik, dengan menghapuskan *martial law* pada bulan Juli 1987. Presiden Chiang Ching-kuo pada masa pemerintahannya selalu

---

<sup>2</sup> John F. Copper, *Second Edition Taiwan, Nation State or Province?*, Westview Press, 1996, hal.42

<sup>3</sup> Ani W. Soetjipto, *Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, PT. Pustaka Jaya, 1996, hal. 203

memperhatikan kepentingan rakyat Taiwan dan negaranya, meskipun ia menganjurkan kebijakan Satu-Cina. Karena tuntutan rakyat dan pihak oposisi untuk memisahkan dengan Cina terus berlangsung, maka tuntutan tersebut menjadi kenyataan sampai pemerintahan Lee Teng-hui.

## 2.2 Kondisi Geografi, Sosial dan Ekonomi.

Geografi merupakan salah satu unsur nasional power yang selama ini dianggap paling stabil, karena geografi suatu negara tidak mudah tidak mudah berubah dalam waktu yang cukup lama. Faktor geografi secara umum mencakup posisi wilayah negara itu dalam hubungan dengan benua atau perairan, luas wilayah dan topografi.

Ibu Kota Taiwan di Taipe secara geografis terletak di tengah serangkaian pulau di Pasifik Barat yang membentang dari Jepang di Utara menuju Philipina di bagian Barat Daya. Letaknya 160 km (100 mil) lepas pantai darat Cina bagian Tenggara. Taiwan dikelilingi oleh 15 sampai 20 pulau-pulau kecil yang yang dipertimbangkan secara geologi yang bersangkutan-paut. Sebagai pulau terbesar dari ke empatbelas pulau yang membentuk wilayah Taiwan (yang lainnya adalah pulau Matsu dan Quemoy yang kecil serta kesebelas pulau Pescodores yang lebih kecil lagi) panjang Taiwan adalah 385 km dan lebarnya adalah 135 km.

Kepulauan ini terletak diantara 21°45 dan 20°5 Lintang Utara di belahan bumi barat utara Cuba. Di bagian utara Taiwan membagi garis lintang seperti Florida Selatan. Adapun batas-batas wilayah adalah:

Utara	: Laut Cina Timur
Selatan	: Terusan Bashi
Timur	: Lautan Pasifik
Barat	: Selat Taiwan (Formosa)
Barat Daya	: Laut Cina Selatan. <sup>4</sup>

<sup>4</sup> John F. Copper, *Op.cit.*, hal. 3

Luas wilayah Taiwan adalah 36.179 km persegi (14.400 mil persegi) dan hampir sama luasnya dengan negara Belanda, serta agak lebih besara dari Massachusetts dan Connecticut bila digabung. Gambaran Topografi Taiwan yang mendasar adalah pusat deretan pegunungan tinggi yang membentang luas dari sudut Timur menuju ujung Pulau bagian Selatan. Didasarkan atas perbedaaan dalam ketinggian, formasi batu serta pola struktural, maka pulau itu dibagi atas lima kelompok utama. Rangkaian pusat, gunung vulkanis, bukit dikaki gunung, ladang dan daratan pantai serta lembah sungai. Pulau-pulau di Taiwan berada dalam zona yang beriklim sub tropis dibagian Utara yang suhu rata-rata dalam setahun  $20^{\circ}\text{C}$  ( $20^{\circ}\text{F}$ ) dan beriklim tropis dibagian selatan, dengan suhu rata-rata setahun  $5^{\circ}\text{C}$  ( $76^{\circ}\text{C}$ ), dan curah hujan rata-rata dalam setahun adalah 100 inci.

Taiwan memiliki banyak endapan batubara, batu kapur, mineral dan dolomit, sedangkan gas alam di pantai barat. Namun kelangkaan sumber energi membuat Taiwan sangat bergantung pada minyak luar negeri. Sejak tahun 1977, pemerintah telah mengoperasikan, secara komersial, tiga dari empat pusat tenaga nuklirnya.

Tradisi Cina kuno tetap menentukan cara-cara dan nilai hidup sebagian besar penduduk Taiwan. Taiwan berpenduduk 21,8 juta jiwa,<sup>5</sup> lebih dari 95% penduduk Taiwan adalah orang Cina dan sekitar 12% adalah keturunan Cina Hakka yang datang ke Taiwan dari Cina selatan di Awal ke-17. Diperkirakan bahwa 16% penduduk adalah kaum Nasionalis (dan anak-anaknya) yang lari ke Taiwan pada tahun 1949, dan selebihnya adalah keturunan berbagai kelompok Cina yang para leluhurnya bermukim di Taiwan sejak abad ke-18 dan ke-19. Keturunan Aborigin melayu-Polinesia, yang kini sebagian besar hidup di daerah pegunungan, berjumlah sekitar 3-4%.<sup>6</sup>

Di Taiwan berkembang 12 agama yaitu Budha, Taoisme, Khatolik, Protestan, Islam, Hsuan Yuan Chiao Li-isme, Tenrikyo, Bahaism, Tien Dih Chiao, I kuan Tao, dan Tien Te Chiao. Keduabelas agama ini tumbuh dalam toleransi dan budaya Taiwan yang beragam coraknya. Konstitusi Taiwan menjamin kebebasan

<sup>5</sup> Media Indonesia, 20 Maret 2000

<sup>6</sup> Richad A. Williams, *Negara dan Bangsa, Jilid 4*, PT. Widyadara, Jakarta, 1988, hal.50

beragama bagi seluruh rakyat. Sedangkan agama yang secara institusional paling populer dan banyak dianut penduduk Taiwan adalah campuran antara Budha dan Taoisme, yang menyembah roh dan nenek moyang leluhurnya meskipun negara ini mencatat 600.000 warganya beragama Kristen. Sementara bahasa mandarin, merupakan bahasa yang dipergunakan secara resmi. Dialek lokal seperti bahasa Fukien selatan dan Hakka dipergunakan secara luas. Bahasa Inggris dan Jepang sering di dengar dalam percakapan di kota utama Taiwan.

Di bidang ekonomi Taiwan terus berkembang dengan menyandarkan diri pada ekspor dan teknologi tinggi. Perkembangan pesat industri Taiwan yang menakjubkan ini, kini mensejajarkan Taiwan dengan Korea, Singapura, dan Hongkong, sebagai salah satu dari "Empat Harimau" yang mengancam kedudukan Jepang sebagai penghasil utama produk industri Asia ke berbagai negara lain. Hingga tahun 1945, ketika Jepang mengembalikan Taiwan ke Cina, ekonomi pulau Taiwan hanyalah pada pertanian yang menyediakan bahan mentah dan pangan bagi Jepang. Satu-satunya industri yang dibangun Jepang di Taiwan adalah pabrik penggilingan tebu.

Setelah bertahun-tahun memusatkan diri pada pertahanan militer, kaum Nasionalis memperkenalkan rencana ekonomi yang salah satu cirinya yang penting adalah program reformasi tanah yang terbukti sangat berhasil. Kini, meskipun hanya seperempat lahan Taiwan dapat ditanamai tanaman pangan, para petaninya masih menghasilkan lebih banyak padi untuk konsumsi sendiri karena kemajuan di bidang bioteknologi, metode penanaman, dan mekanisasi. Meskipun padi Taiwan di ekspor, sejumlah besar jagung, kedelai, gandum, jewawut dan cantel masih harus di impor. Kini riset pertanian dipusatkan untuk mengembangkan jenis tanaman lain melalui penggunaan bibit unggul, pengendalian penyakit tanaman, dan berbagai metode memanen yang lebih efisien lagi. Pemerintah membantu para petani melalui Serikat Petani yang bertindak sebagai badan pemberi kredit lokal serta koperasi pemasaran. Bersamaan dengan upaya membuat pertanian lebih produktif, rencana ekonomi pertama melibatkan pemerintah ke dalam industri dasar. Saat ini sebagian besar usaha (seperti pabrik gula, garam tembakau, anggur, pelayanan listrik, komunikasi, minyak,

aluminium, dan tembaga) dikelola oleh pemerintah.

Upah buruh yang rendah adalah kunci berhasilnya ekonomi Taiwan di dalam menghasilkan barang-barang yang harganya murah di pasaran dunia. Namun, menjelang akhir tahun 1970-an Taiwan menghadapi saingan ketat di bidang industri tekstil, tekstil, elektronika konsumen baik dari negara yang sedang berkembang maupun dari negara yang telah mengurangi ongkos produksinya karena menggunakan robot dan teknologi baru lainnya. Oleh karena itu, pemerintah lalu meningkatkan industri dengan memanfaatkan teknologi tinggi. Misalnya, kawasan riset industri di Hainchhu, 62 km di Selatan Taipe, yang dibuka pada tahun 1980, dirancang untuk membantu riset dan pengembangan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang elektronika dan informasi, mesin dan berbagai peralatan ketepatan, ilmu pengetahuan bahan teknologi tinggi, ilmu energi, dan rekayasa biologi.

Terdapat juga program bantuan sosial untuk memperbaiki situasi ekonomi. Empat belas proyek kunci yang modern selesai dibangun menjelang tahun 1990, yang meliputi dua jalan bebas hambatan utara-selatan, berbagai sarana pelabuhan yang baru, beberapa proyek pengendalian banjir dan modernisasi sistem telekomunikasi.

### **2.3 Sistem Politik dan Pemerintahan Taiwan**

#### **a. Konstitusi**

Berdasarkan konstitusi yang dinyatakan berlaku pada bulan Juli 1994, negara Taiwan ditetapkan sebagai negara Kesatuan dengan sistem semi konstitusional presidensiil, dimana presiden menunjuk Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen. Meskipun negara Taiwan menyatakan berdiri tahun 1949, akar dari sistem politiknya telah lama ada sebelum negara tersebut berdiri.

Tahap awal mempelajari sistem politik Taiwan adalah konstitusi. Konstitusi Taiwan dibawa dari Cina oleh Chiang Kai-shek setelah Perang Dunia II, mulai menerapkan wujud luar yang demokratis, yang didasarkan pada pemikiran republikanisme Sun Yat-sen, sebagaimana terungkap pada tiga prinsip

filsafatnya bagi rakyat. Ketiga prinsip tersebut yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme.<sup>7</sup> Salah satu pemikiran Sun Yat-sen yang tampak dalam konstitusi adalah visinya agar realisasi demokrasi dilakukan secara perlahan dan bertahap. Dengan demikian, perbedaan konstitusi dengan ajaran Sun Yat-sen tidak akan menyebabkan kontroversi politik yang besar.

Konstitusi menetapkan lima lembaga (*yuan*) pemerintahan pusat, berbeda dengan model Barat yang hanya memiliki tiga cabang pemerintahan. Sebagai tambahan dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, masih terdapat pula lembaga penguji dan lembaga pengontrol. Dua lembaga terakhir tadi mencerminkan perlunya untuk mengadakan mekanisme rekrutmen bagi pegawai pemerintahan dan untuk menjaga kompetensi serta kejujuran dari kalangan birokrasi.

Konstitusi Taiwan diterima oleh Majelis Nasional tahun 1946 dan mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 1947. Dikarenakan terjadi peperangan dengan komunis dan ketegangan etnis yang dibarengi dengan pemberontakan yang pecah di Taiwan pada tahun 1947, konstitusi di Taiwan terpaksa harus di amandemen (pengimplementasiannya ditunda) oleh suatu pasal sementara yang dinyatakan berlaku efektif selama masa berlangsungnya mobilisasi nasional guna menghancurkan pemberontakan komunis pada tahun 1948. Pasal sementara tersebut memberikan kekuasaan darurat untuk mengambil keputusan terhadap segala yang mengancam keamanan nasional atau yang berupa krisis ekonomi.

Dengan dasar kekuasaan ini, lembaga kekuasaan pemerintahan memaksa lembaga legislatif untuk mensahkan darurat militer yang disebut *chieh yen fa*, yang lebih dikenal dengan *martial law*.<sup>8</sup> Martial law memberikan militer dan lembaga intelijen peranan khusus dalam politik, yang memungkinkan mereka untuk melanggengkan otoritarianisme dengan suatu legitimasi konstitusi demokratis.

---

<sup>7</sup> Jason C. Hu, *Tanya Jawab Mengenai Republik Cina Taiwan*, Tientsin Street Taipei, 1992, hal.23

<sup>8</sup> John F. Copper, *Op.cit.*, hal.85

Pada tanggal 1 Mei 1991 Presiden Lee Teng-hui mengumumkan naskah akhir amandemen konstitusional yang disetujui. Diantaranya mencabut pasal sementara dan mengadopsi sepuluh amandemen ke dalam konstitusi. Amandemen tersebut mengembalikan pemerintah konstitusional di Taiwan, dengan mengakhiri lembaga-lembaga pemerintah seperti Nasional Assembly, Legislative Yuan dan Control Yuan atas delegasi-delegasi yang mewakili wilayah yang ada di daratan Cina. Sistem politik Taiwan juga dirubah guna memasukkan pelaksanaan pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di majelis nasional dan lembaga legislatif yang didasarlkan pada representasi proposional dengan kursi yang dihibahkan ke partai-partai politik.

Konstitusi juga direvisi dalam rangka untuk membentuk suatu Dewan Keamanan Nasional dan juga hukum-hukum yang dibutuhkan guna mengantisipasi munculnya permasalahan-permasalahan dari semakin meningkatnya hubungan antara Cina dan Taiwan. Akhirnya, Undang-Undang tersebut berhasil ditetapkan bagi pemilu majelis nasional yang baru pada bulan Desember 1991. Amandemen tersebut menyatakan bahwan majelis nasional kedua dipilih untuk masa jabatan selama empat tahun. Majelis nasional yang baru ini, berhasil dipilih secara demokratis dan lebih banyak mempresentasikan penduduk Taiwan. Saat ini, majelis nasional sudah dianggap sebagai bagian dari lembaga demokratis pemerintah.

Pada bulan Mei 1992, majelis nasional berkumpul sebagai konvensi konstitusional dan menambahkan delapan amandemen lagi pada konstitusi. Pasal-pasal ini ditetapkan bagi adanya perubahan dalam sitem politik Taiwan sebagai berikut: pemilu bagi majelis nasional dilaksanakan setiap empat tahun sekali, mekanisme penunjukkan bagi anggota lembaga kontrol pemerintah, perubahan pada *local government* (termasuk pemilu bagi jabatan gubernur Taiwan dan county magistrates), adanya jaminan dukungan negara mendukung pengembangan ilmu dan teknologi, perlindungan terhadap lingkungan hidup, amademen hak yang adil dan sejajar bagi perempuan, perlindungan terhadap kaum cacat, lumpuh, dan Aborigin.

Pada Juli 1994, Majelis Nasional menghasilkan sepuluh amandemen lagi bagi konstitusi. Salah satunya memberikan perincian pemilu secara langsung bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang mulai dipakai pada tahun 1996. Serta pembatasan kekuasaan dari Perdana Menteri untuk ikut menandatangani pertemuan-pertemuan presidensial dan pembubarannya. Majelis Nasional juga memberikan kekuasaan yang lebih besar melalui pasal-pasal bagi ketua sidang dan rapat tahunan.

#### **b. Majelis Nasional dan Kepresidenan**

Konstitusi (sebelum diamandemen) menyediakan kursi bagi anggota National Assmby, yang terpilih untuk masa jabatan 6 tahun sebagai perwakilan dari county (daerah Tingkat II), Municipal (dewan kota) dan wilayah lainnya yang memiliki status yang setara. Fungsi dari majelis nasional adalah: (1) Untuk memilih presiden dan wakil presiden; (2) Merecall keduanya apabila perlu; (3) Mengamandemen konstitusi; (4) Membuat peraturan untuk melaksanakan hak inisiatif dan referendum; (5) Menyetujui perjanjian yang dibuat oleh presiden.<sup>9</sup>

Sidang istimewa pada majelis nasional bisa dilakukan apabila presiden dan wakil presiden telah terpilih. Sidang istimewa bisa dilaksanakan apabila lembaga legislatif mengajukan suatu amandemen, atau ketika 2/5 dari keseluruhan anggota menginginkannya. Selanjutnya majelis nasional akan dipanggil oleh presiden untuk melaksanakan sesi persidangan 90 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden.

Majelis nasional yang pertama dipilih pada tahun 1947 sebelum kaum Nasionalis melarikan diri ke Taiwan, dengan anggota 2.691 delegasi. Pada awalnya majelis nasional dirancang untuk mewakili seluruh rakyat Cina, sehingga delegasinya datang dari Cina Daratan dan Taiwan, ditambah lagi sejumlah delegasi yang mewakili warga Cina di berbagai tempat.

---

<sup>9</sup> John F. Copper, *Op.cit.*, hal.88

Pemerintahan Nasionalis pindah ke Taiwan pada tahun 1949, sistem ini masih tetap dipakai dan belum ada pemilu bagi majelis nasional hingga tahun 1991. Alasannya, dikarenakan maraknya pemberontakan komunis di Daratan Cina yang membatasi pemilu secara nasional serta memang sengaja dibekukan untuk menghambat demokratisasi.

Oleh karena itu, ketika proses demokratisasi berlangsung cepat pada tahun 1980-an, majelis nasional menghadapi tekanan publik untuk segera berubah. Pada bulan Januari 1989, lembaga legislatif memaksa anggotanya yang sudah tua untuk mundur. Kemudian pada bulan Juni 1990, Dewan Mahkamah Agung meresponnya dengan mengeluarkan keputusan konstitusional yang membatasi mereka harus pensiun sebelum bulan Desember 1991.

Pada bulan Desember 1991, majelis nasional dipilih untuk masa jabatan selama 4 tahun. Majelis nasional yang baru ini berhasil dipilih secara demokratis dan lebih banyak mempresentasikan penduduk Taiwan, sampai dianggap sebagai bagian dari lembaga demokratis pemerintah.

Sementara itu, jabatan presiden di Taiwan memiliki kekuasaan yang besar yang berasal dari konstitusi dan semakin bertambah besar dalam pelaksanaannya. Sebagai kepala negara, presiden secara resmi bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pemerintahan dan hubungan luar negeri. Sebagai seorang presiden baik laki-laki maupun perempuan bisa membuat hukum, memerintahkan angkatan bersenjata, dan nominasi atau menunjuk secara diam-diam semua pejabat penting untuk duduk di kursi lembaga-lembaga pemerintah yang tidak melalui pemilu. Terakhir, presiden juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala perselisihan diantara kelima lembaga pemerintahan dan juga atas kekasannya dalam menangani keadaan darurat.

Presiden juga melaksanakan kekuasaan yang berasal dari posisi kepemimpinannya dalam partai berkuasa, walaupun kewenangan ini masih belum dilembagakan. Kekuasaan ini semakin memperkuat peranan seorang presiden, melebihi yang dimiliki oleh presiden atau perdana menteri yang ada di sistem demokrasi Barat. Adanya kebutuhan bagi suatu kepemimpinan yang kuat dan fakta bahwasanya semua pimpinan eksekutif di Taiwan beberapa tahun ini menjadi

kekuatan utama di belakang keberhasilan ekonomi dan reformasi politik, yang semakin memperkuat jabatan seorang kepresidenan. Tugas-tugas dan peranan presiden dalam mewakili bangsa di kancah masyarakat internasional juga semakin memperkokoh kekuasaan dari jabatan itu, sehingga Taiwan sepertinya selalu diberkati dengan presiden yang kompeten dan dihormati banyak orang.

Lembaga kepresidenan terdiri dari sekretaris jendral, penasihat senior, penasehat kebijaksanaan nasional, penasehat strategi militer dan pengawal presiden. Sekretaris presiden bertugas membantu tugas-tugas umum presiden, mengawasi anggota staf dan mengontrol jadwal presiden yang mana ini serupa dengan tugas kepala staff gedung putih di AS. Sekretaris jendral merupakan seorang figur politik yang berkuasa di Taiwan. Biro yang berada di bawah presiden mempunyai fungsi dalam tiga hal: *Pertama*, biro yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi eksekutif presiden, termasuk dalam pembuatan hukum dan aturan serta dalam menjaga kerahasiaan dokumen negara. *Kedua*, biro yang bertugas mentransmisikan perintah militer dan menjaga hubungan komunikasi dengan militer. *Ketiga*, biro yang menangani tugas-tugas protokoler dan administratif.<sup>10</sup>

Pada tahun 1967, Dewan Kemanan Nasional didirikan dalam lingkup lembaga kepresidenan, untuk mengkoordinasikan strategi nasional. Kemudian tahun 1990, Dewan Unifikasi Taiwan didirikan untuk menyatukan berbagai kelompok dan individu guna membicarakan secara bersama-sama unifikasi Cina.

Berdasarkan konstitusi 1994, dilakukan beberapa perincian yang kemudian diikuti pula oleh dikeluarkannya amandemen konstitusi yang relevan, untuk diadakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu semacam itu pertama kali dijadwalkan pada tahun 1996. Dengan demikian, presiden tidak akan lagi membutuhkan dukungan dari majelis nasional, dan akan semakin meningkatkan kekuasaan politiknya dikarenakan adanya pemisahan kekuasaan secara jelas.

---

<sup>10</sup> John F. Copper, *Op.cit.*, hal.90

Pada saat yang sama, pasal konstitusi juga semakin mengurangi wewenang dari perdana menteri, yang semakin memperjelas bahwa sistem politik Taiwan adalah presidensial.

### c. Pamerintahan Pusat

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemerintahan pusat Taiwan dibentuk meniru sistem pemerintahan Barat dengan tiga cabang pemerintahannya, hanya saja di Taiwan ditambah dua lembaga yang mencerminkan pentingnya dan pengawasan terhadap aktifitas mereka menurut etika yang jelas dan dengan standar moral. Dua cabang pemerintahan yang lain juga mencerminkan organ-organ penting yang pernah ada pada sistem pemerintahan di Cina berabad-abad yang lalu. Lima cabang pemerintahan pusat di Taiwan akan menjamin, setidaknya diatas kertas, akan adanya suatu pembagian kekuasaan *chek and balance* yang lebih besar.

Dari lima lembaga (*yuan*) pemerintahan yang ada, lembaga eksekutif masih tetap menjadi yang terkuat. Cabang dari pemerintahan ini sangat responsif terhadap opini publik dibandingkan dengan lembaga legislatif itu sendiri.

**Lembaga Eksekutif (*Executif Yuan*)** dikepalai oleh perdana menteri yang diajukan oleh presiden. Perdana menteri membawahi wakil perdana menteri, dan delapan menteri yaitu: menteri tata kota, menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri keuangan menteri pendidikan, menteri kehakiman, menteri urusan ekonomi, dan menteri transportasi dan komunikasi, yang kesemuannya atas petunjuk presiden. Para menteri menjalankan tugasnya serupa dengan sejawatnya yang ada pada sistem politik lainnya.

Organ-organ pemerintah yang merupakan pendukung dari lembaga eksekutif adalah dewan urusan Daratan Cina, dewan perencanaan pembangunan dan kebudayaan, dewan energi atom, dewan keilmuwan sosial, dewan pertanian, dewan urusan ketenaga kerjaan, komisi perdagangan bebas, komisi pusat pemilu, komisi evaluasi, komisi pembangunan, komisi kebudayaan, komisi pemuda nasional, komisi pembantu rumah tangga, departemen kesehatan, administrasi

perlindungan alam, administrasi personel pusat, dirjen akuntansi, dirjen anggaran dan statistik serta bank central.

Begitu banyaknya organ-organ pemerintahan yang ada dalam lembaga eksekutif menunjukkan suatu pengawasan ketat terhadap pelaksanaan formulasi kebijakan dan tugas-tugas administratif. Disinilah sebagian besar pengeluaran-pengeluaran dan hukum-hukum direncanakan dan juga sebagian besar keputusan politik diimplementasikan. Dalam menelurkan suatu keputusan, pejabat lembaga eksekutif berkonsultasi pada presiden dan petinggi-petinggi partai yang berkuasa. Administrasi dilakukan oleh para menteri dan agensi-agensi yang ada di dalam lembaga eksekutif. Segala aktifitas dari lembaga eksekutif dipantau oleh lembaga legislatif, yang mempunyai kekuasaan untuk menginterpretasi, menolak atau merubahnya.

**Lembaga Legislatif (*legislative yuan*)** merupakan penghasil hukum tertinggi. Fungsi lembaga legislatif adalah mensahkan dekrit darurat yang disebut *chieh yen fa* (hukum penanggulangan keadaan bahaya), menyetujui anggaran (yang disodorkan oleh lembaga eksekutif), mengajukan amandemen konstitusi, mensahkan penunjukkan perdana menteri, menyetujui, laporan dan ucapan menyangkut kebijakan dari lembaga eksekutif serta mengontrol kinerja lembaga yudikatif, lembaga pengontrol pemerintahan dan kinerja dari lembaga penguji. Lembaga ini juga memiliki kewenangan dalam beberapa hal seperti memberikan bantuan pada organ-organ pemerintahan propinsi dan menyelesaikan perselisihan antara unit pemerintahan nasional dengan unit-unit pemerintahan daerah.

Anggota legislatif menyetujui orang yang ditunjuk presiden untuk menjadi sekretaris jendral yang akan menjalankan kesekretariatan. Lembaga legislatif membuat aturan sendiri menyangkut prosedur dalam berdebat, pengambilan keputusan dan mensahkan hukum serta menangani penyimpangan dan pelanggaran standar perilaku etis oleh anggota, walaupun tanggung jawab itu juga dimiliki oleh lembaga pengontrol.

Lembaga legislatif memiliki 12 komisi: komisi urusan dalam negeri, komisi luar negeri, komisi pertahanan nasional, komisi ekonomi, komisi

anggaran, komisi pendidikan, komisi komunikasi, komisi urusan perbatasan, komisi urusan dengan daratan Cina, komisi urusan judisial, komisi hukum organis dan statuta. Juga ditambah lagi 5 komisi khusus yaitu komisi kredensial, komisi disiplin, komisi peraturan, komisi akuntansi dan komisi publikasi.

Lembaga legislatif mengadakan sidang dua kali dalam setahun, yaitu pertama, dari Februari hingga akhir Mei; dan kedua, dari September hingga akhir tahun. Lembaga legislatif setiap saat bisa mengadakan sidang luar biasa atas permintaan presiden. Kondisi quorum tercapai apabila memenuhi 1/7 dari keseluruhan anggota lembaga tersebut. Akan tetapi masih belum mencukupi untuk merekomendasikan suatu amandemen konstitusi, yang mana harus memenuhi 3/4 dari keseluruhan anggota.

Seperti halnya majelis nasional, lembaga legislatif ketika pertama kali dipilih, mewakili semua Cina. Akan tetapi semuanya berubah pada akhir tahun 1969 banyak anggota parlemen yang didominasi oleh kelompok pemuda yang kebanyakan berasal dari Taiwan. Ini merupakan permasalahan yang telah terjadi sebelum anggota parlemen 'tua' mengundurkan diri dan kemudian pemilu murni tanpa adanya anggota parlemen dari daratan Cina diadakan pada bulan Desember 1992. Berdasarkan konstitusi, masa jabatan lembaga legislatif selama 3 tahun.

Secara tradisional lembaga legislatif tidak sepenting lembaga eksekutif, dalam hal kewenangan otoritas pengambilan keputusan. Pengaruh kekuasaannya semakin bertambah besar dan memberikan dampak positif kepada publik Taiwan. Lembaga legislatif lebih dari sekedar lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan publik dan mewakili kekuatan pembaharu untuk demokrasi.

*Lembaga Judikatif (Judicial Yuan)* hampir menyerupai lembaga hukum di negara lain, walaupun ada beberapa perbedaan struktural. Lembaga ini tersusun oleh presiden, wakil presiden dan 15 orang hakim agung yang bertugas selama 6 tahun. Kesemuanya ditunjuk presiden dan atas persetujuan majelis nasional. Lembaga Judikatif diorganisasikan kedalam Dewan Kehakiman Agung, kedalam tiga tingkat di atas pengadilan biasa (Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, dan pengadilan distrik), pengadilan administratif, dan komite penegak disiplin pejabat

publik. Dewan Kehakiman Agung bertemu setiap dua minggu sekali dan diperkanankan untuk mengadakan sidang luar biasa.

Tugas Dewan Kehakiman Agung adalah menginterpretasikan konstitusi, yang menyerupai proses pengadilan di sistem Barat, menegakkan hukum, statuta-statuta, dan aturan-aturan pemerintahan.

Suatu proses penginterpretasi konstitusi membutuhkan kehadiran 3/4 dari keseluruhan anggota untuk menacapai quorum. Pemerintah maupun individu keduanya bisa dipanggil untuk menginterpretasikan konstitusi. Akan tetapi, badan-badan pemerintahan harus dilibatkan didalam pelaksanaan tugas mereka, apakah itu dalam hal pertentangan otoritas, anggapan hukum, peraturan atau dekrit-dekrit tertentu yang bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dalam tiga tingkatan pengadilan. Mahkamah Agung bertugas menyidangkan baik kasus pidana maupun perdata, mosi yang tidak sepakat dengan pengadilan tingi, dan kasus-kasus dengan permintaan banding yang diluar kebiasaan. Mahkamah Agung dibagi kedalam beberapa 'senat' perdata dan pidana (berjumlah lima sampai tujuh orang). Setiap senat dipimpin oleh seorang hakim ketua dan empat anggotanya. Pembagian ini bertujuan agar Mahkamah Agung dapat menampung lebih banyak kasus dan menghindari penundaan kasus. Dikarenakan Mahkamah Agung hanya memutuskan permasalahan-permasalahan secara hukum dan tidak secara fakta, maka sebagian besar berjalan secara dokumenter.

Pengadilan Tinggi menangani kasus banding dari pengadilan distrik, kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan pemberontakan dan pengkhianatan, kasus-kasus yang melibatkan negara lain, dan tuntutan hukum atas pemilu. Pengadilan tinggi memiliki seksi-seksi perdata, kriminal dan seksi lalu lintas serta dibagi kedalam senat yang terdiri dari hakim ketua dan dua anggotanya.

Pengadilan Distrik menangani kasus perdata dan kriminal yang berupa kenakalan remaja, pertengkaran keluarga, pelanggaran lalu lintas dan kasus-kasus keuangan serta kasus-kasus yang tidak begitu berat lainnya.

Pengadilan Administratif menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara oleh suatu tindakan administratif dari pemerintah dan juga tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah.

Komite Penegak Disiplin Pejabat Publik yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan dari lembaga kontrol pemerintah menyangkut *impeachment*, pembubaran dan sejenisnya.

**Lembaga Kontrol (*Control Yuan*)** sebenarnya merupakan cabang khusus dari pemerintahan yang merujuk pada badan seleksi yang ada pada masa kekaisaran Cina. Lembaga ini terdiri dari 29 anggota yang ditunjuk oleh presiden yang bertugas mengawasi kinerja para pejabat. Badan pemerintahan ini memiliki kekuasaan untuk memecat, menyeleksi dan mengaudit. Badan ini bertugas mengawasi kinerja menteri audit dan mendirikan berbagai *working comitees*. Badan ini wajib menyetujui orang yang ditunjuk presiden (juga yang melalui voting rahasia dalam sesi sidang umum) dan memiliki kekuasaan untuk menyelidiki dan mendengarkan keluhan publik. Badan ini bisa memecat pejabat nasional maupun pemerintahan lokal.

**Lembaga Penguji (*Examination Yuan*)** bertanggung jawab melakukan apa yang di sistem Barat disebut sebagai sistem pengujian calon pegawai negeri. Dalam sistem politik tradisional Cina, fungsi pengujian sangatlah penting sehingga diciptakan cabang pemerintahan yang khusus untuk melakukan dan mengawasinya. Pada saat ini lembaga pengujian ini mengatur empat macam pengujian untuk merekrut dan menyeleksi pelamar calon pegawai negeri. Lembaga penguji terdiri dari dewan, sebuah sekretariat, dan dua kementerian penguji dan kementerian kepegawaian. Anggota dari lembaga penguji ini ditunjuk oleh presiden.

#### d. Pemerintahan daerah

Sistem politik Taiwan pada dasarnya bersifat kesatuan (*unitar*), walaupun dalam beberapa hal memiliki ciri-ciri federal. Dasar dari sistem tersebut berarti pemerintahan lokal dan intitusi politik berada dibawah atau lebih terbatas dibandingkan dengan pemerintahan nasional atau pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat terbukti selalu merespon lebih cepat dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi dan perubahan politik yang cepat.

Pemerintahan lokal secara konstitusional diberi wewenang untuk memerintah sendiri yang dapat membuat pemerintahan propinsi dan pemerintahan daerah tingkat II sebagai tambahan dari kota-kota metropolis, kota, kota kecil dan pemerintahan desa. Walaupun unit-unit dari pemerintahan lokal harus bertanggung jawab pada pejabat-pejabat pemerintahan yang lebih tinggi, akan tetapi mereka memiliki beberapa kekuasaan dan tanggung jawab yang tidak ada hubungannya dengan unit pemerintahan lainnya serta tidak tergantung pada otoritas yang lebih tinggi.

Pemerintahan lokal yang tertinggi memiliki majelis propinsi yang dipilih melalui proses pemilu, yang tersusun oleh anggota-anggota dengan masa jabatan empat tahun. Badan pembuatan kebijakan paling utama di pemerintahan propinsi adalah Dewan Pemerintahan Propinsi, yang terdiri dari 23 dari 79 anggota ajelis Propinsi yang berfungsi seperti kabinet. Walaupun kekuasaan yang dimiliki oleh majelis propinsi tidak begitu besar. Di masa lalu badan ini lebih mencerminkan opini publik yang lebih jelas dibandingkan badan-badan terpilih yang ada di pemerintahan nasional, dikarenakan majelis propinsi dipilih setiap empat tahun sekali dan hanya mewakili lingkup Taiwan.

Pemerintahan Taiwan dipandang berhasil dalam menjalankan reformasi politik dan demokratisasi yang dijalankan, dikarenakan bersifat "*bottom-up*". Artinya bahwa demokrasi mula-mula terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan

lokal. Pejabat pemerintahan lokal percaya dapat membangun fondasi bagi demokrasi secara lokal.<sup>11</sup>

Pemerintahan propinsi didirikan pada bulan Mei 1947, setelah adanya kerusuhan massa dan aksi kekerasan yang ditujukan pada pemerintahan pusat. Sistem ini menggantikan kantor gubernur jenderal yang selama ini tidak disukai oleh masyarakat daerah, namun tidak memenuhi yang diharapkan. Alasannya, propinsi Taiwan secara mutlak akan berada di bawah kekuasaan pemerintahan pusat, termasuk area yang mencakup tanah dan penduduk di Taiwan. Akibatnya, banyak tugas dan fungsi dari pemerintahan propinsi yang tumpang tindih dengan tugas dan fungsi dari pemerintahan pusat. Dibawah pemerintahan propinsi terdapat 16 pemerintahan Tingkat II, yang mengemban bagian terbesar dari pemerintahan lokal. Pemerintahan Tingkat II dibagi menjadi kategori perkotaan dan pedesaan. Mereka beroperasi dengan otonomi dan otoritas yang besar, walaupun sistem politik Taiwan merupakan negara kesatuan. Mereka juga mengkoordinasikan kebijakan dengan pemerintahan nasional dan betugas selayaknya lahan pelatihan penting sebagai batu loncatan ke posisi pemerintahan nasional. Bahkan pemerintahan propinsi tetap independen dari pemerintahan pusat.

Dalam pemilihan umum tingkat lokal cukup demokratis. Pemilih yang berpartisipasi selalu menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi dari pada pemerintahan pusat. Pemilih lebih akrab dengan permasalahan lokal dikarenakan populasinya lebih merata. Para pemilih juga beranggapan bahwa suara mereka lebih penting untuk memutuskan permasalahan lokal dari pada pemerintahan pusat. Dan pada umumnya pemilih lokal, lebih mengetahui calon-calon yang akan menduduki jabatan di pemerintahan pusat.

#### 2.4 Politik Luar Negeri Taiwan

Politik luar negeri sebagai suatu kebijaksanaan negara dimaksudkan untuk memelihara dan mencapai untuk kepentingan nasional. Dengan kata lain politik luar negeri merupakan ekspresi (pencerminan) dari kepentingan nasional suatu

---

<sup>11</sup> John F. Copper, *Op.cit.*, hal. 97

negara. Oleh karena itu politik luar negeri memainkan peranan penting di dalam lingkungan internasional.

Politik luar negeri Taiwan pada level regional adalah bertujuan untuk memperoleh pengakuan secara diplomatik bagi kedaulatan Taiwan, sehingga tidak terisolasi dari negara-negara di dunia, khususnya Cina. Dengan kata lain, strategi Taiwan pada level regional adalah bertujuan untuk memperoleh dukungan dari publik secara keseluruhan sehingga akan berpengaruh besar dalam penentuan kebijakan luar negeri.

Penentuan kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri. Ketika Nasionalis Cina melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949, politik luar negeri Taiwan secara umum adalah ingin mengalahkan kembali komunisme dan menyatukan kembali Cina. Pada tahun 1950-an, Taiwan berada di bawah ancaman Cina dan menjadi fokus dari persaingan global. Peran sentralnya di kancah politik internasional, menarik perhatian dari publik Taiwan ke masalah-masalah yang menyangkut kebijakan politik luar negeri. Taiwan mau tidak mau harus menunjukkan kepada dunia bahwasannya ia memiliki dukungan publik setidaknya sebagai pendukung utama dari kebijakan luar negerinya.

Dalam mengembangkan hubungan luar negeri, Taiwan menekankan secara mendalam pokok-pokok berikut ini:

- a) Taiwan tidak mengerahkan upaya berat dalam mengkonsolidasikan keramahan negara sahabat yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Taipei. Jalinan persahabatan dengan negara ini telah diperkuat melalui pembentukan program kerja sama bilateral di bidang budaya, ekonomi, teknologi, pertanian, hotikultura, dan perikanan.
- b) Taiwan berupaya untuk meningkatkan hubungan luas dengan negara lain, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan saling tukar kebudayaan serta kerja sama yang erat.
- c) Taiwan sedang menjalani segala kemungkinan untuk mendirikan hubungan diplomatik secara formal dengan negara baru merdeka.

- d) Taiwan sedang mengadakan upaya yang disetujui bersama untuk bergabung atau tergabung kembali dengan organisasi internasional antar pemerintah atau non pemerintah.<sup>12</sup>

Pada permulaan tahun 1950-an, situasi politik dalam negeri dipengaruhi oleh alternatif-alternatif bagi penentuan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan untuk kembali ke Cina tidak pernah mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat Taiwan. Mereka merasa bahwa pemerintah seharusnya lebih memperhatikan permasalahan dalam negeri, khususnya pembangunan ekonomi yang kuat untuk mengalahkan komunisme. Disamping itu menciptakan keterkaitan dengan negara dunia III dan memainkan peranan organisasi internasional sangatlah penting untuk mempertahankan kredibilitas rakyat Taiwan. Bahkan publik semakin mendukung untuk menciptakan hubungan yang lebih baik lagi dengan negara-negara Barat yang telah maju dikarenakan mereka menyediakan investasi modal dan pasar bagi pertumbuhan ekonomi Taiwan yang berorientasi ekspor.

Ketika perekonomian Taiwan mengalami kemajuan yang pesat (1960-an), para pemimpin Taiwan menyadari bahwa hubungan perdagangan dan ekonomi masih belum bisa diartikan sebagai suatu hubungan politik, apalagi untuk diartikan sebagai komitmen dan dukungan bagi kedaulatan Taiwan. Sehingga para pembuat kebijakan membutuhkan dukungan publik bagi pelaksanaan diplomasi ekonomi.

Pada tahun 1970-an sampai dengan 1990-an, masukan publik bagi proses penentuan kebijakan luar negeri Taiwan semakin besar. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu dikeluarkannya Taipei dari keanggotaan PBB pada tahun 1971 yang telah memancing kekhawatiran publik bahwasannya politik luar negeri Taiwan dianggap gagal dan menyebabkan delegitimasi serta diisolasi oleh Cina. Faktor lainnya yaitu menyusul peristiwa pembantaian mahasiswa demonstran di lapangan Tiananmen tahun 1989. Akibatnya citra Taiwan terimbas merosotnya citra Cina di mata internasional.

---

<sup>12</sup> Jason C. Hu, *Op.cit.*, hal. 43

Di dalam negeri kondisi seperti diatas memberi kemenangan tersendiri bagi oposisi dan publik secara keseluruhan, untuk mengangkat permasalahan HAM di Beijing dan mengkritik pemikiran Satu-Cina. Sementara di luar negeri media Barat menganggap ini sebagai kemenangan demokrasi dan Taiwan semakin dipandang sebagai negara yang layak mendapat dukungan untuk menentukan nasib sendiri.

Secara konsisten Taiwan lebih menghendaki lepas dari Cina dan menolak untuk bersatu kembali dengan Cina. Konsekuensinya Taiwan harus memilih untuk tetap berdaulat dan menginginkan dijadikan sebagai suatu kebijakan. Pihak oposisi dan pemerintah Taiwan sebenarnya telah ada keselarasan dalam penentuan kebijakan luar negeri yang menyangkut berbagai permasalahan, terutama ketika berurusan dengan Beijing. Mereka sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri pemerintah untuk menentukan masa depan Taiwan.

Saat ini, kebijakan Taiwan menyangkut hubungannya dengan Beijing secara resmi masih kebijakan Satu-Cina. Akan tetapi, pihak oposisi seperti Democratic Progressive Party (DPP) memiliki pandangan sendiri. DPP yang menempatkan isu kemerdekaan sebagai program kampanye politik pada akhir tahun 1991, menginginkan pemisahan tanpa syarat. Di lain pihak, sebagai orang Taiwan sendiri masih menghendaki kebijakan *status quo* atau posisi *wait and see* yang berlaku sampai menjelang pemilu 2000.

Kebijakan Taiwan atas Cina dalam perkembangannya meliputi beberapa unsur yang harus diperhatikan. Pada tahun 1991, Taipe mengumumkan untuk mengakhiri peperangan dengan Cina dan mengumumkan suatu kebijakan untuk tidak menggunakan kekuatan senjata dalam menyelesaikan persoalan Taiwan. Selanjutnya, kebijakan Taiwan atas Cina dinyatakan melalui Dewan Unifikasi Nasional, yang menyatakan bahwa unifikasi harus dicapai dalam tiga tahap: *Pertama*, mengadakan pertukaran dan imbal balik. *Kedua*, membangun kepercayaan dan keyakinan. *Ketiga*, mempromosikan konsultasi dan unifikasi.<sup>13</sup> Meskipun terdapat opini diantara tokoh pimpinan yang ada di pemerintah dan

---

<sup>13</sup> John F. Copper, *Op.cit.*, hal. 166

pihak oposisi, Kebijakan Taiwan intinya merupakan suatu posisi *wait and see* atau kebijakan mempertahankan *status quo*.

Inilah salah satu contoh aplikasi politik luar negeri Taiwan pada level regional. Hal semacam ini pernah terjadi negosiasi yang tidak terjadwal antara perwakilan dari Taipe dan Beijing di Singapura. Pertemuan tersebut dinamakan pembicaraan *Koo-Wang* yang mencapai beberapa kesepakatan untuk melagalisasi dokumen dan memandirikan saluran-saluran komunikasi resmi serta merencanakan pertemuan lagi. Walaupun pertemuan ini tidak memiliki substansi yang besar pertemuan tersebut menandai suatu terobosan yang signifikan dalam hubungan tersebut dan sama-sama menjajikan negoisasi yang lebih signifikan di masa yang datang.

Sementara pada level internasional, Taiwan selalu berusaha mencari bentuk ikatan yang kuat dan langsung dengan Amerika Serikat. Taiwan berusaha untuk mengambil hati dan mempertahankan hubungannya dengan Washington. Untuk mencapai tujuan itu, Taiwan tidak hanya bertumpu pada komitmen tradisional Washington dan lobi-lobi domestik, tetapi harus mengupayakan suatu peran yang melekat pada strategi internasional Amerika Serikat.

Begitu banyak yang dilakukan Taiwan untuk mendemokratisasikan sistem politiknya menurut cara yang dikehendaki oleh Washington. Setelah didemokratisasikan, Taiwan juga ingin menunjukkan pada Amerika Serikat bahwa mereka memperhatikan Hak Asasi Manusia. Atas permintaan Amerika Serikat, Taipe membatalkan niatannya untuk membangun kekuatan nuklir dan berjanji tidak akan menggunakan atau memiliki nuklir. Sebagai akibatnya dari semua negara yang menjadi prioritas hubungan luar negeri, Amerika Serikat merupakan yang terpenting, fakta ini sudah semenjak dahulu ada hingga sekarang.

Amerika Serikat merupakan sekutu Cina Nasionalis di masa Perang Dunia II dan mensuplainya dengan senjata serta bantuan ekonomi sebagai balas jasa terhadap kaum Nasionalis, yang ikut membantu memerangi Jepang. Dukungan moral juga diberikan kepada kaum Nasionalis. Dalam tahun-tahun berikutnya Taiwan menjadi mitra dagang Amerika Serikat dan Amerika Serikat menjadi tempat investasi modal. Taiwan menjaga hubungan Amerika Serikat dikenal

dengan lobi Cina terhadap Amerika Serikat. Lobi Cina tersebut semakin mempererat hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat. Bahkan lobi ini berhasil menunda rencana Amerika Serikat untuk membina hubungan dengan Beijing.

Lobi Cina juga berhasil mempengaruhi Washington, namun usaha ini mulai berkurang pada akhir tahun 1950-an. Dan pada tahun 1960-an semakin jelas terlihat oleh para pembuat kebijakan luar negeri di Taipei, bahwa hubungan Amerika Serikat tidak dapat dipertahankan selamanya dikarenakan oleh keinginan Washington untuk menjalin hubungan dengan Cina. Hubungan Washington dengan Beijing semakin membaik dalam konteks semakin meningkatnya multipolaritas dunia dan semakin dikenalnya apa yang disebut 'Kartu Cina' yaitu strategi Amerika Serikat menggunakan hubungan dekat dengan Cina untuk menahan Uni Soviet. Oleh karenanya Taiwan mencoba cara lain untuk mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat, walaupun seringkali gagal. Usaha memperbaiki hubungan Amerika Serikat, diawali dengan pengiriman Duta Besar istimewa ke Washington, berusaha mengambil hati wisatawan Amerika Serikat yang mengunjungi Taiwan dan mempererat hubungan dengan kekuatan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Taiwan.

Taiwan berhasil mengatasi trauma atas keretakan hubungan dengan Amerika Serikat, yang ditandai dengan disyahkannya *Taiwan Relations Act (TRA)* oleh Konggres Amerika Serikat pada bulan April 1979. Pada intinya perjanjian tersebut memantapkan kembali status Taiwan dalam hukum Amerika Serikat sebagai negara yang berdaulat dan memutuskan ditetapkannya jaminan keamanan pada Taiwan.<sup>14</sup> TRA juga menormalisasi hubungan ekonomi antara Taiwan dengan Amerika Serikat yang dapat memulihkan investor asing pada Taiwan dan sekaligus sebagai sinyal pada kalangan bisnis Amerika Serikat bahwa hubungan dengan Taiwan masih tetap normal. Keberadaan TRA tersebut sudah mencukupi untuk menunjukkan Amerika Serikat sebagai pelindung dari Taiwan dan mengembalikan hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan dalam kondisi yang stabil.

---

<sup>14</sup> John F. Copper, *Op.cit.*, hal. 162

Strategi-strategi diatas menjadikan Taiwan seakan-akan mempunyai sumber yang tidak terbatas. Perdagangan dan investasi di Taiwan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1987, Taiwan mulai mengekspor produknya ke Amerika Serikat hingga mencapai surplus 16 trilyun dollar. Hal itu menempatkan Taiwan di peringkat ke dua setelah Jepang yang berakibat Amerika Serikat mengalami defisit. Berdasarkan hasil tersebut, Kongres Amerika Serikat dan serikat-serikat dagang di Amerika Serikat mulai mengkritisi Taiwan yang dipersalahkan atas pengangguran yang terjadi di Amerika Serikat yang menghambat perindustrian di Amerika Serikat.

Taiwan menanggapi dengan cepat, yaitu dengan melalui misi-misi pembelian produk dari Amerika Serikat, tarif yang direndahkan dan revaluasi mata uang. Tindakan tersebut mampu menolong pasar Amerika Serikat yang menampung hampir 50% dari ekspor Taiwan pada tahun 1985, menurun sebanyak 35% pada tahun 1988. Amerika Serikat merupakan pangsa pasar yang terpenting bagi Taiwan, walaupun semakin menurun yang dikarenakan disersifikasi perdagangan yang harus diterapkannya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

## III

## SISTEM PEMILU DAN SISTEM KEPARTAIAN TAIWAN

## 3.1 Sistem Pemilu dan Organisasi Pemilu Taiwan

Sejarah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) sudah lama ada di Taiwan. Bahkan selama darurat militer diberlakukan di Taiwan, pemilu untuk hakim wilayah, walikota kotamadya, majelis propinsi, anggota dewan kota, serta lembaga legislatif dan majelis nasional lainnya, tetap diselenggarakan secara reguler, sejak tahun 1969. Dengan pengecualian tahun 1978, ketika Amerika Serikat mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2000 ini berada di bawah pengawasan komisi pemilihan umum pusat (*central election commission*). Komisi Pemilu Pusat (CEC) didirikan pada tahun 1980, dibawah pengawasan lembaga eksekutif, yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemilu nasional dan pemilu lokal. Kewenangan CEC juga dalam penyaringan kualifikasi calon, menarik pejabat kembali yang terpilih, dan menyusun atau mengamendemen Undang-Undang yang menyangkut dengan pemilu.<sup>1</sup>

Komisi Pemilu Pusat (CEC) dipimpin oleh seorang ketua dan terdiri dari 11 sampai 19 komisaris yang dicalonkan oleh perdana menteri dan disetujui oleh presiden, dengan masa jabatan selama tiga tahun. Untuk menjamin kenetralan Komisi Pemilu Pusat, pejabat-pejabat pemilu dan recall, memutuskan bahwa komisaris dari beberapa partai politik tunggal tidak boleh mengangkat lebih dari dua sampai lima komisaris.<sup>2</sup>

## 3.1.1. Sistem Pemilihan

Mekanisme pemilihan di Taiwan bervariasi, tergantung pada jenis jabatan yang terpilih. Misalnya untuk jabatan eksekutif seperti presiden dan wakil presiden,

<sup>1</sup> Jason C. Hu, *The Republic of China*, Government Information Office, Taipei, 1995, hal. 30-31

<sup>2</sup> *Central Election Commission* dalam <http://www.gio.gov.tw/info/book2000/0106htm>

walikota kotamadya khusus, hakim wilayah, walikota propinsi, hakim pedesaan dan perkotaan serta walokota daerah. Setiap pemilih hanya memberikan satu suara pada *single-member distric*.

Untuk pemilihan anggota majelis nasional, lembaga legislatif, kotamadya khusus, kabupaten atau daerah dewan kota, digunakan sistem *proportional representative (PR)*. Dalam sistem ini, rakyat akan memilih partai politik yang menjadi kontestan dan partai yang menang berhak mendapat jumlah kursi terbanyak. Sistem *proportional representative* menyediakan sejumlah kursi untuk para pemilih nasional dan masyarakat Cina perantauan. Sebelum pemilihan, setiap partai politik diharuskan menyerahkan dua daftar nama-nama calon, masing-masing untuk para pemilih nasional dan masyarakat Cina perantauan. Akan tetapi, masyarakat Taiwan tidak memilih secara langsung calon-calon yang terdaftar pada daftar partai. Melainkan mereka memilih berdasarkan daerah masing-masing dan hasil suara yang diperoleh para calon dikumpulkan secara nasional berdasarkan keanggotaan partai. Kursi-kursi untuk para pemilih nasional dan masyarakat Cina perantaun, kemudian dibagikan secara proposional diantara partai-partai yang ada dan sedikitnya memperoleh 5% dari jumlah perolehan suara yang sah seluruh negara. Pada saat ini, 22% kursi pada lembaga legislatif dan 30% kursi di majelis nasional yang diisi dengan cara seperti diatas.<sup>3</sup>

Penggunaan sistem *proportional representative (PR)*, diselenggarakan sejak majelis nasional mengamandemen perubahan mekanisme politik Taiwan, yang menetapkan bahwa sistem PR digunakan dalam pemilihan majelis nasional dan lembaga legislatif. Sebelumnya, pemilihan majelis nasional dan lembaga legislatif menggunakan sistem *The Single Nontrasferable Vote (SNTV)*. Dalam sistem ini, beberapa orang perwakilan dipilih dari *a single constituency*, yang pada dasarnya dibatasi oleh batas administratif yang ada. Dalam memberikan suaranya, setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan calon yang memperoleh suara terbanyak akan terpilih.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Electoral System* dalam <http://www.gio.gov.tw/info/book2000/0106htm>

<sup>4</sup> *Ibid.*

Pada umumnya sistem SNTV dan PR menguntungkan bagi partai kecil, selama mereka memenangkan suara dalam jumlah tertentu mampu untuk memperoleh setidaknya beberapa kursi. Akan tetapi, dalam pemilihan jabatan administrasi keadaannya cukup berbeda. Biasanya hanya dua partai besar yang muncul sebagai pemenang dalam memperebutkan kursi kekuasaan. Dalam hal ini partai-partai kecil cukup dirugikan.

Penggunaan sistem SNTV dalam pemilihan anggota lembaga legislatif, mendapat kritikan dari banyak pihak karena mengakibatkan korupsi dan penggolongan politik Taiwan. Misalnya, partai Kuomintang yang terlibat baik dalam pemilu majelis nasional dan lembaga legislatif. Hal ini menimbulkan perbincangan mengenai perubahan sistem ini. Sebenarnya, pokok pembicaraan ini telah diikutsertakan dalam agenda perundingan mengenai perubahan konstitusi belum lama ini. Akan tetapi, tidak ada satupun perubahan yang dibuat karena karena partai politik tidak menyetujui mengenai sistem alternatif.

Sementara itu, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung ditetapkan oleh majelis nasional dalam amandemen konstitusi pada bulan Juli 1994, yang mulai berlaku pada pemilu pertama tahun 1996. Amandemen tersebut masih berlaku pada pemilihan presiden kedua tahun 2000.<sup>5</sup> Selanjutnya, ditegaskan lagi pada bulan Juli 1995, lembaga legislatif mensahkan *precident and vice precident election and recall law*. Presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh beberapa partai politik yang memperoleh keuntungan sekurang-kurangnya 5% suara di tingkat provinsi atau dengan mengumpulkan tanda tangan sekurang-kurangnya 1,5% suara yang memenuhi syarat.<sup>6</sup>

Dalam amandemen juga mengharuskan Komisi Pemilu Pusat menetapkan waktu tidak kurang dari 30 menit di televisi nasional untuk setiap calon. Selanjutnya, ketika dua atau lebih calon menyetujui untuk berpartisipasi, komisi akan menetapkan dana untuk perdebatan presiden di televisi secara nasional.

---

<sup>5</sup> John F. Copper, *Second Edition Taiwan, Nation State or Province?*, Wetsview Press, 1996, hal.88

<sup>6</sup> Election dalam <http://www.gio.goc.tw/info/book2000/0106/htm>

### 3.1.2 Recalls and Referendums

Berdasarkan Undang-Undang, warga negara Taiwan memiliki hak pemilihan *recall, initiative and referendums*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hanya hak inisiatif yang sering digunakan. Sebenarnya, Undang-Undang untuk mengatur penggunaan hak inisiatif dan referendum belum disahkan. Meskipun demikian, tidak jarang usaha untuk merecall para pejabat perwakilan terpilih. Bahkan referendum pun telah dilaksanakan pada daerah-daerah tertentu, walaupun kurang adanya Undang-Undang yang mendukung. Ternyata, tanpa suatu kerangka kerja resmi yang jelas, hasil dari referendum tersebut merupakan laporan yang baik.

Pada bulan November 1994 dan Januari 1994, di Taipei dan daerah Selatan Taipei terjadi usaha *recall* secara berturut-turut. Sasaran *recall* dalam dua peristiwa tersebut adalah anggota KMT di lembaga legislatif yang dituduh telah mengingkari janji dan menyetujui pembangunan pabrik tenaga nuklir melalui pemungutan suara. Angka kehadiran dalam kedua peristiwa sangat rendah. Di kabupaten Taipei, hanya 21,2% pemilih yang memenuhi syarat dari yang hadir untuk memilih dan di daerah Selatan Taipei angka kehadiran sekitar 8,6%.

Tiga usaha referendum belum lama ini juga berkisar tentang pembangunan pabrik tenaga nuklir. Referendum pertama, terjadi pada bulan Mei 1994 di Kotapraja Kung Liao kabupaten Taipei, mengusulkan mengenai tempat pabrik baru. Lebih dari 58% pemilih Kung Liao mengadakan pemungutan suara dan yang mengejutkan 96,1% menyatakan tidak setuju terhadap rencana pembangunan pabrik tenaga nuklir di kota mereka. Referendum kedua, tentang pembangunan tenaga nuklir yang dilaksanakan bulan November 1994, oleh pemerintah kabupaten Taipei, dimana 87,1% menyatakan tidak setuju terhadap pembangunan pabrik tersebut dan hanya 18,5% yang setuju. Referendum ini berpedoman pada persoalan yang dibawa oleh pemerintah Taipei, pada bulan Mei 1996. Sebanyak 58% pemilih memberikan suaranya, hasilnya 51,5% menentang pembangunan pabrik tenaga nuklir.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Recalls and Referendums* dalam <http://www.gio.goc.tw/info/book2000/0106/htm>

Selanjutnya, referendum ketiga dilaksanakan pada bulan Maret 1995 oleh pemerintah kotapraja Hsichih di kabupaten Taipe untuk memutuskan mengenai usulan pekerja umum. Angka kehadirannya hanya 17%, tetapi 95% pemungutan suara menyatakan setuju terhadap usulan pemerintah lokal.<sup>8</sup>

### 3.2 Sistem Kepartaian Di Taiwan

Pemerintah dan rakyat Taiwan untuk pertama kalinya menciptakan demokrasi multipartai yang langgeng. Banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh dunia perpolitikan di Taiwan yang disebabkan oleh berkembangnya sistem multipartai. Pemilihan umum bagi kepala daerah Tingkat II, Walikota dan juga bagi pemilihan anggota Dewan di Tingkat II sampai pada tingkat pusat, secara teratur dilakukan semenjak tahun 1950-an. Pada waktu itu, para kandidat yang ikut pemilu didominasi oleh Partai Kuomintang. Sejumlah proses reformasi politik secara besar-besaran dilaksanakan sejak tahun 1987 untuk mengubah sistem pemilihan Taiwan agar lebih representatif dari yang sebelumnya.

Sejak terjadi proses reformasi politik, partai politik yang tadinya bersifat tidak syah di bawah darurat militer, berubah melegalisasi partai politik untuk ikut dalam proses pemilihan umum. Reformasi konstitusional telah mengakibatkan transformasi struktur politik di Taiwan berubah, termasuk pemilihan parlementer komprehensif pertama pada tahun 1992 dan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 1996.

Dalam proses reformasi politik yang berakhir pada bulan Juli 1994, majelis nasional kedua membuat beberapa perubahan penting yang relevan bagi perpolitikan elektoral. *Pertama*, masa jabatan presiden dan majelis nasional diperpendek dari enam tahun menjadi empat tahun. *Kedua*, ditetapkan pula untuk memilih presiden dan wakil presiden harus dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat. *Ketiga*, anggota dari lembaga kontrol, yang biasanya dipilih secara tidak langsung oleh majelis propinsi dan dewan kota di daerah perkotaan khusus, akan melalui tahap pencalonan dan penunjukan oleh presiden, serta harus

---

<sup>8</sup> *Recalls and Referendums* dalam <http://www.gio.gov.tw/info/book2000/0106/htm>

disetujui oleh majelis nasional.<sup>9</sup> Pada bulan Agustus 1999 sebanyak 88 partai politik telah mendaftar ke Departemen Dalam Negeri untuk ikut dalam pemilihan presiden tahun 2000. Tapi kebanyakan dari partai-partai tersebut dianggap tidak signifikan dalam politik pemilihan. Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2000 kali ini, partai politik yang ikut serta menjadi kontestan pemilihan umum dan dianggap signifikan yaitu Partai Progresif Demokrat (DPP), Partai Kuomintang (KMT), dan Partai Baru (NP). Ketiga partai ini telah memenangkan kursi diberbagai lembaga legislatif.<sup>10</sup>

### 3.2.1 Kuomintang Party (KMT)

Partai Nasionalis yang sering disebut Kuomintang (KMT), merupakan partai politik yang memerintah seluruh atau sebagian negara China mulai tahun 1928 sampai tahun 1949 dan kemudian menguasai Taiwan di bawah pemerintahan Chiang Khai-shek dan para penggantinya. Menurut sejarah, Partai Nasionalis menjadi sebuah partai politik di awal tahun 1912, saat pemerintahan Republik China. Partai Nasionalis berpartisipasi dalam parlemen pertama di China yang dengan cepat bubar oleh suatu kudeta pada tahun 1913. Kekalahan ini membuat para pemimpinnya bertekad untuk menyatukannya kembali. Gerakan para pemimpin Partai Nasionalis pertama dilakukan tahun 1914 pada suatu bentuk perkumpulan rahasia orang-orang China. Partai Nasionalis berhutang besar atas kesuksesan awalnya, bantuan dan nasehat Soviet serta untuk mempererat kerjasama dengan kaum komunis (1924-1927).

Kekuasaan kaum Nasionalis tidak dapat dipisahkan dari Chiang Khai-shek, yang menjadi semakin konservatif dan diktator tetapi tidak pernah totaliter. Program partai didasarkan pada ajaran Tiga Prinsip Sun Yat-sen yaitu Nasionalisme, Demokrasi, dan Sosialisme.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Jason C. Hu, *The Republic of China*, Government Information Office, Taipei, 1995, hal.30

<sup>10</sup> Election dalam <http://www.gio.gov.tw/info/book2000/0106htm>

<sup>11</sup> Nationalist Party dalam <http://www.britannica.com>

Prinsip pertama, *min-tsu chu-I* atau nasionalisme, awalnya diartikan sebagai perlawanan terhadap dinasti Ch'ing (Manchu) dan imperialisme Barat. Sun Yat-sen menjelaskan sebagai ungkapan yang menunjukkan penentuan nasib sendiri untuk masyarakat Cina secara keseluruhan dan juga untuk kelompok minoritas Cina. Prinsip kedua, *min-ch'uan chu-i, or the "right of the people,"* kadang-kadang diartikan sebagai "demokrasi", yang harus dicapai. Dijelaskan oleh Sun Yat-sen, bahwa orang-orang Cina diperbolehkan untuk mengontrol pemerintahan mereka seperti mekanisme pemilu, inisiatif, referendum, dan recall. Prinsip ketiga, *min-sheng chu-i* atau "mata pencaharian masyarakat", yang sering diartikan sebagai "sosialisme". Prinsip ketiga ini tidak begitu jelas, tetapi Sun Yat-sen nampaknya mengartikan sebagai ide persamaan kepemilikan tanah melalui sistem pajak yang adil. Setelah Kuomintang-komunis memisahkan diri tahun 1927, Mao Zedong dan Chiang Kai-shek menegaskan akan membawa semangat tiga prinsip masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

Taiwan menjadi wilayah efektif, terpisah dari sejumlah pulau yang jauh dari Republik Cina (kaum Nasionalis Cina) setelah kemenangan masyarakat komunis di dalam peperangan Jepang terhadap China (1949-1950). Sejak itu, selama bertahun-tahun kaum Nasionalis dijadikan satu-satunya kekuatan politik yang sesungguhnya, yang benar-benar memegang jabatan penting di Legislatif Yuan, Executive Yuan dan Yudicative Yuan.

Pada tanggal 24 November 1994 KMT merayakan hari jadi yang ke-100, menjadikan KMT daya tarik tersendiri dengan anggota 2,1 juta jiwa. Hasil-hasil pemilu di majelis nasionalis, lembaga legislatif dan juga hasil-hasil dari pemilu lainnya, semakin memperjelas status Partai Nasionalis (KMT) sebagai partai yang berkuasa di Taiwan. Pimpinan partai pada saat ini adalah Lien Chan, menggantikan Lee Teng-hui, setelah didesak oleh para pendukung KMT akibat kekalahan calon presiden dan tersingkirnya KMT dari kekuasaan politik Taiwan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Three Principles of The People* dalam <http://www.britannica.com>

<sup>13</sup> Kompas, 24 Maret 2000

Sepertiga dari pejabat KMT adalah para teknokrat dan para spesialis, sedangkan pada tingkat menengah ke bawah anggota partai diorganisir secara berkelompok yang terdiri dari 29 anggota. Terdapat juga kongres propinsi dan komite-komite di tingkat distrik, begitu juga bagi wilayah perkotaan, daerah-daerah Tingkat II dan propinsi serta pada akhirnya juga kongres nasional dan komite pusat.

Kongres Nasional yang mengadakan pertemuan dua tahun sekali merupakan organ partai yang memerintah. Forum inilah yang berhak mengamandemen konstitusi atau anggaran dasar partai. Kongres Nasional berhak memutuskan program partai, memilih ketua partai dan anggota komite pusat, serta menyetujui anggota dari dewan penasihat pusat yang diajukan oleh ketua. Selama terjadi reses, komite pusat yang merupakan organ partai tertinggi berhak mengadakan sidang pleno setiap tahunnya.

Control Standing Committee yang mewakili komite pusat, ketika komite pusat tidak dapat bersidang. Control Standing Committee terdiri dari 31 anggota, 15 orang yang ditunjuk oleh ketua partai, 16 orang dipilih dari dan oleh 210 anggota komite pusat yang dilakukan selama kongres berlangsung. Komite ini merupakan organ yang paling berpengaruh di KMT yang mengadakan pertemuan setiap hari Rabu pagi untuk membahas dan menyetujui kebijakan penting partai dan pemerintah, serta untuk mengajukan orang-orang yang akan duduk di partai dan di jabatan pemerintahan.<sup>14</sup>

Urusan keseharian dari partai diatur oleh Sekretaris Jenderal dan tiga orang Deputi Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal KMT sekarang adalah Lin Fong-cheng.<sup>15</sup> Partai Nasionalis (KMT) memiliki tujuh departemen yaitu: Urusan organisasional, urusan dengan daratan, urusan dengan luar negeri, urusan budaya, urusan aktifitas kepemudaan, urusan sosial, dan urusan aktifitas kewanitaian. Disamping itu terdapat empat komisi yaitu komisi keuangan, komisi sejarah partai, komisi evaluasi dan komisi disiplin pengorganisasian kebijakan.

---

<sup>14</sup> Jason C. Hu, *Op.cit.*, hal.36-38

<sup>15</sup> *Political Parties* dalam [http://www.gio.gov.tw/info/book\\_2000/0106htm](http://www.gio.gov.tw/info/book_2000/0106htm)

Selain cabang di daerah-daerah, KMT mempunyai sekretariat sendiri dan staf administrasinya. Organisasi ini dibiayai oleh keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh partai dan kalangan bisnis yang memihak ke partai, yang berkisar dari penerbitan majalah, surat kabar, stasiun televisi hingga perusahaan alat-alat komputer. Sebagai partai yang berkuasa selama 51 tahun ini, KMT merekomendasikan anggota untuk mengisi jabatan penting dalam pemerintahan termasuk dalam kementerian dalam wakil-wakil menteri, komusaris serta badan-badan khusus. Secara umum dapat dikatakan partai akan mengajukan calon-calonnya bagi semua posisi penting yang ada di pemerintahan.

### 3.2.2 Democratic Progressive Party (DPP)

Partai Progresif Demokrat (DPP) merupakan partai oposisi pertama di Taiwan. DPP dibentuk pada tanggal 28 September 1986, sekarang mempunyai anggota kira-kira 200.00 jiwa. Partai baru ini pada awalnya secara teknis merupakan partai politik yang ilegal dibawah darurat militer yang merupakan otoritas KMT untuk menciptakan masa hukum kolonial. Setahun kemudian, pada bulan Juli 1987, darurat militer yang dibentuk KMT itu dicabut kembali, yang mengijinkan pembentukan partai politik baru. Sejak saat itu muncullah lebih dari 60 partai baru.

Struktur organisasi partai hampir mirip dengan KMT. Kongres Nasional DPP memilih 31 anggota untuk The Central Executive Committee dan 11 anggota untuk The Central Review Committee. Kemudian The Central Executive Committee memilih 11 anggota untuk The Central Standing Committee. Masa jabatan komisi-komisi ini selama dua tahun. Sebelumnya, ketua partai dipilih oleh kongres nasional. Akan tetapi setelah sidang kedua pertemuan kongres nasional ketujuh, bulan September 1997, menetapkan bahwa ketentuan ketua partai dipilih secara langsung oleh semua anggota partai yang dimulai tahun 1998. Ketua DPP sekarang adalah Lin I-hsiung, terpilih bulan Juni 1998. Dia mengumpulkan 62% suara dari anggota partai, jauh diatas lawannya. Ketua partai harus memilih

seorang sekretaris jendral, dua wakil sekretaris jendral dan sejumlah direktur departemen. Sekretaris Jendral DPP sekarang adalah Yu Shyi-ku.<sup>16</sup>

Terbentuknya DPP ini, menandai kulminasi seratus tahun perjuangan dan pengorbanan masyarakat Taiwan bagi pemerintahan. Pada akhir abad ke-19, pada saat Dinasti Ching (Dinasti China) menuntut Taiwan sebagai bagian dari teritorial China, Taiwan telah menjadi umpan dalam meja perundingan politik. Pertama kali Taiwan diserahkan ke Jepang oleh China dalam *Traktat Shimonosheki* tahun 1895. Kemudian Taiwan dikembalikan lagi ke Cina pada akhir perang dunia kedua. Dalam kontradiksi langsung di *Atlantic Charter*, yang ditandatangani oleh Roosevelt dan Churchill berisikan satu prinsip utama di balik perang tersebut, dimaksudkan untuk menjadi hak semua rakyat, memilih bentuk pemerintahan yang mereka inginkan dan untuk mengetahui hak-hak kedaulatan pemerintahannya sendiri yang dicabut hak-haknya dengan paksa. Melihat rezim KMT pada tahun 1945 yang kehilangan dasar pijakan, partai Komunis selama perang sipil di China memindahkan pusatnya ke China dan diikuti kekalahannya pada tahun 1949, saat itu seluruh rezim KMT melarikan diri ke Taiwan. Tetapi, beberapa partai oposisi seringkali menyebabkan kekerasan dan selanjutnya dengan perubahan domestik sosial ekonomi membuka jalan bagi formasi DPP di tahun 1986 untuk mendirikan partai oposisi.

Sekali terbentuk, DPP terus berjuang, dimulai dengan pemberantasan korupsi terhadap anggota KMT yang duduk di pemerintahan. Banyak anggota pendiri DPP dan sejumlah pemimpin partai yang signifikan pada saat itu, termasuk para pengacara tahanan politik mau mengambil resiko untuk mendapatkan kemerdekaan dan kehidupannya untuk mengganti situasi politik di Taiwan. Hanya satu tahun setelah berdirinya DPP, pemerintah baru menghapus darurat militer, sehingga terjadi legalisasi partai politik. Dalam perubahan politik terjadi transformasi struktur politik di Taiwan, termasuk pemilihan parlemen komprehensif pertama pada tahun 1992 dan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 1996.

---

<sup>16</sup> *Political Parties* dalam <http://www.gio.gov.tw/info/book/2000/0106htm>

DPP berada pada garis terdepan gerakan-gerakan yang menuntut keadilan sosial dan politik. Dalam keadilan sosial, DPP mempermainkan kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial yang meliputi hak-hak wanita, warga negara, anak-anak, kaum buruh, masyarakat pribumi, petani dan sektor-sektor masyarakat yang tidak menguntungkan. Secara politik, DPP telah memimpin dan memenangkan perdebatan dalam kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Hal yang paling membedakan DPP dengan dua partai besar lainnya adalah dukungan bagi kemerdekaan Taiwan atau pemisahan politik Taiwan dari Cina Daratan. Meskipun partai DPP telah memasukkan kemerdekaan Taiwan ke dalam program politik mereka, hal penting yang harus direalisasikan adalah isi dari perjuangan partai. Dalam pemilihan akhir-akhir ini kerangka dasar kepemimpinan DPP cenderung berubah pada tema-tema kemerdekaan untuk memperoleh dukungan suara. Disamping itu, DPP sendiri berbeda dari KMT yang berkuasa dalam kebijakan sosial domestik yaitu tekad terhadap anti korupsi dan pemerintahan yang efisien. Secara internasional, DPP mendukung integrasi yang lebih luas ke dalam komunitas dunia yang ditujukan pada peningkatan kemakmuran dan keamanan Taiwan.

Sementara itu, meskipun partai-partai baru bermunculan, hasil pemilihan umum tetap menunjukkan bahwa DPP telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Di bawah tekanan reformasi konstitusional, delegasi yang terpilih pada tahun 1974 akhirnya terpaksa mundur setelah beberapa dekade mendominasi dalam parlemen. Dalam pemilihan daerah tahun 1993, KMT mendapatkan kurang dari separuh untuk pertama kalinya dalam sejarah, sedangkan DPP membuat terobosan baru dengan mendapatkan 41% suara. Pada tahun 1994, kandidat DPP Chen shui-bian, telah merebut 43,6% memenangkan pemilihan walikota Taipei. Sedangkan kandidat KMT berada pada urutan ke-3 dengan 25,8%.

Selanjutnya pada tahun 1997, DPP mengalahkan KMT dalam pemilihan lokal untuk hakim daerah dan walikota kota praja yang memperoleh 8 kursi dari

12 kursi yang disediakan atau memenangkan 43% suara dibandingkan dengan KMT yang hanya 42%.<sup>17</sup>

### 3.2.3 New Party (NP)

Pada bulan Agustus 1993, sebelum Konggres Nasional ke-14 Partai Kuomintang (KMT), sekelompok KMT "*Young Turks*", termasuk tujuh anggota legislatif memisahkan diri dari KMT untuk mendeklarasikan Partai Baru (NP). Menurut pernyataan mereka, ketujuh kelompok anggota itu memprotes kebiasaan tidak demokratis di KMT, dan juga adanya perbedaan ideologi. Tokoh-tokoh yang menonjol tersebut seperti mantan menteri keuangan Wang Chien-shien dan mantan kepala administrasi perlindungan lingkungan Jaw Shaw-kong. Kedua mantan pejabat itu adalah sebagian pendiri Partai Baru, yang memasukkan program anti korupsi dan memperjuangkan keadilan sosial.

Tujuan dari Partai Baru adalah untuk menyerap para pemilih yang tidak puas terhadap gaya pemerintahan Kuomintang selama ini dan juga mereka yang tidak tertarik dengan ide-ide radikal Partai Demokratik Progresif bagi suatu kemerdekaan Taiwan. Sekarang Partai Baru mengakui keanggotaan yang terdaftar hampir mencapai 68.500.<sup>18</sup>

Pada permulaan tahun 1998, Partai Baru membentuk jabatan kampanye terpisah, yang diketuai oleh Jaw Shaw-kong, yang bertanggung jawab pada masalah-masalah kampanye. Selanjutnya pada bulan Agustus 1999, Partai Baru hampir mengejutkan setiap orang dengan mencalonkan penulis terkenal Li Ao sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2000.<sup>19</sup>

### 3.2.4 Nation Building Party (NBP)

Pada tanggal 6 Oktober 1996, sebuah partai politik baru pro-independen secara resmi telah didirikan di Taiwan. Partai tersebut diberi nama Partai Pembangunan Bangsa (NBP) dalam bahasa Taiwan dan Partai Independen Taiwan

<sup>17</sup> *Introduction To The Democratic Progressive Party* dalam <http://www.dpp.org.tw>

<sup>18</sup> *Political Parties* dalam [http://www.gio.gov.tw/info/book\\_2000/0106.htm](http://www.gio.gov.tw/info/book_2000/0106.htm)

<sup>19</sup> *Ibid.*

(TAIP) dalam bahasa Inggris. Pimpinan Partai Independen menyatakan bahwa membangun negara Taiwan yang independen adalah cita-cita utama partai.<sup>20</sup>

Pendukung partai baru ini, berada di belakang beberapa anggota pimpinan persatuan profesor di Universitas Taiwan (TAUP). Para profesor terkemuka adalah Lien Shan-tien dan Li Yung-chih dari Universitas Nasional Taiwan, dan Prof. Chuang Chi-ming Universitas Tam Kang serta Prof. Lin, juru bicara partai.

Sampai akhir tahun 1995, para profesor mendukung DPP dan menjadi terkenal dalam pembicara di rapat-rapat umum pemilu DPP. Akan tetapi, setelah rangkaian fasilitas yang mengecewakan oleh pimpinan DPP sekarang dan dirasakan melemahkan kesetiaan DPP terhadap prinsip kemerdekaan Taiwan, profesor-profesor tersebut didukung oleh sejumlah organisasi sosial, untuk mempersiapkan pembentukan sebuah partai politik yang benar-benar pro-independen.

Di bulan Desember 1995, pimpinan DPP Shih Ming-teh dan Hsu Shin-liang melakukan permainan politik, pertama melalui kerjasama pro-unifikasi partai baru dengan menyusun *grand reconciliation*. Sedangkan pada musim semi 1996, perubahan yang aneh terjadi, pimpinan DPP tersebut menawarkan bergabung dengan KMT untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi. Banyak pendukung DPP yang merasa sangat kecewa dengan tindakan tersebut. Tindakan tersebut dilihat oleh pendukung DPP dan banyak orang sebagai kenyataan, bahwa pimpinan DPP tidak memiliki visi yang jelas bagi masa depan Taiwan.

Akhirnya, dari tinjauan sejarah singkat itu, profesor-profesor itu, merasa perlu mendirikan partai politik baru untuk mempertahankan visi kemerdekaan Taiwan sebagai elemen utama dalam strategi Taiwan dimasa mendatang.

Selanjutnya, pada tanggal 7 April 2000, sejumlah pimpinan utama keluar dari TAIP. Mereka mengatakan bahwa kemenangan Chen Shui-bian pada pemilihan presiden tersebut, telah memenuhi impian cita-cita partainya. Diantara para profesor tersebut adalah pengacara "Stephen" Lee Sheng-hsiung, "Ben" Wei Jui-min Sekjend terdahulu, pemimpin TAIP terdahulu Lee Chen-yuan, profesional medis yang sangat terhormat dan seorang Academia Sinica.

---

<sup>20</sup> *Nation-building Party Formed* dalam <http://www.taip.org.tw>

## IV

### KEMENANGAN CHEN SHUI-BIAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI TAIWAN

#### 4.1 Situasi Menjelang Pemilu

##### 4.1.1 Situasi Politik dan Ekonomi

Satu bulan menjelang pemilihan Presiden periode 2000-2004 suhu politik Taiwan mulai menunjukkan ketegangan. Sejumlah kubu telah menyusun kekuatan dan strategi menandai dimulainya perebutan kursi presiden. Waktu itu telah digelar permainan politik dari pemerintahan Cina yang bermaksud akan mengancam memerangi Taiwan jika negara itu menolak menyatukan diri dengan Cina Daratan. Sehingga memungkinkan rakyat Taiwan memilih kembali kandidat presiden dibawah partai yang berkuasa yakni Lien Chan.

Peta kekuatan politik Taiwan dapat digambarkan sebagai berikut. Partai Kuomintang (partai Nasionalis Cina) pimpinan Lee Teng-hui merupakan *The Ruling Party*. Partai Nasionalis Cina (KMT) mendominasi kekuasaan selama 51 tahun di Taiwan. Ia mendominasi pengaruh terutama di jajaran lembaga legislatif dan eksekutif. Kekuasaan KMT ini menjadi kekuasaan kisah menarik, karena mengalami pasang surut.

Partai Kuomintang yang berhaluan Nasioanalis termasuk fenomenal sejak para pendukungnya melarikan diri ke Taiwan setelah terdesak tahun 1949 oleh kaum komunis Cina pimpinan Mao Zedong. Partai Kuomintang didirikan tahun 1911, dengan total berkuasa 89 tahun, termasuk 38 tahun di Cina Daratan dan 51 tahun di Taiwan. Dalam pemilihan presiden tahhun 2000 ini, partai Kuomintang menjagokan Lien Chan yang sebelumnya menjabat wakil peseiden. Pencalonan Lien Chan ini didukung oleh ketua Kuomintang, Lee Teng-hui, yang juga menjabat Presiden Taiwan tahun 1996-2000.

Di luar partai Kuomintang yang mencalonkan Lien Chan tadi masih ada empat calon dari partai oposisi yang pada umumnya berdiri diseberang Lee Teng-hui, yaitu Chen Shui-bian, James Soong, Li Ao dan Hsu Hsin-liang.

Diantara calon presiden diatas yang dikenal punya hubungan dekat atau lebih spesifik lagi sepaham tentang reunifikasi Cina dan Taiwan adalah Lien Chan, James Soong, Lee Ao, dan His Hsin-liang. Dari keempat kandidat itu hanya Chen Shui-bian yang menyuarakan kemerdekaan Taiwan. Sehingga dengan sikap Chen demikian, banyak dikecam oleh calon lain, seperti Lee Ao dan Hsu Hsin-liang. Menurut mereka Chen Shui-bian adalah orang yang berbahaya, jika terpilih menjadi presiden bisa menyebabkan perang. Maka bila dipetakan secara ringkas kubunya cuma ada dua, yaitu pro status quo dan oposisi.

Di awal bulan Maret sampai hari menjelang pemilihan presiden, pertarungan semakin terbuka dan menunjukka pada situasi politik yang semakin memanas. Meningkatnya suhu politik di Taiwan diakibatkan oleh pernyataan PM. Cina Zhu Rongji di Beijing usai Sidang Konggres Rakyat Nasioanal pada hari Rabu 15 Maret 2000, yang memperingatkan agar rakyat Taiwan tidak memilih calon yang salah.<sup>1</sup> Dalam ancaman itu Zhu Rongji mengatakan siapapun yang terpilih, bila tidak serius reunifikasi, apalagi mengikrarkan kemerdekaan, pasti Beijing akan menyerang. Karena mempertahankan keutuhan Cina merupakan kewajiban dan demi kehormatan pula, Cina siap mempertaruhkan dengan darah dan korban nyawa.

Peringatan itu diyakini banyak pihak lebih ditujukan kepada Chen Shui-bian, kandidat presiden oposisi Partai Progresif Demokrat (DPP) yang pro-kemerdekaan. Chen Shui-bian merupakan rival utama Lien Chan, calon partai Kuomintang yang berkuasa. Berbeda dengan Lien Chan yang memilih kompromi untuk menyelesaikan masalahnya dengan Cina. Chen Shui-bian selalu menekankan hak Taiwan untuk menjadi sebuah negara merdeka. Chen Shui-bian bahkan dengan tegas menolak opsi reunifikasi yang ditawarkan Cina.

Pernyataan PM. RRC Zhu Rongji itu disusul oleh presiden Taiwan Lee Teng-hui yang melakukan manuver politik 'penggembosan' kepada Chen Shui-bian dari DPP. Semula Lee Teng-hui dikhabarkan beralih dukungan dari jagonya, wakil presiden Lien Chan dari Kuomintang kepada kandidat lain khususnya

---

<sup>1</sup> Kompas, 17 Maret 2000

khususnya Chen Shui-bian. Akan tetapi presiden Lee Teng-hui menarik rumor yang berkembang saat itu.

Menurut Lee Teng-hui, penilaian yang mengatakan bahwa dia diam-diam beralih dukungan dari jagonya, wakil presiden dari Kuomintang, kepada Chen Shui-bian adalah tidak benar. Lee Teng-hui menegaskan, dia akan tetap konsisten di Kuomintang dan mendukung kandidat dari Kuomintang. Lee Teng-hui juga memperingatkan rakyat Taiwan, agar tidak mudah termakan isu dan trik-trik kampanye dari kandidat lain, khususnya Chen Shui-bian. Presiden Lee Teng-hui menyarankan agar memilih Lien Chan. Sebab dengan memilih Lien Chan, negara kita ini akan lebih aman, masyarakat akan lebih stabil dan kita bisa lebih tenang dalam menghadapi komunis Cina.

Spekulasi soal kepindahan Lee Teng-hui itu disulut oleh statemen pengusaha terkemuka Hsu Wen-lung, yang siap menjadi penasihat politik Chen Shui-bian. Hsu Wen-lung yang dikenal dekat dengan presiden Lee Teng-hui ini, mengatakan hanya Chen Shui-bian yang bisa meneruskan kebijakan yang diukir Lee Teng-hui.

Asumsi ini semakin menguat ketika penerima Nobel Kimia, 1986, Lee Yuan-tseh memutuskan berhenti dari jabatan ketua Lembaga Riset Akademia Sinica hasil tunjukkan Presiden Lee Teng-hui. Apalagi setelah itu Lee Yuan-tseh mengatakan berpindah ke kubu Chen dan siap menjadi utusan damai Taiwan ke Cina bila kandidat presiden itu terpilih sebagai presiden. Dengan demikian cukuplah alasan mempercayai khobar apabila diam-diam Presiden Lee Teng-hui lompat pagar mendukung Chen Shui-bian.

Di lain pihak fenomena lompat pagar juga terlihat dalam anggota DPP Peng Pai-lsien yang memutuskan meninggalkan Chen Shu-bian dan membelot ke partai yang berkuasa itu.

Selanjutnya untuk menghadapi ancaman teror PM. RRC Zhu Rongji dan kemungkinan pengembosan Presiden Lee Teng-hui, tidak lain adalah menggelar rapat darurat kubu DPP. Akan tetapi sebenarnya bukan pada pertemuan darurat itu sendiri yang perlu dicermati. Ancaman PM. RRC Zhu Rongji menjelang pemilihan Presiden tersebut, setidaknya ikut mengganjal upaya pemulihan

(*rebond*) indeks saham di bursa Hongkong yang sempat terpuruk sampai 8,4% (789,57 poin) dan membuat pemerintah yang berkuasa diam-diam melakukan intervensi sampai 28 milyar dollar Taiwan.<sup>2</sup> Menurut Chen Shui-bian, penurunan ini dianggap disengaja dibuat partai Kuomintang yang berkuasa untuk menimbulkan kepanikan agar rakyat popularitas Chen Shui-bian kian terpuruk dan rakyat tidak memilihnya.

Ancaman keras dari pemerintahan RRC itu ditanggapi Taiwan dengan melakukan siaga tinggi menjelang pemilihan presiden 18 Maret 2000. Menteri Pertahanan Taiwan Tang Fei telah meminta angkatan bersenjata untuk tetap tenang tetapi supaya tetap melakukan siaga tinggi, meski bukan siaga siap tempur, untuk menanggapi pernyataan Beijing. Penegasan Tang Fei tersebut merupakan yang pertama disampaikan pejabat keamanan Taiwan dalam menanggapi ancaman-ancaman keras yang dilontarkan para pemimpin Cina. Pernyataan Zhu Rongji yang lebih tajam dan keras ini mengisaratkan keinginan Cina untuk melakukan reunifikasi secepatnya. Ini membuktikan bahwa seruan untuk merdeka tidak dapat menyelesaikan masalah kedua negara, tetapi malah sebaliknya hanya akan menambah masalah.

Sementara itu ditengah meningkatnya suhu politik di Asia Timur akibat ancaman Cina, kampanye pemilihan presiden di Taiwan secara umum tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Meskipun berdasarkan hasil polling sekitar 40% menganggap ancaman Cina berdampak serius pada pilihan rakyat pemilu presiden, sebanyak 25% mengaku tidak gentar dengan gertakan pemerintah RRC.<sup>3</sup>

Kemudian hasil polling yang lain dari TVBS menunjukkan bahwa kekhawatiran atas ancaman serangan Cina semakin surut. Polling itu mengungkapkan bahwa sekitar 25% responden menyatakan 'khawatir dan sangat khawatir' bila serangan Cina benar-benar terjadi. Namun 68 persennya lagi menjawab sangat tidak khawatir atau tidak khawatir sama sekali.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Jawa Pos, 16 Maret 2000

<sup>3</sup> Jawa Pos, 17 Maret 2000

<sup>4</sup> Surya, 25 Februari 2000

Dari kelima kandidat presiden Taiwan, hanya tiga yang benar-benar bertanding yakni Chen Shui-bian, Lien Chan, dan James Soong. Sedangkan yang lainnya Li Ao dan Hsu Hsin-liang hanya sebagai pengembira saja. Dintara kandidat yang kuat dalam pemilihan presiden 18 Maret 2000 adalah Chen Shui-bian, salah satu politikus yang populer di Taiwan karena pernah menjadi Wali Kota di Taipe. Taipe adalah ibu kota yang paling dinamis di Taiwan, baik secara pemikiran maupun secara ekonomi.

Jabatan Wali Kota bagi DPP merupakan jabatan tertinggi yang pernah dicapai dalam sejarah kiprah politik DPP di Taiwan, sebagai partai oposisi utama. Selama menjadi Wali Kota Taipe (1994-1998) Chen Shui-bian menunjukkan prestasi yang gemilang. Kebijakan dan praktek pemerintahannya dikenal efektif dan efisien. Chen Shui-bian bersama DPP sangat berani melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintah pusat dan mengkritik Kuomintang yang melakukan praktek-praktek politik kekuasaan. Mereka juga berani menolak formula yang ditawarkan pemerintah RRC "*One State Two System*". Dari keberanian Chen Shui-bian itulah rakyat Taiwan mengharapkan Chen Shui-bian bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat, melalui pemilihan presiden yang demokratis.

Alasan diatas cukup dimengerti sebab bagi Taiwan, pemilu itu merupakan ekspresi diri dan wujud dari eksistensi sebagai sebuah negara. Sebaliknya bagi RRC, pemilihan presiden Taiwan merupakan persoalan sensitif karena dianggap sebagai bentuk pembangkangan.

Calon presiden yang patut dipehitungkan adalah Lien Chan, yang diuntungkan dengan jabatan sebagai wakil presiden. Lien Chan pernah meniti karir akademis di Taiwan dan pernah pula menjadi Duta Besar Taiwan untuk negara El Salvador. Lien Chan maju sebagai wakil presiden menyertai Lee Tenghui pada 1996 setelah tiga tahun sebelumnya diangkat sebagai Perdana Menteri. Pencalonan Lien Chan sendiri didukung oleh Ketua Kuomintang Lee Teng-hui yang juga menjabat presiden Taiwan.

Tokoh yang bakal menjadi pesaing kuat Lien Chan adalah James Soong yang maju sebagai calon independen, sebelumnya adalah anggota Kuomintang.

Faktor utama yang membuat ia populer tidak lain adalah James Soong mantan anggota Kuomintang yang membelot karena tidak cocok dengan mekanisme ortodok pada praktek politik dalam pencalonan presiden. Selain itu James Soong dituduh terlibat skandal penggunaan dana partai, ia didakwa menggelapkan uang 368 juta dollar Taiwan (12,3 juta dollar AS).<sup>5</sup> Akan tetapi, James Soong menyangkal telah menyalahgunakan dana tersebut. Ia mengatakan Lee Teng-hui, yang saat itu bertindak sebagai pemimpin Kuomintang, telah mempercayakan uang kepadanya sejumlah 240 juta dollar pada akhir 1980-an dan awal 1990 untuk penugasan partai. Dia menambahkan 100 juta dollar lainnya telah dialokasikan kepadanya untuk merawat keluarga mendiang Presiden Chiang Ching-kuo. Dia mencoba mengemalkan dana tersebut, tapi dia telah ditolak partai lamanya.

Dari dakwaan skandal uang dan dan pembelotan dari Kuomintang tersebut, mengakibatkan James Soong namanya semakin populer dan sekaligus mengubah citra kejujuran dan integritasnya. Menurunnya citra ini mengakibatkan menurunnya dukungan terhadap Kuomintang. Diantara kandidat diatas hanya Lien Chan dan James Soong yang mempunyai pengalaman politik dan birokrasi pemerintahan yang panjang.

Selain ketiga calon tersebut diatas masih terdapat dua calon yang muncul dalam perbincangan publik. Dua calon itu adalah Li Ao dari partai sayap kanan Partai Baru (NP) dan mantan Deputi DPP, Hsu Hsin-liang dari Partai Independen juga, yang hanya akan meramalkan proses pemilihan presiden periode 2000-2004.

Sementara itu, situasi ekonomi Taiwan menjelang pemilihan presiden sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantara faktor-faktor tersebut yaitu penurunan indeks saham Taiex yang disebabkan karena tidak ada kepercayaan dikalangan investor-investor individu dan kekhawatiran meningkatnya kemungkinan Chen Shui-bian dari DPP memenangkan pemilihan presiden yang akan memicu meningkatnya ketegangan dengan RRC. Hal ini terbukti dengan turunnya Indeks Sekuritas Taiwan (*Taiex*) sebanyak 617,65 poin menjadi 8811,95,

---

<sup>5</sup> Republika, 22 Februari 2000

poin, dengan memperdagangkan 114,96 milyar dollar Taiwan (sekitar Rp. 27, 302 trilyun).<sup>6</sup>

Pemilihan umum (pemilu) sendiri membawa pengaruh pada ekonomi, karena politik dan ekonomi saling berkaitan. Ada yang berspekulasi jika Chen Shui-bian terpilih menjadi presiden, maka indeks Taiwan akan terus merosot. Hal itu ditengarahai karena Chen Shui-bian adalah penggagas kemerdekaan Taiwan dari Cina yang dijadikan agenda utama kebijakannya bila terpilih. Bahwa hubungan Cina dan Taiwan harus didasarkan atas kesamaan status sebagai negara. Bahkan salah satu kandidat terpopuler, Lien Chan dalam kampanyenya mengatakan dengan lantang kalau indeks Taiwan akan jatuh sampai 3.000 poin apabila Chen Shui-bian dari DPP memenangkan kursi kepresiden.

Menariknya bursa Taipe makin marak ditengah ketegangan Cina-Taiwan yang memuncak. Sikap Taiwan bersikeras menolak langkah reunifikasi dengan Cina. Meskipun perang kata-kata yang dilontarkan kedua belah pihak sudah semakin memanas, bahkan terpaksa melibatkan pihak militer untuk dalam kondisi siaga tempur. Sikap Taiwan yang bersikeras menolak langkah reunifikasi dengan Cina membuat petinggi Beijing kalap dan mengeluarkan ancamannya. Sebagai contoh pernyataan PM. RRC Zhu Rongji di Beijing, setelah Sidang Kongres rakyat nasional, yang memperingatkan agar rakyat Taiwan tidak memilih calon yang salah. Hal ini dimaksudkan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan presiden Taiwan dan menekan kemungkinan pihak oposisi memenangkan kursi presiden. Tetapi fokus investor di Taipe nampaknya lebih mengarah pada prosesi pemilu dari pada memusingkan gertakan Cina.

Pemilihan umum yang diadakan 18 Maret 2000 memang menjadi fenomena yang lebih menarik pemodal. Alam demokratisasi yang terjalin di Taiwan sejak 13 tahun lalu semakin menggairahkan situasi persaingan para kandidat presiden.

Faktor krusial untuk investor justru ajang perubahan pucuk pimpinan antara Lien Chan dari Partai Kuomintang yang sudah 51 tahun berkuasa, melawan Chen Shui-bian, tokoh yang diunggulkan oposisi dari Partai Progresif Demokrasi.

---

<sup>6</sup> Kompas, 14 Maret 2000

Meski James CY Soon yakni kandidat dari kelompok independen sebenarnya juga memiliki peluang yang sama tetapi dirinya dianggap tidak cukup mampu menyelesaikan masalah-masalah internal dan eksternal negara.

Kandidat lain, Li Ao dari Partai Baru dan Hsu Hsin-lian yang juga dari Partai Independen kurang diperhitungkan pemodal karena diatas kertas nampaknya sulit untuk menang. Ditengah ketidak pastian siapa yang akan memenangkan pemilu indeks Bursa Taiex bergerak melemah. Penurunan cukup tajam menacapai 14% hanya dalam kurun satu bulan menjelang pemilu tanggal 18 Maret 2000 Bahkan empat ari sebelum pemilu indeks Bursa Taipe mencapai titik terendahnya di 8.824,49.<sup>7</sup>

#### 4.1.2 Isu-isu Yang Menonjol

Seperti menjadi sebuah tradisi, pada saat dilaksanakan pemilihan Presiden di Pulau Taiwan yang berjarak sekitar 160 km dari Daratan Cina, suasana di Taiwan kembali menegang dengan munculnya isu-isu yang menonjol. Isu-isu menonjol yang berkembang di Taiwan, sangat mempengaruhi proses pemilihan presiden, khususnya bagi para pemilih yang akan menjatuhkan pilihannya 18 Maret 2000.

Menjelang pemilihan presiden Taiwan yang diikuti dengan lima calon presiden itu, didominasi isu-isu hubungan Taiwan-Cina. Dari pemilu presiden pertama di Taiwan, pada tahun 1996, menciptakan krisis terhadap hubungan Taiwan-Cina. Saat itu, Cina menggelar rudalnya di pantai-pantai sepanjang Selat Taiwan. Langkah ini dipandang sebagai usaha Beijing untuk mempengaruhi proses pemilu. Ketegangan baru selesai setelah Washigon mengirim dua kapal induk ke wilayah ini. Hingga saat ini, Cina masih menganggap Taiwan sebagai salah satu profinsinya. Sementara Taiwan ingin status negaranya dipandang sejajar dengan Cina sebelum sebuah pembicaraan unifikasi dilakukan.

Hubungan Taiwan-Cina menjadi isu utama yang membuat Taiwan meningkatkan kesiagaan untuk menghadapi ancaman militer dari Cina. Militer Taiwan telah meningkatkan kesiagaan tingkat tingi menjelang pemilihan presiden.

---

<sup>7</sup> *Bisnis Indonesia*, 27 Maret 2000

Kesiagaan tingkat tinggi (penuh) berarti meningkatkan jumlah angkatan bersenjata dalam tugas untuk menangkal ancaman perang Cina, yang diberlakukan pada pukul 17.00 waktu setempat (16.00 WIB), Hari Jumat (17 Maret 2000), dan menurut rencana berakhir Minggu (19 Maret 2000), pukul 08.00 waktu setempat (07.00 WIB). Langkah ini disampaikan Menteri Pertahanan Taiwan, Tang Fei, setelah PM. RRC Zhu Rongji memperingatkan agar rakyat Taiwan tidak memilih calon yang salah.<sup>8</sup> Pernyataan keras pimpinan Cina dan isu militer menjadi isu yang menonjol menjelang pemilu 18 Maret 2000.

Sementara itu, gaya kepemimpinan Lee Teng-hui yang tidak kompromis memicu ketidakpastian masyarakat. Pemerintahan Lee Teng-hui mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan kelompok oposisi, sehingga menjadi faktor pelemah Partai Kuintang dalam menghadapi pemilu tahun 2000. Pemerintahan dibawah Lee Teng-hui yang didominasi oleh Kuomintang, diliputi isu-isu korupsi dan kolusi. Rakyat Taiwan dan pihak oposisi merasa risau melihat pemerintah mengabaikan praktik-praktik korupsi dan kolusi tersebut. Mereka juga risau akibat pengurus Kuomintang saling berebut pengaruh dipartai untuk menduduki kursi pemerintahan pusat. Disamping itu pemerintahan Lee Teng-hui tidak ada niatan untuk membentuk pemerintahan yang baik dan bersih (*good government*). Oleh karena itu, rakyat Taiwan menginginkan kandidat presiden baru yang bisa mengatasi masalah-masalah pelik tersebut.

Dari isu-isu menonjol yang berkembang di Taiwan menjelang pemilihan Presiden, sangat mempengaruhi proses pemilihan presiden, khususnya bagi para pemilih yang akan menjatuhkan pilihannya. Para pemilih merasa terintimidasi oleh isu ancaman militer pemerintah Cina, yang mengancam para pemilih, agar tidak menjatuhkan pilihannya kepada kandidat yang pro-kemerdekaan yakni Chen Shu-bian dari DPP partai oposisi utama. Sebab, bila rakyat Taiwan tetap memilih kandidat dari pro-kemerdekaan, pemerintah Cina akan melancarkan serangan militer kepada Taiwan.

---

<sup>8</sup> Media Indonesia, 17 Maret 2000

#### 4.1.3 Kampanye Pemilu

Kampanye pemilu di Taiwan berlangsung selama satu bulan. Kampanye pemilu ini adalah kampanye pemilu untuk memilih seorang presiden dan wakil presiden. Kampanye pemilu di Taiwan tidak jauh berbeda dengan kampanye di Indonesia. Kampanye di Taiwan diwarnai hiburan menarik dengan panggung-panggung terbuka bagi rakyat taiwan maupun wisatawan.

Para kandidat ini memimpin pawai disepanjang ibu kota Taipe. Mereka akan bertanding untuk menggantikan Presiden Lee Teng-hui yang akan pensiun setelah 12 tahun berkuasa. Pemilu ini merupakan pemilihan presiden kedua kali yang digelar langsung pada hari Satu, 18 Maret 2000.

Dalam pemilu ini muncul lima kandidat presiden. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang mejabat wakil presiden pada pemerintahan Lee Teng-hui, ada mantan walikota Taipe yang dikenal sebaai politisi ulung, ada bekas tahanan politik, dan ada juga mantan pelarian politik di AS selama 10 tahun. Kelima kandidat Presiden itu yaitu Chen Shui-bian dari Partai Progresif Demokratik, Lien Chan dari Partai Kuomintang, James Soong dari Partai Independen, Li Ao dari Partai Baru, dan dari Partai Independen lainnya, Hsu Hsin-liang.

Kampanye pemilu ini semakin ramai dengan lima kandidat tersebut. Tiap-tiap kandidat dalam kampanyenya mengajukan program-program untuk mempengaruhi masyarakat agar memilihnya. Chen Shui-bian misalnya, mengangkat isu kemerdekaan Taiwan. Ia berniat akan membuat Taiwan menjadi negara independen yang berdaulat. Secara terbuka Chen Shui-bian berkali-kali menyatakan keinginan terlepas dari Cina Daratan.

James Soong dalam kampanye politiknya mempunyai agenda utama ingin mementuk pemerintahan yang bersih. Sedangkan Lien Chan menginginkan hubungan yang lebih akrab atas dasar posisi masing-masing. Sebaliknya Li Ao dan Hsu Hsing-liang, justru mendukung kebijakan "Satu-Cina". Dari banyaknya kandidat yang mencalonkan presiden Taiwan itu, menggambarkan bahwa pemilu kali ini merupakan pemilu yang paling legitimate dan demokratis. Berdasarkan

undang-undang pemilihan Taiwan, kampanye calon presiden berlangsung sampai hari Jumat, 17 Maret 2000, pukul 00.00 waktu setempat.<sup>9</sup>

Selama kampanye pemilihan, pemerintah Cina mengancam para pemilih Taiwan, mereka mengancam siapa saja yang dianggap pro-kemerdekaan dan mengatakan Beijing tidak akan diam apabila pulau itu ingin merdeka. Sampai saat ini, Cina masih menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya. Meskipun demikian para kandidat presiden Taiwan semakin gencar berkampanye dan saling melontarkan pernyataan lebih unggul dibanding calon lainnya.

#### **4.2 Pelaksanaan Pemilu dan Penghitungan Suara**

Pada tanggal 18 Maret 2000 Taiwan mengadakan pemilihan umum untuk kedua kalinya sejak berdirinya negara tersebut di tahun 1949. Dalam pemilu tersebut selain pemilihan presiden rakyat Taiwan sekaligus juga memilih wakil presiden yang akan mendampingi presiden periode tahun 2000-2004.

Yang menarik dalam pemilihan langsung presiden Taiwan kali ini adalah beragamnya latar belakang calon-calon presiden Taiwan. Lien Chan misalnya, walaupun lahir di Xian, Profinsi Sanxi, RRC, ia memperoleh gelar dokornya di AS. Demikian juga dengan James Soong, yang lahir di Xiantan, Profinsi Hunan, RRC. Selanjutnya calon lainnya yang lahir di Daratan Cina, di Arbin, Profinsi Heilongjiang adalah Li Ao.

Selanjutnya dua calon lainnya lahir di Taiwan yaitu Chen Shui-bian yang lahir di Tainan dan Hsu Hsin-liang yang lahir di Taoyuan, sebuah desa kecil kota Taipe. Dari semua calon presiden ini, hanya Chen Shui-bian yang bukan bekas anggota Kuomintang dan paling keras menyuarakan kemerdekaan Taiwan yang terpisah dari kebijakan Satu-Cina.

Pemilu kali ini merupakan paling legitimate dan demokratis dalam sejarah Taiwan terutama jika dibandingkan dengan pemilu tahun 1996, yang memenangkan Presiden Lee Teng-hui dari Kuomintang. Menurut Komisi Pemilu Pusat dari 15,46 juta pemilih terdaftar, tercatat yang menggunakan hak pilihnya adalah 12.786.671 orang atau 82.69%, kira-kira 6% lebih tinggi dari pada

---

<sup>9</sup> Kompas, 12 Maret 2000

pemilihan presiden empat tahun lalu.<sup>10</sup> Jelas ini merupakan fenomena membanggakan sekaligus memberikan legitimasi terhadap pemenang.

Pada saat dilaksanakan pemilihan presiden di Taiwan, situasi di Taiwan memanas akibat dari ancaman dari pemerintah Cina. Ancaman tersebut merupakan intimidasi terhadap rakyat Taiwan (pemilih), agar tidak memilih calon yang pro-kemerdekaan. Pernyataan keras oleh pemerintah Cina, sebenarnya ditujukan kepada calon presiden pro-kemerdekaan, Partai Progresif Demokrat (DPP) yang merupakan satu diantara kandidat yang menolak keras konsep "Satu Cina Dua Sistem".

Dilain pihak, masyarakat umum di Taiwan ternyata tidak begitu peduli terhadap ancaman Cina tersebut. Rakyat Taiwan tetap antusias memberikan suaranya di tempat-tempat pemungutan suara dan terus menyimak hasil penghitungan suara. Sebab rakyat Taiwan menghendaki adanya perubahan kondisi politik di dalam negerinya setelah 12 tahun dikuasai oleh Presiden Lee Teng-hui. Hasil pemilu menunjukkan bahwa calon presiden dari partai oposisi utama yaitu Chen Shui-bian memenangkan pemilihan presiden Taiwan tahun 2000.

Kemenangan duet presiden terpilih Chen Shui-bian dan wakil presiden Annete Lu, telah mengukir sejarah besar pada awal abad ke-21, sekaligus menumbangkan kekuasaan Kuomintang di Taiwan yang telah berlangsung setengah abad. Suara dan kehendak rakyat tidak dapat dibendung. Itulah yang tercermin dari terpilihnya Chen Shui-bian sebagai presiden kedua di Taiwan, sejak diadakan pemilihan presiden secara langsung.

Kemenangan Chen Shui-bian disambut pesta besar di markas kampanye DPP. Ribuan pendukung DPP berkumpul untuk merayakan kemenangan Chen Shui-bian dengan kembang api dan membunyikan terompet. Demikian pula kemenangan Chen Shui-bian ini disambut jutaan rakyat Taiwan yang turun ke jalan-jalan utama Taiwan, meskipun masih diliputi kecemasan oleh serangan militer Cina.

Calon DPP, Chen Shui-bian dengan pasangannya Hsui-Lien Annete Lu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Taiwan pada tanggal 18 Maret

---

<sup>10</sup> Election dalam [http://www.gio.gov.tw/info\\_book2000/0106htm](http://www.gio.gov.tw/info_book2000/0106htm)

2000, mengakhiri 51 tahun KMT yang memegang presiden di Taiwan. Chen dan Lu memperoleh 4.977.697 total suara atau 39,3%. Kemudian diikuti calon independen James Soong dan pasangannya Chang Chao-ksiung, dengan 4.664.972 atau 36,84%. Selanjutnya calon KMT, Lien Chan dan pasangannya Viencent Siew ketinggalan di tempat ketiga dengan 2.925.513 suara atau 23,1%. Calon independen lainnya Hsu Hsin-liang dan pasangannya Chu Hui-liang kalah dengan 79.429 suara atau 0,6%. Sedangkan dari Partai Baru Li Ao dan pasangannya Fung Hu-Hsiang memperoleh 16.782 atau 0,1%.<sup>11</sup>

Masyarakat Taiwan berkeyakinan dengan berpartisipasi dalam proses politik melalui pemberian suara dalam pemilihan presiden. Sehingga kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan.

Penentuan dalam memilih pemimpin pemerintahan bagi sebagian besar rakyat, diharapkan hubungan Taiwan-Cina akan mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Hal ini akan berpengaruh terhadap stabilitas Asia Timur. Keputusannya untuk memilih Chen Shui-bian dari DPP didasari atas keyakinan rakyat Taiwan atas kebutuhannya yang akan dipenuhinya oleh Chen Shui-bian maupun DPP.

Keputusan ikut serta untuk menentukan pilihan terhadap pemimpin suatu pemerintahan atau kelompok-kelompok yang akan bertindak sebagai wakil dalam sebuah lembaga perwakilan, akan menghasilkan keputusan yang mengikat dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, hal inilah yang disebut sebagai partisipasi politik.

#### **4.3 Faktor-Faktor Penentu Kemenangan Chen Shui-bian**

Keberhasilan Chen Shui-bian menduduki kursi kepresidenan bukanlah tanpa strategi, tetapi hal ini memang sudah diperhitungkan dan dipersiapkan sejak DPP didirikan tahun 1986. Pemunculan Chen Shui-bian sebagai kandidat presiden bukanlah hal baru dalam sejarah politik Taiwan. Chen Shui-bian mulai menggebrak politik Taiwan pada tahun 1994. Tepatnya, saat ia memenangkan

---

<sup>11</sup> Election dalam <http://www.gio.gov.tw/info/book2000/0106.htm>

pemilihan kursi wali kota Taipe, yang merupakan posisi tertinggi yang berhasil dicapai dalam sejarah politik DPP di Taiwan.

Kemenangan Chen Shui-bian ini menurunkan kredibilitasnya lebih setengah abad dominasi politik Partai Kuomintang dan menunjukkan sebuah kecenderungan baru bahwa gelombang demokrasi memang tidak bisa dibendung. Lebih jauh, kemenangan Chen Shui-bian menyebabkan pendukung Kuomintang merasa dipermalukan atas kekalahan telah calonnya, Lien Chan. Setelah penghitungan suara berakhir, para pendukung Kuomintang mengadakan demonstrasi di sekitar markas Kuomintang di Taipe dan menuntut ketua Kuomintang Lee Teng-hui segera mundur.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang ikut menentukan keberhasilan Chen Shui-bian antara lain ada dalam diri Chen Shui-bian sendiri, kharisma, popularitas dan kecerdikannya. Pengalaman politiknya boleh dibilang lebih dari cukup. Ia mengawali karir politiknya sejak ia menjadi penasihat Dewan Kota Taipe pada tahun 1981 sampai 1985. Kemudian menjadi anggota Palemen dari DPP dari tahun 1989 sampai 1994. Selama menjadi anggota Parlemen, ia tercatat sebagai perancang hukum yang efisien dan terkenal atas usahanya yang tak kenal lelah untuk mengungkapkan berbagai skandal dan korupsi.

Pengalaman di anggota Parlemen, mengantarkan Chen Shui-bian menjadi Wali Kota Taipe (1994-1998). Selama menjadi Wali Kota Taipe, pemerintahan Chen Shui-bian di kota terbesar Taiwan ini ditandai dengan kontroversi. Chen Shui-bian mulai menutup industri seks, dan melarang berbagai bentuk perjudian, hiburan malam dan lainnya. Chen Shu-bian mampu mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang menjadi masalah klasik.

Masyarakat sendiri sudah mendambakan seorang pemimpin yang bersih, mampu memenuhi tuntutan rakyat, dan hal ini dipunyai oleh Chen Shui-bian. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa semenjak pemerintahan Lee Teng-hui, seringkali menghiraukan kasus korupsi, kolusi dan tidak usaha untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu rakyat Taiwan bertekad untuk bangkit berpartisipasi melalui pemilu untuk ikut menentukan masa depan negaranya.

Faktor lain yang ikut mempengaruhi kemenangan Chen Shui-bian yaitu orang yang berada di belakang Chen Shui-bian yang mempunyai peran kunci dalam pemilu. Lee Yuan-tseh adalah pendukung Chen Shui-bian, yang akan maju sebagai Perdana Menteri. Ia adalah peraih Nobel Kimia, yang mundur dari jabatan Ketua Lembaga Riset Tertinggi Academia Sinica, yang notabene bentukan Kuomintang untuk mendukung Chen Shui-bian.

Faktor berikutnya bahkan berada di dalam lingkungan politik Kuomintang sendiri. Dengan keluarnya James Soong, mantan Sekjen Kuomintang, dan ikut mencalonkan dalam bursa calon presiden, kemungkinan besar menjadi faktor utama kekalahan Kuomintang. Karena suara Kuomintang terpecah menjadi dua, Lien Chan (KMT) dan James Soong (Independen), yang sama-sama memiliki pendukung yang banyak di Partai Kuomintang dan pengalaman politik yang cukup lama.

Faktor lainnya yang lebih penting adalah sentimen etnis, yang akarnya masih tetap ke Cina. Pemerintah Kuomintang dinilai ceroboh karena tidak mengangap hal pokok, kalau memang di masa mendatang Taiwan ingin muncul sebuah bangsa dengan negara yang merdeka. Yakni, tidak menghilangkan superioritas warga kelahiran Cina yang kini tinggal di Taiwan.

#### **4.3.1 Sosok Pribadi Chen Shui-bian**

Ketika Chen Shui-bian menjadi presiden terpilih Taiwan, seluruh rakyat menyambut gegap gempita. Kemenangannya sebesar 39,3% dari sekitar 15 juta pemilih Taiwan, membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi di Pulau Taiwan. Penampilan Chen Shui-bian memang berbeda dengan saingan utamanya, Lien Chan, dari Partai Nasionalis Cina (Kuomintang) dan calon Independen James CY Soong yang berada di urutan kedua hasil pemilihan presiden kedua langsung. Lien Chan dan James Soong (mantan Sekjen Kuomintang) lebih mencerminkan demokrat mandarin, ketimbang seorang pemimpin rakyat.

Berpawakan kecil dan berpenampilan cerdas, Chen Shui-bian merupakan sosok yang terlalu biasa untuk ukuran politik Taiwan yang hingar bingar dengan reunifikasi Cina. Chen Shui-bian bukan seorang mandarin dengan tradisi

kekuasaan yang panjang dalam politik kekuasaan Cina. Chen Shui-bian adalah korban penindasan tirani Kuomintang.

Chen Shui-bian lahir hari Minggu tanggal 18 Maret 1951 di Desa Hischuang, Distrik Kuan-tien, Kabupaten Tainan, Taiwan, dengan latar belakang keluarga yang miskin. Hanya beberapa ratus keluarga saja yang tinggal di desa itu. Pekerjaan utama penduduk desa itu adalah memetik sayur-sayuran atau, pada masa pendudukan Jepang menebang pohon tebu. Nama yang disandangnya merupakan nama tradisional Taiwan. Shui-bian adalah anak pertama dari pasangan ayah Chen Shung-ken dan ibu Chen Li-chen. Dalam keluarga ini setelah Shui-bian, lahir Chen Shiu-Chin (46), Chen Shiu-jin (43), dan Chen Wen-shou (41).<sup>12</sup>

Nama Shui-bian sendiri mengacu pada arti batang bambu yang biasa digunakan oleh para petani miskin untuk mengangkat dua ember air di ujungnya. Secara harfiah, karakter *Shui* berarti air dan *bian* berarti datar. Nama panggilan Chen Shui-bian adalah A-bian, merupakan sebuah terminologi yang digunakan oleh orang-orang Taiwan untuk menunjukkan keakraban. Dan berbeda dengan orang-orang Taiwan atau Hongkong, A-bian tidak mempunyai nama Inggris seperti Benyamin atau Benni.

Chen Shui-bian menikah dengan Wu Shu-chen tahun 1975. Berbeda dengan A-bian, Wu Shu-chen yang juga lahir di Kabupaten Tainan berasal dari keluarga mampu dan memperoleh pendidikan yang lebih baik dibanding A-bian. Wu Shu-chen dengan setia menemani A-bian mengikuti berbagai kegiatan politik.

Sejak masa sekolahnya A-bian selalu menjadi juara pertama di tingkat kabupaten maupun nasional. Karena kecerdasannya, selesai sekolah menengah atas, A-bian langsung diterima di Universitas Taiwan yang bergengsi. Tahun 1974, A-bian menyelesaikan pendidikannya di bidang hukum sebagai juara pertama. Ia kemudian menjadi pengacara ternama dibidang hukum laut dengan bayaran memadai. Tahun 1976, ia menjadi pengacara utama pada perusahaan Formosa International Marine and Comercial Law dan bekerja di perusahaan ini

---

<sup>12</sup> Media Indonesia, 18 Maret 2000

sampai tahun 1989. Tahun 1980, tanpa membela pengalaman perkara dipengadilan, ia mulai menjadi pengacara untuk kasus politik pertamanya. A-bian ketika itu diminta mewakili rakyat yang dituduh menyebabkan kerusuhan setelah insiden Kaohsiung tahun 1979.

Ketika itu beberapa polisi mengalami luka-luka dalam sebuah acara akbar di kota pelabuhan Kaohsiung untuk merayakan hari Hak Asasi Manusia Internasional. Para tersangka, maupun staf dan pendukung majalah formosa yang mendukung kemerdekaan Taiwan, menuduh pihak Kuomintang yang meyulut kerusuhan Kaohsiung terhadap pemerintah yang berkuasa.

Walaupun A-bian kalah dalam pengadilan politik ini, kesadaran politiknya mulai tumbuh. Ia justru menemukan cara yang terbaik untuk membantu mereka (para pendukung kemerdekaan Taiwan), bukan untuk mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan atau menggelar pengadilan lagi, tetapi bergabung dengan mereka untuk menyelesaikan tugas mereka. Setahun setelah pengadilan insiden Kaouhsiung ini, A-bian untuk pertama kalinya menang sebagai anggota Dewan Kota Taipe dari pihak oposisi. A-bian menjadi anggota Dewan termuda yang pernah dipilih, dan mulai melancarkan kritiknya terhadap pemerintahan lokal yang didominasi pihak Kuomintang.

Awal tahun 1985, A-bian dihukum selama delapan bulan dipenjara setelah kalah dituntut Elmer Fung (anggota pendukung utama Kuomintang dan menjadi calon wakil presiden Partai Baru dalam pemilihan presiden 2000), karena penghinaan. A-bian berhenti sebagai anggota Dewan Kota Taipe untuk konsentrasi pada pengadilan banding. Setahun kemudian ia mencalonkan diri sebagai Bupati Tainan, tetapi kalah.

Setelah A-bian selesai menjalani hukuman, keadaan darurat Taiwan dicabut oleh mendiang Presiden Chiang Ching-kuo, anak laki-laki generalisimo Chiang Kai-shek. Partai Progresif Demokrat (DPP) pun didirikan oleh orang-orang yang menginginkan kemerdekaan Taiwan dan demokrasi penuh di pulau ini. A-bian bergabung sebagai anggota Komite Eksekutif Pusat DPP. Tahun 1989, A-bian terpilih sebagai anggota parlemen mewakili anggota DPP menggantikan posisi istrinya yang menjadi anggota Legislatif Yuan, sejak tahun 1987.

Latar belakang keluarga petani telah membuat Chen Shui-bian berjiwa agresif dan pantang menyerah. Modal itu pulalah yang mengantarkan Presiden Taiwan dari Partai Progresif Demokrat (DPP) ini meraih sukses demi sukses dalam karir politiknya.

Tahun 1994, A-bian meninggalkan parlemen dan terpilih sebagai wali kota Taipe yang paling populer dengan suara mengejutkan, 70%. Inilah tonggak awal yang melicinkan jalan politiknya. Dan ini jabatan tertinggi yang pernah yang pernah diraih politikus DPP sebagai partai oposisi utama.

Gaya kepemimpinan Chen Shui-bian barangkali mengingatkan Presiden KH. Abdurrahman Wahid dari Indonesia. Ia pintar, lucu, cuek dan terkesan blak-blakan. Selama menjadi Wali Kota Taipe, dia dikenal karena keberhasilannya menciptakan pemerintahan yang efisien, tindak kriminal yang sangat rendah, sensor ketat terhadap industri seks. Lebih dari itu Chen Shui-bian sangat dikenal warga kota karena keberhasilannya mengatasi kemacetan lalu lintas yang sering menjadi problem klasik di kota-kota besar.

Sayangnya, ditengah-tengah namanya yang semakin populer sebagai wali kota, Chen gagal memperpanjang jabatannya. Bukan karena kalah dalam pemilihan wali kota berikutnya, tetapi karena panitia pemilihan menggagalkan pencalonannya. Chen Shui-bian bersama DPP telah dicap telah melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintrah pusat dan mengkritik Kuomintang (KMT) yang mulai melakukan praktek-pratek politik kekuasaan. Chen juga selalu dipersalahkan karena telah memperluas perbedaan etnik dengan memisahkan pemukiman warga pribumi dan mereka yang datang dari Cina ke pulau itu pada 1949. Walaupun gagal memperpanjang jabatan wali kota, A-bian tetap menjadi nomor satu. Dan sekarang ia menjadi orang nomor satu di Taiwan sebagai Presiden terpilih untuk mewakili 23 juta jiwa .

#### 4.3.2 Kemampuan Chen Shui-bian Dalam Meyakinkan Opini Publik

Pembentukan terhadap opini publik sangat berperan dalam mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu. Pendapat umum (*public opinion*) menjadi pusat perhatian penting karena merupakan salah satu parameter untuk mempengaruhi

populer tidaknya, disukai tidaknya dan diterima tidaknya setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Opini publik juga merupakan suatu ramalan berhasil tidaknya suatu partai politik pemerintah, dan kepala negara dalam memenangkan pemilihan umum.

Taiwan, seperti pernah disinggung pada bab-bab sebelumnya, berpenduduk multi etnis (Aborigin Melayu Polinesia, Cina Daratan dan dua kelompok Cina di Taiwan yaitu *The Fukian Taiwanese and Hakka Taiwanese*) terutama yang berkaitan dengan masalah ras. Opini publik yang diciptakan Chen Sui-bian dalam pemilihan presiden tahun 2000, menyangkut beberapa hal yang dimaksudkan untuk memperoleh suara rakyat.

Opini yang diciptakan berkenaan dengan isu adanya sentimen etnis yang akarnya masih tetap ke Cina, tampaknya menjadi salah satu alasan utama Chen Shui-bian dalam meyakinkan opini publik. Chen Shui-bian mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan Taiwan, terlepas dari gagasan 'Satu-Cina' pemerintah harus menghilangkan superioritas warga kelahiran Cina yang tinggal di Taiwan. Pemerintahan KMT dinilai ceroboh karena tidak menggarap hal pokok, kalau memang di masa mendatang Taiwan ingin muncul sebagai bangsa dengan negara merdeka. Yakni, tidak menghilangkan superioritas warga kelahiran Cina yang kini tinggal di Taiwan. Misalnya, beberapa kota dan wilayah masih terus saja dipertahankan pembagian daerah untuk warga yang kelahiran Cina Daratan dan kelahiran Taiwan.<sup>13</sup>

Opini yang diciptakan Chen Shui-bian benar-benar mempengaruhi sebagian rakyat Taiwan khususnya kaum muda yang lahir pada tahun 1960-an, sehingga rasanya ada kebanggaan tersendiri bagi pemilih untuk memiliki presiden yang benar-benar asli Taiwan. Sebab, dari tiga calon utama presiden Taiwan yang ikut pemilihan presiden 2000, hanya Chen Shui-bian yang menurut data formal asli kelahiran Taiwan.

---

<sup>13</sup> Jawa Pos, 19 Maret 2000

Chen Shui-bian juga memunculkan opini publik mengenai pilihan politik yang menghendaki Taiwan berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Secara terbuka Chen berkali-kali menyatakan keinginannya terlepas dari Cina Daratan. Pilihan politik Chen tersebut tercermin dalam program politik DPP, bahwa kemerdekaan merupakan cita-cita utama DPP sekaligus program utama di bidang politik selama kampanye pemilihan presiden tahun 2000.

Dalam kampanyenya tersebut, Chen nampaknya memahami keinginan masyarakat Taiwan yang menghendaki perubahan dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Selama 12 tahun terakhir, Taiwan berada di bawah kekuasaan KMT yang berhaluan nasionalis. Dalam pemerintahannya, KMT cenderung mempertahankan *status quo* dan menikmati kemapanan. Perilaku KMT kurang sensitif lagi terhadap aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan transparansi. Kemampuan KMT mengoreksi diripun terus berkurang, misalnya, tidak pernah secara terbuka membicarakan tentang pentingnya pembentukan pemerintahan yang bersih dan baik (*good government*). Citra KMT terus memburuk di bawah kekuasaan presiden Lee Teng-hui, yang menjadi orang kuat dalam pemerintahannya. Rakyat Taiwan semakin memperlihatkan kemarahannya, karena Lee Teng-hui memasukkan para pengusaha, yang dikenal dengan istilah 'politik emas hitam' untuk mempertimbangkan kekuasaan.

Penjelasan diatas sekiranya yang membuat mayoritas rakyat Taiwan tertarik terhadap tema perubahan dan pembaharuan yang dikampanyekan Chen dan DPP. Masyarakat Taiwan, khususnya generasi muda sangat mendukung program politik Chen Shui-bian. Usahnya untuk meyakinkan opini publik tidak lepas dari kebijakan DPP yang didasarkan pada asumsi bahwa Taiwan akan merdeka.

Di awal tahun 1988, dukungan kemerdekaan bagi Taiwan termaktub dalam dokumen resmi pertama oleh DPP, yang dijelaskan dalam resolusi 147. Resolusi tersebut memuat empat situasi dimana Taiwan harus mendeklarasikan kemerdekaannya yaitu: (1) Jika KMT menyetujui negosiasi partai-partai dengan Chinese Communist Party (CCP). (2) Jika KMT mengkhianati Taiwan. (3) Jika

PRC berusaha untuk menyatukan Cina dengan kekerasan. (4) Jika KMT menolak reformasi demokrasi. Pada tahap ini, kemerdekaan Taiwan digunakan oleh DPP sebagai alat untuk menekan KMT terhadap reformasi dan dokumen tersebut benar-benar merupakan *'trial ballon'* yang dipakai untuk menguji reaksi publik dan KMT.<sup>14</sup>

#### 4.3.3 Mobilisasi Chen Shui-bian Atas Dukungan Rakyat dan Program Politik DPP

Dukungan atas partisipasi rakyat berperan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Chen Shui-bian dalam memobilisir dukungan rakyat selalu menandakan pada program dan janji-janji politik yang akan memberikan harapan baru bagi Taiwan. Rakyat dalam menjatuhkan pilihannya kepada siapa yang berhak memegang pemerintahan harus melihat program-program dan janji-janji politik dari calon presiden.

Masa empat tahun bukanlah masa yang singkat untuk sebuah pemerintahan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat. Dalam hal ini rakyat yang akan memilih hendaklah melihat program-program politik yang disampaikan dalam kampanye. Program-program dan janji-janji dalam pemilihan presiden penting juga untuk dipertimbangkan karena terdapat program dan janji yang pada hakekatnya untuk mengambil hati rakyat dan bukan janji yang dapat ditunaikan. Dalam hal ini rakyat hendaklah berpikir secara matang yaitu dengan melihat program-program dan janji-janji dari calon presiden, tentunya tidak jauh dari program-program partainya.

Program politik Chen Shui-bian sebenarnya tercermin dalam kebijakan DPP bahwa Taiwan perlu untuk mengakhiri *frontational stalemate* dengan Cina dan mengembangkan kerangka kerja yang stabil dan sama pada hubungan *cross straits*. DPP beranggapan bahwa hubungan tersebut sebagai hubungan negara antar negara dan menganggap bahwa kebijakan Cina pastilah sebuah

---

<sup>14</sup> Tse-kang Leng, *The Taiwan-China Connection: Democracy and Development Across the Taiwan Straits*, Westview Press, 1996, hal. 42-43

pengembangan kebijakan luar negerinya. Kebijakan DPP ini didasarkan pada asumsi bahwa Taiwan akan merdeka.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan realitas kedaulatan Taiwan Chen Shui-bian bersama DPP ingin membuktikan kepada masyarakat Taiwan dan masyarakat internasional, bahwa Taiwan benar-benar merdeka terlepas dari prinsip 'Satu-Cina'. Sebenarnya dari prespektif DPP, Taiwan telah merdeka sejak tahun 1949 dan menegaskan bahwa Taiwan adalah Taiwan, Cina adalah Cina dan hubungan Taiwan dengan Cina harus didasarkan prinsip kesamaan yang saling menguntungkan antar negara.<sup>16</sup>

Dari penjelasan diatas, DPP melalui calon presiden Chen Shui-bian mengajukan program-program dan janji-janji politiknya sebagai berikut ini. Berkaitan dengan realitas kedaulatan Taiwan, sebuah negara yang merdeka harus dibentuk dan konstitusi baru harus disusun untuk menjadikan sistem legal sesuai dengan realitas sosial di Taiwan. Dan juga untuk kembali ke komunitas internasional menurut prin-prinsip hukum internasional. Selanjutnya cakupan kedaulatan Taiwan atas tanah dan rakyat harus didefinisikan kembali dengan tujuan ganda pembentukan dasar legal bagi hubungan antar dua negara berdasarkan hukum internasional dan perlindungan hak-hak rakyat dari kedua negara.

Program politik DPP yang lain mengenai sistem politik berdasarkan demokrasi dan kemerdekaan. Negara demokratis dan merdeka harus meninggalkan segala bentuk kekerasan dan *autocracy* dan berdiri sendiri atas dasar politik legal yang menghormati kehendak merdeka kelompok mayoritas dan juga prinsip untuk menentukan nasib sendiri. Negara tersebut harus melindungi hak asasi manusia, kedaulatan, pembagian kekuasaan, aturan hukum, kebebasan hukum, kesamaan status bagi semua partai politik dan harus memiliki sistem administrasi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu DPP mengusulkan bahwa pemerintahan Taiwan yang baru diharapkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 45

1. Menjaga martabat manusia dan hak asasi manusia: Rakyat merupakan inti dari sistem nasional dan sosial. Rakyat tidak hidup untuk melayani sistem bangsa dan sosial, tetapi sistem bangsa dan sosial ada untuk melayani rakyat. Kita menyakini bahwa semua sistem legal, hukum administrasi, ekonomi dan sosial merupakan sarana untuk mempertahankan martabat manusia dan hak asasi manusia. Martabat manusia dan HAM harus dilindungi oleh konstitusi dan harus dibatasi oleh hukum apapun. Kebebasan untuk berpikir, beragama dan riset akademis tidak boleh dibatasi oleh hukum apapun. Hukum-hukum yang membatasi kebebasan berbicara, pers, dan organisasi tidak diperkenankan melebihi apa yang lebih penting.
2. Menjamin prinsip kedaulatan rakyat: Sumber dari semua kekuasaan politik berasal dari rakyat. Parlemen dipercaya oleh rakyat untuk melaksanakan kewajiban untuk waktu yang ditentukan. Pemilihan-pemilihan harus dilaksanakan atas dasar reguler (keteraturan) untuk memberikan kesempatan rakyat memilih wakil-wakil pada semua level. Hukum apapun yang ditetapkan parlemen harus sesuai dengan keinginan rakyat. Sementara itu, warga negara memiliki hak 'alami' untuk bertahan. Pemerintahan bertanggung jawab terhadap rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan bentuk pemerintahan dan arah pembangunan politik di masa depan.
3. Menyusun sistem suara untuk pembagian kekuasaan dan pengontrol serta keseimbangan: Organisasi-organisasi pada semua level harus mampu untuk saling mengawasi. Distribusi yang sama pada pengawasan dan keseimbangan harus dilakukan di antara pemerintah lokal maupun pemerintah pusat untuk memastikan implementasi otonomi lokal.
4. Menyusun sistem suara untuk implementasi partai-partai politik: Kerjasama antara partai-partai politik untuk membenuk keinginan rakyat adalah sangat diperlukan dalam aturan konstitusional. Prinsip-prinsip kemerdekaan, kesamaan dan demokrasi bagi semua partai politik harus ditegakkan dalam sistem politis.
5. Melaksanakan kemerdekaan berserikat dan menyadari pentingnya gerakan-gerakan politik sosial: Dalam masyarakat plural, kebebasan berserikat dan

berorganisasi merupakan hak dasar rakyat. Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak tersebut tetapi harus mendorong rakyat untuk mengawasi gerakan-gerakan yang mempermudah komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Komunikasi serupa ini akan mengurangi masalah yang disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak sesuai dalam kekuasaan pemerintah, monopoli pasar oleh kapitalis dan kolaborasi antara birokrat dan pengusaha.

6. Melindungi kebebasan pers. Surat kabar, majalah, stasiun-stasiun siaran dan jaringan televisi harus melaksanakan tanggung jawab penuh pada rakyat dan memberikan informasi yang cukup untuk merefleksikan opini publik. Surat kabar, stasiun siaran dan jaringan televisi tidak boleh dimonopoli oleh partai atau golongan manapun, dan kebebasan mereka dari kontrol pemerintah harus dilindungi oleh hukum.
7. Memastikan bahwa sasaran aturan hukum adalah mengejar dan memenuhi keadilan. Negara yang diatur oleh hukum harus didasarkan pada konstitusi, menjaga martabat hukum dan menegakkan hukum. Legislatif harus didasarkan pada prinsip-prinsip saja dan prinsip-prinsip ini harus diformulasikan dengan trend-trend perkembangan sosial. Organisasi hukum harus bebas dari pengaruh partai politik atau golongan manapun dan harus benar-benar menegakkan hukum.
8. Membentuk sistem administrasi yang netral dan bertanggung jawab. Saat kekuasaan eksekutif terus berkembang, sistem administrasi harus mempertahankan pendirian politik netralnya dan harus berada dibawah pengawasan agen-agen pemerintahan lainnya untuk menghindari penyalahgunaan.
9. Mengamati dekrit darurat pemerintah. Keadaan pemerintah darurat tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan harus diawasi oleh parlemen. Untuk mencegah keadaan darurat dari pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah harus menyadari dan memahami hak-hak rakyat untuk menentang dekrit darurat secara mendadak.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Platform Politik dalam <http://www.dpp.org.tw>

Program politik DPP yang tidak kalah penting ialah kebijakan pertahanan damai dan merdeka serta kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, pemerintahan yang baru disarankan untuk:

1. Melanjutkan dan mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain. Pemerintah harus bekerjasama dengan negara-negara yang mendukung perdamaian, keadilan internasional, demokrasi dan penghormatan kedaulatan rakyat, yang didasarkan pada prinsip persamaan, saling ketergantungan, kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri. Untuk mempromosikan kebijakan luar negeri yang merdeka, bangsa tersebut harus mengambil tolok ukur yang lebih fleksibel, dan aktif untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan status Taiwan dalam komunitas internasional.
2. Menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai. Pemerintah harus membuat banyak cara untuk mendapatkan perdamaian dalam kondisi yang tidak mempengaruhi hak bangsa untuk mempertahankan dirinya sendiri. Pemerintah harus menentang bangsa manapun yang mencoba untuk tekanan militer untuk menduduki teritorial negara lain atau untuk menguasai kesatuan politik yang status nasionalnya masih dalam pertentangan. Pemerintah harus mendukung perundingan anti senjata dunia, harus mengontrol perlengkapan militer dan kerusakan nuklir serta senjata kimia di dunia.
3. Membiarkan semua residen Taiwan menentukan masa depan Taiwan. Menurut prinsip-prinsip yang diabadikan dalam peraturan internasional yang mengatur hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Semua rakyat bebas menentukan status politik mereka dan mengatur perkembangan ekonomi sosial dan budaya. Tidak ada pemerintahan atau pemerintahan gabungan memiliki hak untuk menentukan afiliasi politik Taiwan.
4. Menghentikan konfrontasi antara pemerintahan pada dua kubu *Taiwan Strait*. Pemerintah harus menemukan solusi yang memuaskan terhadap masalah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan dan perdamaian. Solusi permasalahan antara dua kubu tersebut harus ditentukan oleh semua 'residen' Taiwan berdasarkan keinginan bebas mereka.

5. Mengurangi jumlah angkatan perang dan meningkatkan efektifitasnya dengan meningkatkan teknologi pertahanan. Pemerintah harus mempersingkat waktu wajib militer dan lebih banyak mengalokasikan dan untuk membeli perlengkapan pertahanan angkatan udara dan angkatan laut, termasuk memperkuat produksi senjata sendiri.<sup>18</sup>

#### 4.3.4 Kelemahan Partai Kuomintang

Kekalahan Lien Chan dari Partai Nasionalis Cina (Kuomintang), dalam pemilihan langsung presiden Taiwan, menunjukkan sebuah kecenderungan baru bahwa gelombang demokrasi tidak bisa dibendung. Kuomintang yang didirikan tahun 1911 dengan mesin politik kekuasaan dan keuangannya, ternyata tidak mampu membendung arus demokrasi yang dihembuskan Chen Shui-bian melalui Partai Progresif Demokratik (DPP) yang baru didirikan tahun 1986.

Kekalahan Kuomintang akibat calon presidennya tidak terpilih menjadi presiden Taiwan, lebih menyakitkan karena hanya memperoleh 23,1% dari total sekitar 15 juta pemilih. Perolehan ini sangat kecil dibanding apa yang diperoleh Chen Shui-bian dari DPP dengan 39,3% atau calon Independen, James Soong yang memperoleh 36,8%.

Ada beberapa faktor yang menentukan kekalahan Kuomintang dalam pemilihan Presiden kali ini. *Pertama*, sudah sejak lama Kuomintang dikenal sebagai partai berkuasa yang penuh dengan intrik politik kotor, seperti korupsi dan politik uang, untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam masa kekuasaannya selama 51 tahun di Taiwan, kekuasaan politik Kuomintang menyebabkan penderitaan dan kematian atas lawan-lawan politiknya.

Politik uang yang dijalankannya juga menyebabkan rakyat Taiwan mulai bosan dan muak pada Kuomintang. Belum lagi sikap arogansi para elite Kuomintang, khususnya menyangkut tangan berdarah mereka dalam peristiwa tragis di kota pelabuhan Kaohsiung, Taiwan bagian Selatan, serta peristiwa-peristiwa lain yang menyebabkan kematian dan kesengsaraan.

---

<sup>18</sup> Platform Politik dalam <http://www.dpp.org.tw>

Faktor *kedua* adalah terpecahnya suara perolehan Kuomintang dengan pembelotan James Soong, mantan Sekjen Kuomintang. Kalau dilihat hasil yang diperoleh James Soong, terlihat betapa besar sebenarnya suara-suara Kuomintang yang beralih ke mantan Gubernur Taiwan ini. Pembelotan James Soong sendiri dengan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden menunjukkan adanya perpecahan yang tajam di dalam Kuomintang.

Faktor *ketiga* adalah kondisi eksternal, khususnya tekanan RRC dan suara-suara Kuomintang bahwa akan terjadi perang kalau memilih Chen Shui-bian, sudah tidak lagi sesuai dengan realitas yang berkembang di masyarakat di Taiwan. Pernyataan Beijing dan Kuomintang tentang Chen Shui-bian yang akan memerdekakan Taiwan ternyata tidak lagi efektif. Di sisi lain, kemenangan Chen Shui-bian sekaligus menunjukkan kepada Beijing bahwa rakyat Taiwan tidak mau diintimidasi dengan uji coba rudal atau ancaman kemungkinan pecahnya konflik militer di Selat Taiwan.

Dan faktor *keempat*, berkembangnya kesadaran politik yang semakin dewasa di kalangan rakyat Taiwan, bersamaan dengan meningkatnya kesejahteraan dan tingginya pendidikan mereka. Kemudian bergabungnya Presiden Academia Sinica (lembaga intelektual paling bergengsi di Taiwan) pemenang hadiah Nobel, Lee Yuan-tseh, misalnya juga menjadi faktor penting kekalahan Kuomintang, apalagi Lee Yuan-tseh banyak berbicara tentang kejelekan yang terjadi di dalam Kuomintang.

## V KESIMPULAN

Proses pemilihan presiden secara langsung tahun 2000 seperti isu-isu yang menonjol, sikap dan pandangan rakyat dalam pemilihan presiden, diwarnai dengan isu hubungan Cina-Taiwan yang membuat Taiwan meningkatkan kesiagaan untuk menghadapi ancaman militer dari Cina. Isu-isu menonjol yang berkembang di Taiwan menjelang pemilihan presiden, sangat mempengaruhi proses pemilihan presiden, khususnya sikap dan pandangan rakyat yang akan menjatuhkan pilihannya. Rakyat Taiwan merasa terintimidasi oleh isu ancaman militer Cina, yang mengancam para pemilih agar tidak menjatuhkan pilihannya kepada calon yang pro-kemerdekaan, yakni Chen Shui-bian. Sebab, bila rakyat Taiwan tetap memilih calon yang pro-kemerdekaan, pemerintah Cina akan melancarkan serangan militer kepa Taiwan. Akan tetapi, di Taiwan mulai berkembang kesadaran politik yang semakin dewasa di kalangan masyarakat Taiwan, bersamaan dengan meningkatnya kesejahteraan dan tingginya pendidikan mereka. Sehingga rakyat Taiwan tidak menanggapi secara serius ancaman Cina dan hal tersebut terbukti pada hasil akhir penghitungan suara. Chen Shui-bian dari DPP atau Minjintang sukses menumbangkan lima dasawarsa dominasi politik Taiwan ditangan Partai Nasionalis Cina atau KMT dalam pemilihan presiden Taiwan. Kekalahan KMT tersebut, menunjukkan kecenderungan baru bahwa gelombang demokrasi memang tidak bisa dibendung.

Kemenangan Chen Shui-bian dalam pemilihan presiden secara langsung tahun 2000, dipengaruhi oleh kelebihan-kelebihan Chen Shui-bian yang tidak dimiliki oleh calon lain dan janji-janji yang memberikan harapan baru bagi kemajuan Taiwan. Chen Shui-bian mampu meyakinkan rakyat Taiwan dengan memunculkan opini publik mengenai pilihan politik yang menghendaki Taiwan berdiri sendiri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dalam kampanyenya, Chen Shui-bian memahami keinginan masyarakat Taiwan yang menghendaki perubahan dan suasana baru dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Chen Shui-bian berani menolak reunifikasi dengan Cina bila formula yang ditawarkan adalah

*one state two system*. Yakni, dua pemerintahan hanya ada di satu kedaulatan Cina seperti yang diberlakukan Beijing kepada Hongkong dan Makau. Hal-hal tersebut berpengaruh besar terhadap keberhasilannya menduduki jabatan presiden.

Demikian pula, kemenangan Chen Shui-bian tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang diakibatkan oleh kekalahan KMT. Kuomintang (KMT) dikenal sebagai partai berkuasa yang terlibat korupsi untuk mempertahankan kekuasaannya. Terpecahnya perolehan suara KMT yang disebabkan oleh pembelotan James Soong, mantan sekjend KMT, dengan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden tahun 2000. Berikutnya adalah kegerahan rakyat Taiwan melihat pejabat KMT yang semakin seru memperebutkan pengaruh di partai yang cukup merisaukan.

Lebih jauh lagi Chen Shui-bian telah mengeluarkan janji-janji politik untuk memperbesar dukungan yang akhirnya menghasilkan suara yang lebih banyak bagi Partai Progresif Demokrat (DPP) hingga dapat memenangkan pemilihan presiden. Janji-janji politik Chen Shui-bian tercermin dalam program-program politik DPP yang berkaitan dengan realitas kadaulatan Taiwan, susunan politik berdasarkan pada demokrasi dan kemerdekaan, dan kebijakan-kebijakan pertahanan damai dan merdeka serta kebijakan-kebijakan luar negeri. Janji-janji politik tersebut disampaikan dalam kampanyenya yang akhirnya menghasilkan dukungan lebih banyak dari para pemilih. Chen Shui-bian juga berjanji menggagas kemerdekaan Taiwan dari Cina sebagai agenda utama kebijakannya bila terpilih. Menurut Chen Shui-bian, hubungan Cina dan Taiwan harus didasarkan asas kesamaan status sebagai negara yang berdaulat. Selain itu, Chen Shui-bian juga menolak konsep Cina mengenai reunifikasi yang dikenal dengan kebijakan "*one state two system*". Tidak mengherankan, disaat pemilu yang dibayang-bayangi intimidasi militer Cina, Chen Shui-bian adalah pilihan yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- ☐ Ani W. Soetjipto, 1996, *Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, PT. Pustaka Jaya, Jakarta.
- ☐ Harold F Gaswell, Voting Edwin R. Saligman & Alfin Johnson, 1934, *Encyclopedia of The Social Science*.
- ☐ John F Copper, 1996, *Second Edition Taiwan, Nation State or Province?*, Westview Press, Taipei.
- ☐ Jason C Hu, 1992, *Tanya Jawab Mengenai Republik Cina Taiwan*, Tientsin Street, Taipei.
- ☐ Jason C Hu, 1995, *The Republic of China*, Government Information Office, Taipe.
- ☐ Joseph Frankel, 1980, *Hubungan Internasional*, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta.
- ☐ Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung.
- ☐ Mohtar Mas'oeed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta.
- ☐ Mohtar Mas'oeed, 1989, *Studi Hubungan Internasional*, Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- ☐ Mohtar Mas'oeed & Colin MacAndrews, 1997, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- ☐ Meriam Budihardjo, 1981, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, PT. Gramedia, Jakarta.
- ☐ Mc. Clelland, Charles A., 1981, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*, Terjemahan Mien Jobhaar dan Ishak Zahir, CV. Rajawali, Jakarta.
- ☐ Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- ☐ Ricard A. William, 1988, *Negara dan Bangsa, Jilid 4*, PT. Widyadara, Jakarta.
- ☐ Sutrisno Hadi, 1986, *Metode Riset, Jilid 1*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- ☐ The Liang Gie, 1974, *Ilmu Politik: Studi Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan dan Metodologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- ☐ Tse-kang Leng, 1996, *The Taiwan-China Connection: Democracy and Development Across The Taiwan Straits*, Westview Press, Taipei.
- ☐ Winarno Surakhmad, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, Edisi Ketujuh*, Tarsito, Bandung.
- ☐ \_\_\_\_\_, 1995, *Japan in Modern History, Vol. 1*, Shobundo Company Ltd. Japan.

**Terbitan berkala:**

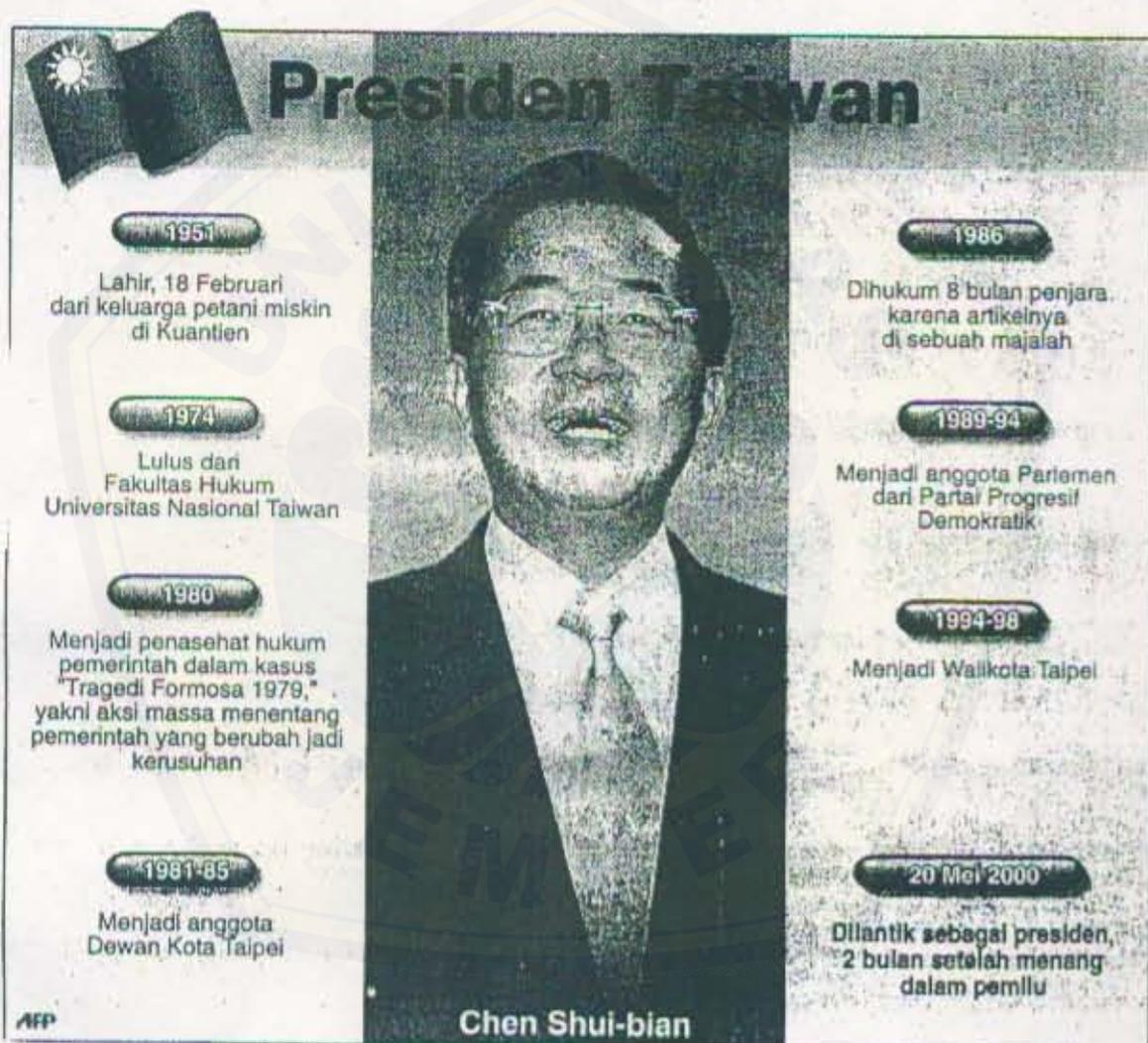
- \* Beijing Review, No.13, 27 Maret 2000

**Surat Kabar:**

- ◆ Bisnis Indonesia, 27 Maret 2000
- ◆ Jawa Pos, 16 Maret 2000
- ◆ Jawa Pos, 17 Maret 2000
- ◆ Jawa Pos, 19 Maret 2000
- ◆ Kompas, 12 Maret 2000
- ◆ Kompas, 14 Maret 2000
- ◆ Kompas, 17 Maret 2000
- ◆ Kompas, 19 Maret 2000
- ◆ Kompas, 24 maret 2000
- ◆ Media Indonesia, 17 Maret 2000
- ◆ Media Indonesia, 18 Maret 2000
- ◆ Surya, 25 Februari 2000
- ◆ Surya, 25 Maret 2000
- ◆ Republika, 22 Februari 2000

**Website:**

- ☞ *Central Election Commission* dalam <http://www.gio.gov.tw.tw/info/book2000/0106htm>.
- ☞ *Election* dalam <http://www.gio.gov.tw/info/book2000/0106htm>
- ☞ *Electoral System* dalam <http://www.gio.gov.tw/info/book2000/0106htm>
- ☞ *Introduction To The Democratic Progressive Party* dalam <http://www.dpp.org.tw>
- ☞ *National Party* dalam <http://www.britannica.com>
- ☞ *Nation Building Party Formed* dalam <http://www.taip.org.tw>
- ☞ *Political Parties* dalam <http://www.gio.gov.tw/info/book2000/0106htm>
- ☞ *Platform Politic* dalam <http://www.dpp.org.tw>
- ☞ *Recals and Referendums* dalam <http://www.gio.gov.tw/info/book2000/0106htm>
- ☞ *Three Principles of The People* dalam <http://www.britannica.com>



The infographic features a central portrait of Chen Shui-bian, a man with glasses wearing a dark suit, white shirt, and patterned tie. To the left of the portrait is the flag of the Republic of China (Taiwan). The title 'Presiden Taiwan' is prominently displayed at the top. The timeline is presented in two columns, with key events marked by years in rounded rectangular boxes. The text is in Indonesian.

## Presiden Taiwan

**1951**  
Lahir, 18 Februari dari keluarga petani miskin di Kuantien

**1974**  
Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Nasional Taiwan

**1980**  
Menjadi penasihat hukum pemerintah dalam kasus "Tragedi Formosa 1979," yakni aksi massa menentang pemerintah yang berubah jadi kerusuhan

**1981-85**  
Menjadi anggota Dewan Kota Taipei

**1986**  
Dihukum 8 bulan penjara karena artikelnya di sebuah majalah

**1989-94**  
Menjadi anggota Parlemen dari Partai Progresif Demokratik

**1994-98**  
Menjadi Walikota Taipei

**20 Mei 2000**  
Dilantik sebagai presiden, 2 bulan setelah menang dalam pemilu

**Chen Shui-bian**

**AFP**

Sumber: Media Indonesia, 20 Mei 2000

**Chen Shui-bian's Victory Speech after the 10th Republic of China  
Presidential and Vice Presidential Election**

Government Information Office

18 March 2000

The election results for the 10th ROC Presidential and Vice Presidential election have been declared. The Democratic Progressive Party candidate Chen Shui-bian and Annette Lu, have been elected president and vice president in Taiwan's second democratic presidential election.

First, we want to thank the people of Taiwan with our most solemn and in our hearts. We would like to thank the DPP comrades. We want to thank the Academia Sinica President Lee Yuan-tseh and the national policy advisers boldly pledging their support. We furthermore would like to thank all those who have contributed to the campaign process.

This moment is a dignified and sacred one in the history of Taiwan—because the courageous people of Taiwan, with love and hope, have conquered fear and darkness. They have used their sacred ballots to express their determination to uphold the democracy of Taiwan.

That Annette Lu and I are elected does not mean a personal victory or a victory for the DPP. This is a victory for democracy and a victory for the people. This glorious moment also marks the beginning of our responsibilities. We want to thank all the countries of the world who have over the years shown concern and support for Taiwan. This has facilitated the smooth completion of Taiwan's presidential election. Today, Taiwan has written a new chapter in its road to democracy, and has given birth to a renewed opportunity for democracy and peace in the Asia-Pacific region. It has also concretely acted as a demonstration of the third wave of global democratization. From now on, Taiwan will continue to enhance the exchange and interaction between the government and people of the Western Pacific regions. We will dedicate ourselves toward preserving the peace and stability of the Taiwan Strait and the Asia Pacific.

The government led by Annette Lu and I will take advantage of Taiwan's developmental experience to assist the promotion of democracy and preservation of human rights in international societies. With our economic strength, we will assist Third World countries in reforms and development and fulfill our responsibility as a member of the international society.

This election is not only the pride of the people of Taiwan, but it is also the pride of Chinese all over the world. We share the same bloodlines and culture. We hope that through more intimate exchange and interaction, with patience and respect, we can collectively create a harmonized and joyous new era. Peace and stability in the Taiwan Strait is the common hope of people on both sides. In the future, we are willing to conduct extensive, constructive communication and dialogue with the utmost sincerity and determination. Under the priority of ensuring national security and social benefits, we are willing to negotiate in various issues, including direct transportation links, business links, investments, peace agreement and a confidence building mechanism for military affairs.

We will also, with sincerity, invite Mr. Jiang Zemin, Mr. Zhu Rongji and Mr. Wang Daohan to visit Taiwan. A-bian and Annette Lu are also willing to go on a trip of negotiation and communication to Mainland China before our

1989 ~ 2000

Election Results (# of Seats) of Major Political Parties

	Democratic Progressive Party (DPP)	Kuo Ming Tang (KMT)	New Party (NP)	Independent	Total Seats
1989 Legislative Election		94	-	14	130
1991 National Assembly Representative Election		254	-	5	325
1992 Legislative Election		95	-	15	161
1993 Local Governmental Election		14	-	1	21
1994 Provincial Congress Election		91	15	17	175
1994 Provincial Government & Taipei City, Kaohsiung City Mayoral Elections		2	-	-	3
1995 Legislative Election		85	21	4	164
1996 National Assembly Representative Election		183	47	5	334
1996 Presidential Election			-	-	1
1997 Local Governmental Election		8	-	3	23
1998 Legislative Election		123	11	21	225
1999 Yulin County Governor Election			-	1	1
2000 Presidential Election			-	-	1

Sumber: <http://www.dpp.org.tw>

[multivictoriac@mail.dpp.org.tw](mailto:multivictoriac@mail.dpp.org.tw) [yichiac@mail.dpp.org.tw](mailto:yichiac@mail.dpp.org.tw) webmaster



